

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>4</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>7</b>
<b>1.2 Maksud dan Tujuan</b>	<b>13</b>
<b>1.3 Landasan Hukum</b>	<b>14</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan</b>	<b>15</b>
<b>BAB 2. PROFIL KEMISKINAN DAERAH</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Kondisi Umum Daerah</b>	<b>16</b>
<b>2.2 Kondisi Kemiskinan Daerah</b>	<b>32</b>
2.2.1 Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan	42
2.2.2 Dimensi Pendidikan	47
2.2.3 Dimensi Kesehatan	59
2.2.4 Dimensi Prasarana Dasar	79
2.2.5 Dimensi Ketahanan Pangan	84
<b>BAB 3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>	<b>100</b>
<b>3.1 Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>100</b>
<b>3.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>103</b>
<b>3.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>111</b>
3.3.1 Analisis Pendapatan Daerah	111
3.3.2 Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung	116
3.3.3 Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan	117
<b>BAB 4. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>	<b>122</b>
<b>4.1 Kelembagaan TKPK</b>	<b>122</b>
<b>4.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>128</b>
<b>4.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>137</b>
4.3.1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	137
4.3.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat	139
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	<b>140</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b>	<b>140</b>
<b>5.2 Rekomendasi</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>143</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2016.....	17
Tabel 2. Arus Migrasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015 .....	20
Tabel 3 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung, 2012-2016.....	22
Tabel 4 Komposisi Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang .....	23
Tabel 5 Nama Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, dan Jarak antara Ibukota Kabupaten/Kota dengan Ibukota Provinsi menurut Kabupaten/Kota, 2016 .....	31
Tabel 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah, 2012-2017 .....	35
Tabel 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Lampung Menurut Daerah, Sept. 2016-Maret 2017 .....	36
Tabel 8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2015-2016 .....	37
Tabel 9 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2015 ....	41
Tabel 10 Pengangguran Terbuka menurut Daerah di Provinsi Lampung .....	45
Tabel 11 APK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2016 .....	50
Tabel 12 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten/Kota, 2016 .....	53
Tabel 13 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	55
Tabel 14 Angka Melek Huruf 10+Kabupaten Kota, 2016.....	58
Tabel 15 Angka Kesakitan dan Jumlah Kasus DBD, 2004-2016 .....	77
Tabel 16 Panjang Jalan Negara menurut kondisi Jalan di Provinsi Lampung 80	
Tabel 17 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Ketersediaan Listrik PLN dan Non-PLN, 2016 .....	82
Tabel 18 Perbandingan NTP dan Perubahan NTP Juni 2017 menurut Provinsi se-Sumatera (2012=100) .....	84
Tabel 19 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi Lampung Per Subsektor Mei 2017 s.d. Juni 2017 .....	85

Tabel 20 Kinerja Produksi Tanaman Pangan Provinsi Lampung .....	88
Tabel 21 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator PPH Ketersediaan dan Indikator Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2016 .....	90
Tabel 22 Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung Tahun 2016 .....	90
Tabel 23 Ketahanan Pangan Berdasarkan Analisa Pembobotan Komposit	97
Tabel 24 Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga, dan Rumah Tangga (Klaster I), 2016 .....	104
Tabel 25 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas, (Klaster 2) .....	107
Tabel 26 Program Pemberdayaan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil .....	109
Tabel 27 APBD Provinsi Lampung menurut Pendapatan .....	112
Tabel 28 Komponen Pendapatan Asli Daerah Lampung .....	115
Tabel 29 Kapasitas Fiskal APBD Provinsi Lampung, 2016 .....	116
Tabel 30 Kapasitas Fiskal APBN Provinsi Lampung, 2016 .....	116
Tabel 31 Belanja menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung .	118
Tabel 32 Dana yang dianggarkan untuk mendukung Sekretariat TKPK Provinsi Lampung .....	125

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 .....	18
Gambar 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung menurut Kabupaten/Kota .....	18
Gambar 3 Mobilisasi Kependudukan Provinsi Lampung .....	19
Gambar 4 Persentase penduduk yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung .....	25
Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia Se-Sumatera, 2012-2016 .....	26
Gambar 6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, 2012-2016 ....	27
Gambar 7 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Sumatera Triwulan-I 2017 ...	28
Gambar 8 Laju Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha .....	28
Gambar 9 Perbandingan Tingkat Inflasi Lampung dan Nasional .....	29
Gambar 10 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia ....	30
Gambar 11 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional sampai Tahun 2017 .....	33
Gambar 12 Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2013 s.d Maret 2017 .....	34
Gambar 13 Rincian Data BDT Tahun 2015 .....	40
Gambar 14 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2011-2016 .....	42
Gambar 15 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Lampung dan Indonesia .....	42
Gambar 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2013-2017 .....	43
Gambar 17 Perkembangan Penduduk yang bekerja menurut kegiatan Ekonomi Formal/Informal di Provinsi Lampung .....	44
Gambar 18 Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera .....	44
Gambar 19 Pengangguran Terbuka menurut Daerah di Provinsi Lampung, 2016 .....	45
Gambar 20 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan, .....	49
Gambar 21 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan, .....	51

<b>Gambar 22 Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah .....</b>	<b>54</b>
Gambar 23 Persentase Penduduk Buta Huruf 15+, 2012–2016 .....	56
Gambar 24 Angka Buta Huruf Umur 15+ Tahun Provinsi Lampung dan Nasional, Tahun 2012-2016.....	57
Gambar 25 Trend Kematian Bayi Lampung dan Indonesia, 2010-2016.....	59
Gambar 26 Trend Kematian Bayi Lampung dan Indonesia, 2010-2016.....	60
Gambar 27 Jumlah Kasus Kematian Bayi Provinsi Lampung Tahun 2016.....	61
Gambar 28 Grafik Penyebab Kematian Bayi Di Provinsi Lampung .....	62
Gambar 29 Angka Kematian Balita, 2010-2016 .....	63
Gambar 30 Trend Kasus Kematian Anak Balita Di Provinsi Lampung.....	64
Gambar 31 Kasus Kematian Anak Balita.....	65
Gambar 32 Penyebab Kematian Anak Balita Di Provinsi Lampung.....	66
Gambar 33 Tren Kasus Kematian Ibu, 2011 – 2016.....	67
Gambar 34 Kasus Kematian Ibu menurut Wilayah, 2016.....	68
Gambar 35 Penyebab Kematian Ibu Di Provinsi Lampung Tahun 2016.....	68
Gambar 36 Trend Cakupan Penolong Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan .....	70
Gambar 37 Persentase Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih per Kabupaten/Kota, 2016 .....	71
Gambar 38 Target dan Capaian Prevalensi Balita Gizi Kurang .....	72
Gambar 39 Jumlah Kasus Kumulatif HIV/AIDS yang Terlaporkan, 2011-2016 .....	73
Gambar 40 Distribusi Kasus HIV/AIDS per Kab/Kota di Provinsi Lampung, 2016 .....	74
Gambar 41 Persentase Penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS, 2011-2015 .....	74
Gambar 42 Kasus DBD per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016 .....	75
Gambar 43 Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk .....	76
Gambar 44 Angka Kematian DBD per 100.000 Penduduk.....	77
Gambar 45 Akses Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota.....	79
Gambar 46 Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota.....	81
Gambar 47 Jumlah Desa yang difasilitasi STBM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016.....	81

Gambar 48 Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Lampung dan Nasional .....	89
Gambar 49 Peta Ketahanan Pangan Berdasarkan Analisa Komposit .....	97
Gambar 50 Rata-rata Harga Beras, 2011 – 2016 .....	98
Gambar 51 Harga Barang Kebutuhan Pokok .....	99
Gambar 52 Bagan Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung .....	124

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih dan fasilitas tempat pembuangan air besar), pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah) dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Pada masyarakat yang masih sederhana susunan dan organisasinya, kemiskinan bukan merupakan problema sosial karena mereka menganggap semuanya sudah ditakdirkan sehingga usaha-usaha untuk mengatasinya mereka tidak terlalu memperhatikan keadaan tersebut kecuali apabila mereka merasa menderita, sedangkan pada masyarakat modern yang kompleks, kemiskinan menjadi problema sosial seorang merasa miskin bukan karena kurang makan, pakaian atau perumahan tapi harta miliknya dianggap kurang cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada.

Menurut Hall dan Midgley, menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah keadaan kaya dan miskin berdampingan tidak merupakan problema sosial sampai saatnya perdagangan berkembang pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan di terapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat. Kemiskinan mulai muncul sebagai problema sosial pada saat orang sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu mengatakan apakah dirinya miskin atau kaya, dan perbedaan kedudukan ekonomi ditetapkan secara tegas oleh warga masyarakat.

Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Jurang pemisah yang semakin melebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan semakin meluasnya kemiskinan di suatu wilayah. Oleh karenanya orientasi pemerataan merupakan usaha yang harus menjadi dasar pelaksanaan pembangunan guna memerangi meluasnya kemiskinan tersebut.

Kemiskinan secara umum dilihat atas dasar pemenuhan kebutuhan atau materi yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi suatu rumah tangga dengan jumlah minimum kebutuhan hidup. Akan tetapi saat ini kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, persoalan munculnya jutaan anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki



kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan sangat terbatas.

Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, infrastruktur yang belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sistem serta sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, bahkan merupakan masalah global yang secara khusus tertuang dalam tujuan MDGs.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara lebih konkrit amanat konstitusi untuk penanggulangan kemiskinan tersebut tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat.

Penanggulangan kemiskinan pada era ini masih tetap mendapat perhatian, hal ini dapat dimaklumi mengingat koridor penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Wujud nyata peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan periode 2015-2019 telah dituangkan ke dalam sembilan agenda (nawacita), yaitu: (1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain sembilan agenda nawacita, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun juga tertuang dalam Tujuan *MDGs (Millenium Development Goals)*. Target-target dari MDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional.

Meski begitu, secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus *MDGs* yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Nawacita di antaranya:

1. Keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.
2. Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
4. Akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.
5. Perubahan iklim, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca

melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Keselarasan MDG's atau Tujuan Pembangunan Milenium dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla “Nawacita” diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian RPJMN 2014–2019 yang menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025 sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan–tujuan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Provinsi Lampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan Provinsi Lampung selama 3 (tiga) tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tingginya angka kemiskinan Provinsi Lampung dibanding nasional mengisyaratkan pada kita bahwa Provinsi Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Dalam Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategi, energi masyarakat dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi tersebut merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan di Provinsi Lampung dalam periode tahun 2015-2019 dengan visi “Lampung Maju dan Sejahtera 2019”.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama merupakan Misi Provinsi Lampung dalam upaya mengembangkan

dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang. Pengembangan sumberdaya manusia berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), pelayanan kesehatan di setiap siklus kehidupan dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sesuai dengan Peraturan Presiden 96 Tahun 2015, dinyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Secara lebih rinci, tugas-tugas tersebut di antaranya :

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan,
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

TKPK Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan Kerja di lingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan. Target pengurangan angka kemiskinan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan.

Menurunnya persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2016 sebesar 14,29 menjadi 13,86 pada Maret Tahun 2017 merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab isu yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dengan target penurunan sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 11,10%. Kinerja tersebut dapat

tercapai melalui koordinasi program oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/57/VI.01/HK/2017. Kelembagaan TKPK dibentuk dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salah satu tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung adalah menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai kinerja dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Tahun 2016 di Provinsi Lampung.

Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah:

- a. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2016;
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan kebijakan (program, anggaran, dan regulasi) yang telah ditempuh sebagai upaya penanggulangan kemiskinan;

- c. Sebagai bahan masukan bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dalam melakukan perbaikan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

### **1.3 Landasan Hukum**

Dasar penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
16. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/458/VI.02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2016.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah:

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

*Bab 1 Pendahuluan*

*Bab 2 Profil Kemiskinan Daerah*

*Bab 3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*

*Bab 4 Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan*

*Bab 5 Penutup*

## **BAB 2. PROFIL KEMISKINAN DAERAH**

### **2.1 Kondisi Umum Daerah**

Secara geografis Lampung terletak pada 103<sup>o</sup>40' – 105<sup>o</sup>50' bujur timur (BT) dan 6<sup>o</sup>45' – 3<sup>o</sup>45' lintang selatan (LS). Provinsi ini berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara, di Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah Timur dibatasi Laut Jawa, dan di Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara pulau Sumatera.

Topografi Lampung terutama di bagian barat merupakan daerah topografi berbukit sampai bergunung. Sebagian besar wilayah ini merupakan kawasan hutan lindung yang meliputi 30,43% dari total wilayah Lampung, hal ini menyebabkan sebaran penduduk yang mengelompok di wilayah-wilayah tertentu. Akibatnya wilayah Barat Lampung yaitu Lampung Barat, Pesisir Barat, dan sebagian Tanggamus menghadapi kesulitan mengembangkan wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas wilayah. Kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam semakin membatasi akses penduduk, baik terhadap pusat-pusat perekonomian maupun terhadap pelayanan dasar lainnya. Kondisi ini menyebabkan penduduk tidak dapat memanfaatkan sumber daya dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara optimal.

Selain itu terdapat 69 buah pulau besar dan kecil yang sebagian besar terletak di Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus, dan hal ini menyebabkan distribusi barang dan jasa wilayah kepulauan menjadi mahal karena terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan antarpulau terhadap pusat perekonomian. Potensi-potensi ekonomi yang ada di pulau sulit untuk berkembang sehingga biaya hidup masyarakat wilayah kepulauan menjadi lebih tinggi. Dari segi pelaksanaan pembangunan untuk wilayah kepulauan menyebabkan biaya tinggi untuk menyediakan bahan baku yang tidak ada di pulau tersebut.



a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS (September 2016), jumlah penduduk di Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebanyak 87.873 jiwa dari Tahun 2015 sebanyak 8.117.268 jiwa menjadi 8.205.141 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.205.694 orang dan penduduk perempuan sebanyak 3.999.447 orang. Berdasarkan sebaran penduduk, jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu 1.250.486 orang dan paling sedikit berada di Kota Metro sebesar 160.729 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel 1. dibawah ini :

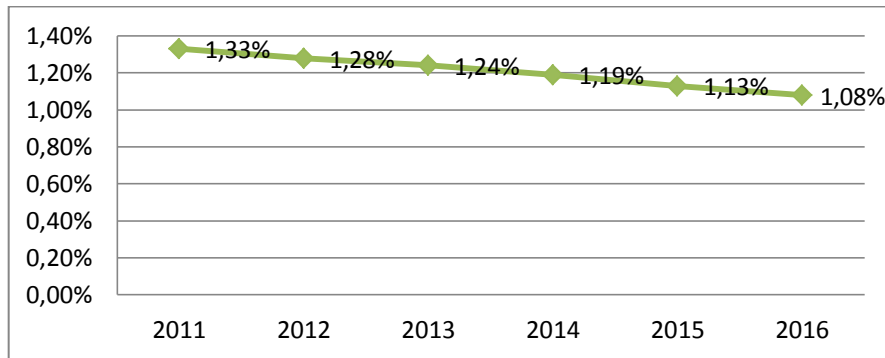
**Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2016**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Laki-laki)	Jumlah Penduduk (Perempuan)	Total Jumlah Penduduk
Lampung Barat	157 088	138 601	295.689
Tanggamus	302 474	277 909	580.383
Lampung Selatan	504 498	478 387	982.885
Lampung Timur	520 814	497 610	1.018.424
Lampung Tengah	636 688	613 798	1.250.486
Lampung Utara	309 608	299 696	609.304
Way Kanan	225 286	212 244	437.530
Tulang Bawang	225 227	209 898	435.125
Pesawaran	222 013	209 185	431.198
Pringsewu	200 092	190 394	390.486
Mesuji	102 873	94 040	196.913
Tulang Bawang Barat	136 922	130 051	266.973
Pesisir Barat	79 393	71 895	151.288
Bandar Lampung	502 418	495 310	997.728
Metro	80 300	80 429	160.729
<b>Jumlah</b>	<b>4.205.694</b>	<b>3.999.447</b>	<b>8.205.141</b>

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 terus mengalami penurunan dari 1,33% menjadi 1,08%.

**Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2011-2016**

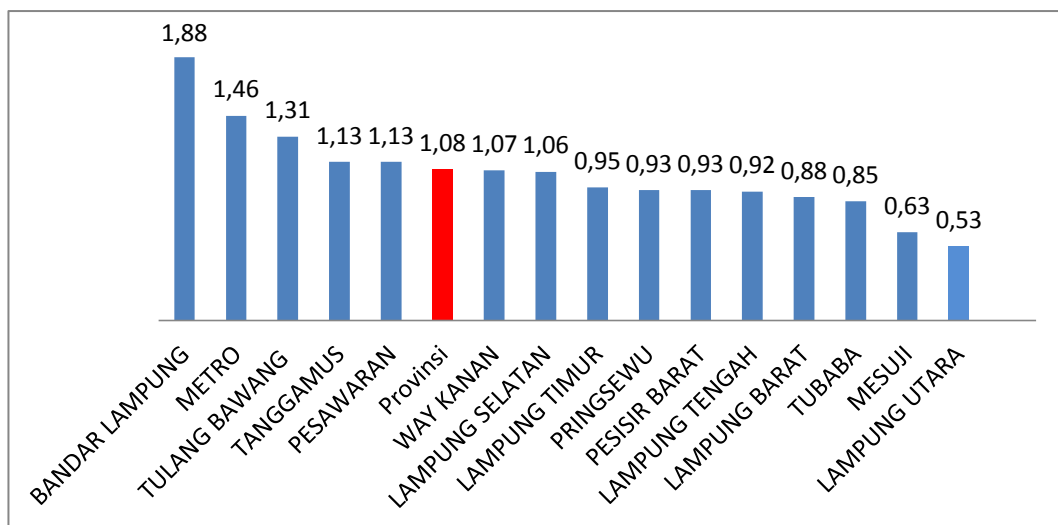


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Berdasarkan gambar di atas dapat diasumsikan bahwa penurunan laju pertumbuhan penduduk akan berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota pada tahun 2016 terendah di Kabupaten Lampung Utara (0,53 persen) dan tertinggi di Kota Bandar Lampung sebesar (1,88 persen) atau jauh di atas rata-rata provinsi (1,08 persen) dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung menurut Kabupaten/Kota**

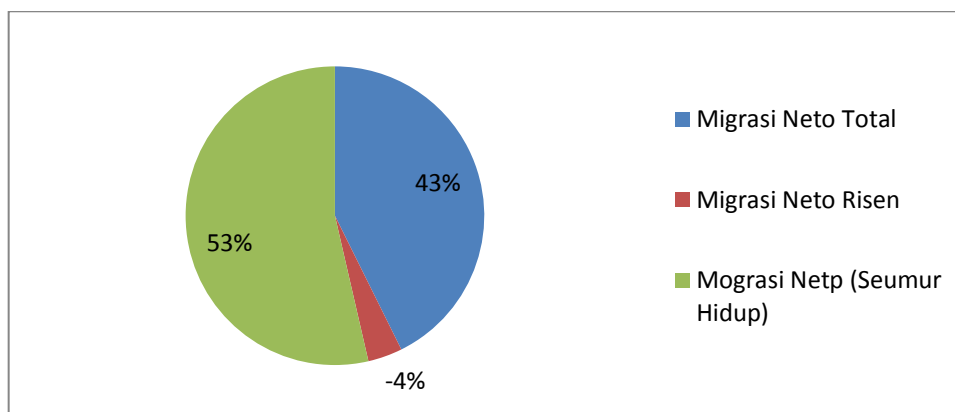


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Masalah kependudukan klasik di Indonesia termasuk Provinsi Lampung selain jumlah penduduk yang besar adalah persebaran penduduk yang tidak merata, baik antar pulau, provinsi maupun antar desa dan Kabupaten/Kota. Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kesenjangan tersebut akan mempengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk. Baik pola migrasi neto dan seumur hidup memiliki pengaruh terhadap kebijakan pembangunan disuatu daerah.

Kecenderungan kesenjangan tersebut adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju kedaerah yang lebih maju. Dipihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan peningkatan secara signifikan perkembangan ekonomi wilayah di Provinsi Lampung. Namun perlu dicermati pula adanya arus balik mobilitas penduduk antar wilayah-wilayah di Provinsi Lampung, khususnya kaum terpelajar dan kaya dari beberapa daerah tersebut. Di samping itu, ada pula penurunan jumlah migrasi atau mobilitas penduduk kelas menengah kebawah antar daerah di Provinsi Lampung akibat kebijakan-kebijakan dan kondisi daerah tujuan yang kurang kondusif.

**Gambar 3 Mobilisasi Kependudukan Provinsi Lampung**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Mobilitas penduduk antar Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung cenderung tinggi dan bersifat positif. Migrasi Netto seumur hidup tertinggi terjadi pada Kabupaten Lampung Timur (1.007.893 jiwa) dan Kabupaten Lampung Tengah (1.238.097 jiwa). Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, Kota Bandar Lampung memiliki tingkat migrasi neto seumur hidup yang paling tinggi yang mengindikasikan bahwa kota masih memiliki daya tarik yang kuat bagi para pendatang wilayah lain.

Pencapaian migrasi risen menunjukkan Kota Bandar Lampung menjadi wilayah dengan nilai negatif terbesar yaitu 30.095 jiwa dan Kabupaten Lampung Selatan menjadi wilayah dengan nilai positif terbesar. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya penduduk tetap Kota Bandar Lampung yang melakukan aktifitas ekonomi di luar wilayah Kota Bandar Lampung. Pola tersebut memiliki dampak terhadap lambatnya upaya penyebaran penduduk dan pembangunan daerah-daerah di Provinsi Lampung.

**Tabel 2. Arus Migrasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung  
Tahun 2015**

Kabupaten/Kota	Migrasi Netto (Seumur Hidup)	Migrasi Netto (Risen)	Migrasi Netto Total
Lampung Barat	292.927	(4.557)	19.472
Tanggamus	573.268	(1.678)	10.824
Lampung Selatan	971.807	8.580	17.199
Lampung Timur	1.007.893	2.787	59.562
Lampung Tengah	1.238.097	(10.597)	61.379
Lampung Utara	605.822	(14.890)	20.069
Way Kanan	432.526	5.612	108.091
Tulang Bawang	429.048	(655)	140.702
Pesawaran	425.964	(169)	25.137
Pringsewu	386.550	(5.036)	(29.296)
Mesuji	195.592	1.754	78.497
Tulang Bawang Barat	264.474	7.182	107.118
Pesisir Barat	149.732	2.944	29.117
Bandar Lampung	977.686	(30.095)	(49.634)
Metro	158.215	1.114	(63.405)

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Hubungan antara migrasi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah bersifat resiprokal. Di satu pihak pola migrasi seperti yang telah disebutkan di atas menyebabkan ketimpangan ekonomi antardaerah. Akan tetapi, ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat mempengaruhi volume dan arah migrasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan migrasi, sifat hubungan seperti ini harus menjadi perhatian.

#### b. Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam penurunan kemiskinan. Rata-rata lama sekolah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut relatif tidak terlalu besar. Populasi penduduk juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruhnya relatif kecil sedangkan pendidikan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh paling besar.

Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan. Berdasarkan tabel 14 rata-rata lama sekolah di Indonesia meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dikarenakan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar dan komitmen pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan jangka panjang SDM yang berkualitas.

**Tabel 3 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung, 2012-2016**

Nama Kabupaten/Kota	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Barat	7,47	7,47	7,25	7,56	7,28
Tanggamus	7,43	7,43	6,63	7,27	6,87
Lampung Selatan	7,5	7,57	7,01	6,86	7,53
Lampung Timur	7,6	7,76	7,16	7,20	7,55
Lampung Tengah	7,6	7,6	7,06	7,14	7,37
Lampung Utara	8,1	8,1	7,69	7,70	7,71
Way Kanan	7,33	7,36	6,76	7,32	7,33
Tulang Bawang	7,39	7,39	7,1	7,11	7,12
Pesawaran	7,53	7,57	7,21	7,23	7,24
Pringsewu	8,62	8,64	7,53	7,83	7,84
Mesuji	6,39	6,39	5,8	6,12	6,13
Tulang Bawang Barat	7,49	7,49	6,81	6,82	6,83
Pesisir Barat	*	7,71	7,36	7,47	7,48
Bandar Lampung	10,3	10,3	10,85	10,87	10,88
Metro	10,15	10,15	10,54	10,55	10,56
<b>Lampung</b>	<b>7,87</b>	<b>7,89</b>	<b>7,48</b>	<b>7,56</b>	<b>7,63</b>

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dalam 5 (lima) tahun terakhir rata rata lama sekolah di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sebesar 7,87 dan tahun 2016 sebesar 7,63.

#### c. Ketenagakerjaan

Selama setahun terakhir terlihat ada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut latar belakang pendidikan, yaitu pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma/sarjana) turun dari 13,38 persen menjadi 11,65 persen dan sebaliknya pengangguran yang berpendidikan rendah (SMP ke bawah) naik dari 48,59 persen menjadi 50,91 persen. Penduduk yang bekerja terlihat adanya sedikit penurunan pada pekerja yang berpendidikan rendah. Kondisi yang sama dialami oleh pekerja yang berpendidikan menengah. Sementara pekerja yang berpendidikan tinggi mengalami peningkatan yakni dari 7,63 persen naik menjadi 9,49 persen.

Untuk penduduk yang bekerja itu, didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan ke bawah. Dari sisi pengangguran ini masih didominasi oleh SMA. Pengangguran mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan bahwa pengangguran di Provinsi Lampung ini termasuk dalam pengangguran friksional yaitu pengangguran yang sedang mencari pekerjaan yang sesuai.

**Tabel 4 Komposisi Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, 2017**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja		Pengangguran	
	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2016	Februari 2017
<= SD	45,99	46,38	24,89	29,20
SMP	22,85	20,88	21,90	21,71
SMA Umum	15,35	14,30	30,73	19,54
SMA Kejuruan	7,87	8,96	14,23	17,90
Diploma I/II/III	1,90	2,72	3,48	3,40
Universitas	6,04	6,76	4,78	8,25
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan utama penduduk yaitu sekitar 48,27 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Selama periode setahun terakhir jumlah pekerja Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan mengalami kenaikan sebanyak 123,9 ribu pekerja. Diikuti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan & perikanan yang bertambah 111 ribu pekerja. Sektor yang paling banyak mengalami pengurangan tenaga kerja adalah Industri sebanyak 73,2 ribu pekerja.

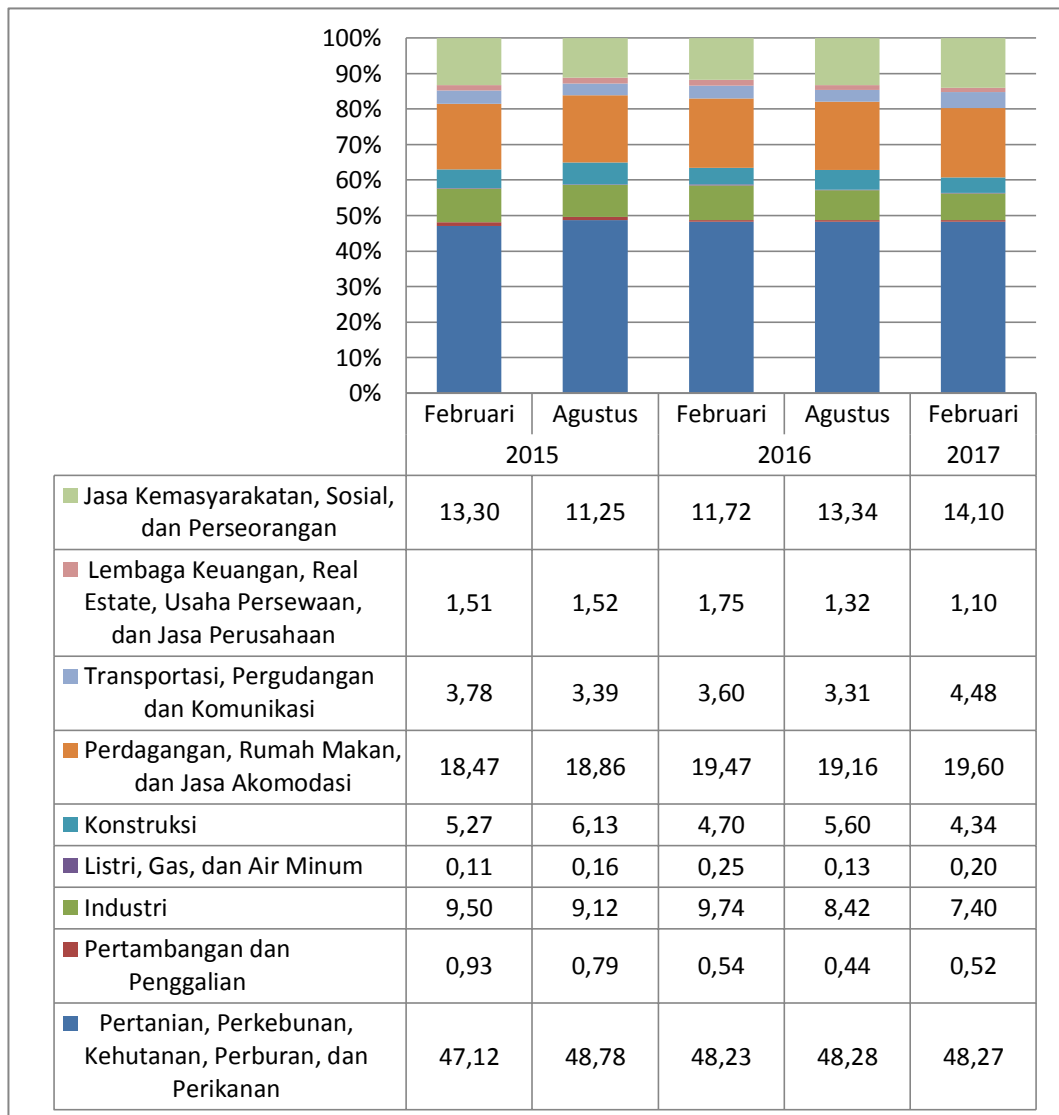
Komposisi penduduk Lampung yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan utama sedikit mengalami perubahan dibanding keadaan Februari 2016. Sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan utama sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu 48,27 persen. Disusul dua lapangan pekerjaan lain yakni berturut-turut

perdagangan/rumah makan dan jasa akomodasi (19,6 persen) serta jasa kemasyarakatan/sosial dan perorangan (14,1 persen). Ketiga lapangan usaha utama tersebut menyerap lebih dari 75 persen tenaga kerja di Lampung. Lapangan usaha lain memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja kurang dari 10 persen.

Dilihat tren sektoral, hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun dibanding setahun yang lalu. Secara absolut, lapangan pekerjaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan selama setahun yang lalu menyerap tenaga kerja paling banyak yakni 123,9 ribu pekerja. Diikuti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan & perikanan sebanyak 111 ribu pekerja. Sektor yang paling banyak mengalami *drop out* tenaga kerja adalah Industri sebanyak 73,2 ribu pekerja.



**Gambar 4 Persentase penduduk yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung**



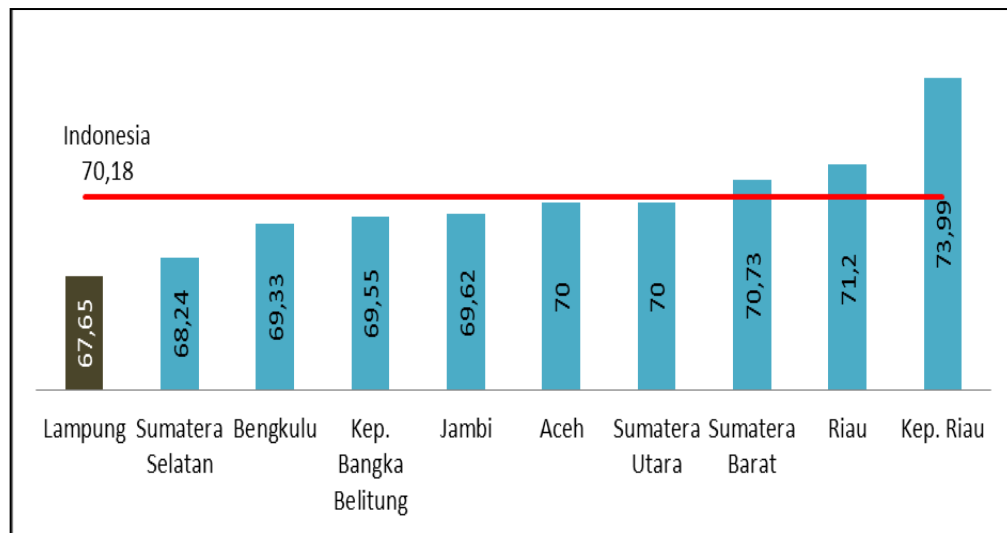
Sumber :BPS Provinsi Lampung 2017

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada sisi lain, kemiskinan memiliki korelasi linier dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya semakin tinggi kualitas manusia di suatu daerah maka seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dengan meningkatnya IPM berarti memberikan gambaran bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita semakin membaik. IPM Provinsi Lampung tahun 2016 mencapai angka 67,65

persen masih berada paling bawah se-Sumatera dan Nasional. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut:

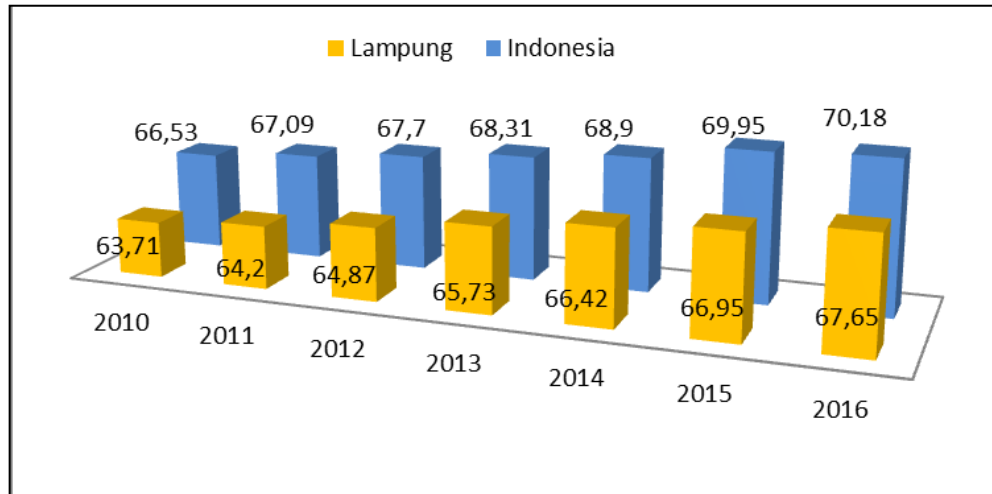
**Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia Se-Sumatera, 2012-2016**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mendongkrak angka IPM adalah dengan mengurangi tingkat kemiskinan, karena dengan berkurangnya kemiskinan akan memberikan nilai tambah untuk kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (komposit IPM). Dengan metode hitung baru, IPM Lampung tahun 2016 mencapai angka 68,26. Meski secara gradual mengalami peningkatan sejak tahun 2012 yang mencapai 64,87. Rata-rata peningkatan IPM Nasional 68,38 tidak berbeda jauh dengan rata-rata peningkatan IPM Provinsi Lampung sebesar 65,64 . Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, 2012-2016**



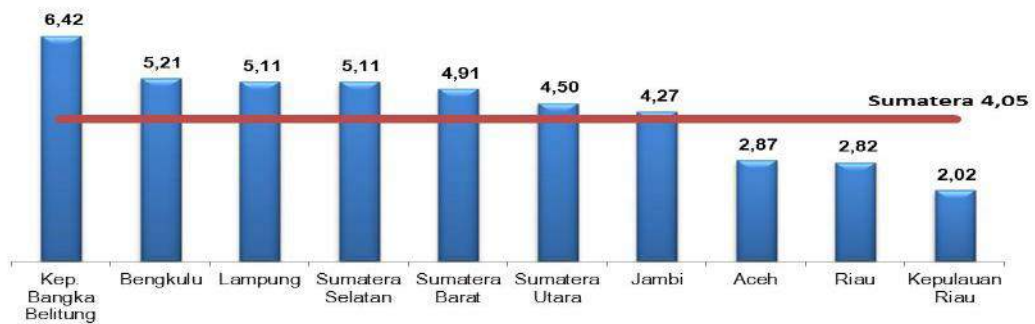
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

e. Perekonomian

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2017 terjadi di seluruh pulau. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pulau Sulawesi sebesar 6,87 persen, diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 5,66 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 4,92 persen. Struktur perekonomian triwulan I tahun 2017 secara spasial didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 58,49 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,95 persen dan pulau-pulau lainnya masing-masing kurang dari 10 persen.

Sementara itu PDRB se-Sumatera triwulan I-2017 mengalami pertumbuhan 4,05 persen dibandingkan triwulan I-2016. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,42 persen, Provinsi Bengkulu menduduki urutan kedua dengan pertumbuhan 5,21 persen, serta Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan menduduki urutan ketiga dengan pertumbuhan 5,11 persen. Sementara pertumbuhan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan sebesar 2,02 persen.

**Gambar 7 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Sumatera Triwulan-I 2017**

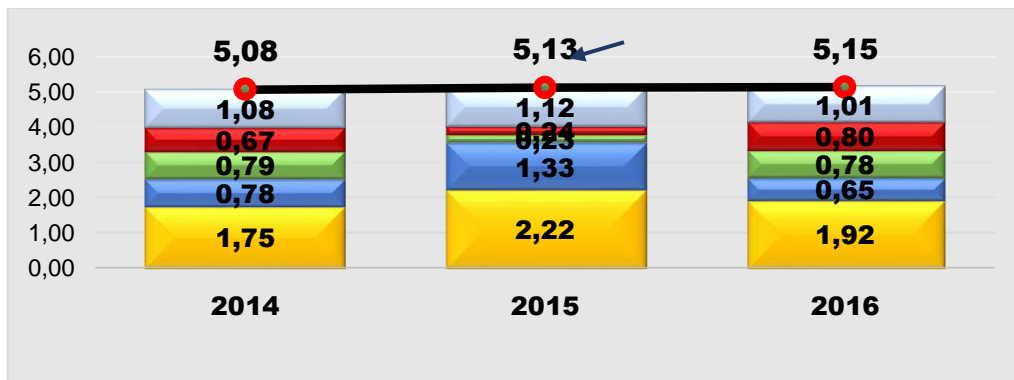


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Perekonomian Lampung tahun 2016 tumbuh sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,49 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,63 persen, serta Konstruksi sebesar 8,53 persen. Selain itu Jasa Keuangan pun tumbuh dengan laju 8,02 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2016, Pertanian menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 1,01 persen, diikuti Konstruksi serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Kendaraan Bermotor, masing-masing sebesar 0,80 persen dan 0,78 persen.

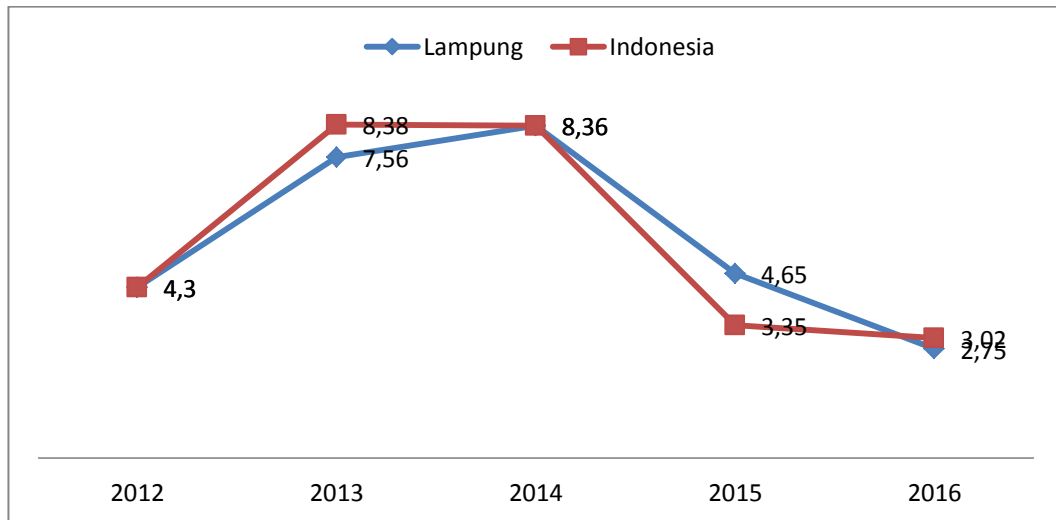
**Gambar 8 Laju Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Tahun 2017

Inflasi yang mencerminkan kestabilan ekonomi, kondisinya di Lampung selama ini cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi Indonesia. Sejak tahun 2012 inflasi Lampung selalu berada di atas Indonesia, namun pada tahun 2016 besar inflasinya berada dibawah rata-rata nasional nasional yaitu 2,75.

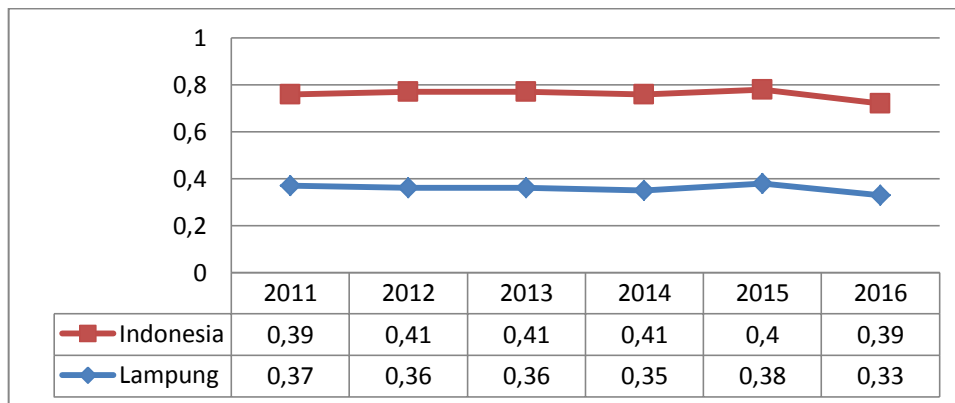
**Gambar 9 Perbandingan Tingkat Inflasi Lampung dan Nasional**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Dampak dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung secara teori mampu mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Lampung, akan tetapi pertumbuhan bukanlah jaminan penuntasan masalah kemiskinan. Menanggulangi dan menuntaskan kemiskinan di Provinsi Lampung bukanlah usaha yang mudah dan sederhana namun harus dilakukan dengan terkoordinir yang baik, paradigma pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung khususnya yang berkembang saat ini selalu mengacu pada pertumbuhan ekonomi, sehingga fokus pembangunan ekonomi nasional pun mengacu pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.

**Gambar 10 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Gini Ratio Nasional September 2016 yang sebesar 0,394, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2016 yang sebesar 0,397, turun sebesar 0,004 poin. Sedangkan Gini Ratio Lampung September 2016 yaitu sebesar 0,39, turun 0,1 poin dari tahun 2015 yang sebesar 0,40.

Salah satu ukuran yang sering digunakan adalah Gini Ratio yang nilainya berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Secara Nasional, nilai Gini Ratio Indonesia selama periode 2010-september 2014 fluktuasi dan mulai Maret 2015 hingga Maret 2017 nilainya menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015-Maret 2017 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Begitu pula Gini Ratio yang terjadi di Provinsi Lampung, terus mengalami penurunan dari Tahun 2012 sebesar 0,41 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0,39.

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 merupakan Karesidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Karesidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

24 Tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983.

Kabupaten yang memiliki jarak tempuh paling jauh ke Ibukota Provinsi berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat (241,42 Km/Jam), Pesisir Barat (231,00 Km/Jam), Way Kanan (206,32 Km/Jam) dan Mesuji (204,34 Km/Jam). Akses terhadap wilayah mempengaruhi kapasitas kontrol birokrasi dan petugas pemerintah terhadap pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan serta kontrol terhadap pelaksanaan program. Provinsi Lampung memiliki 13 kabupaten dan 2 kota yang terdiri atas 228 kecamatan dan 2.643 desa/kelurahan. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Nama Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, dan Jarak antara Ibukota Kabupaten/Kota dengan Ibukota Provinsi menurut Kabupaten/Kota, 2016**

Kabupaten/Kota	Nama Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak ke Ibukota Provinsi (km)
Lampung Barat	Liwa	15	136	241,42
Tanggamus	Kota Agung	20	302	80,78
Lampung Selatan	Kalianda	17	260	59,22
Lampung Timur	Sukadana	24	264	80,24
Lampung Tengah	Gunung Sugih	28	314	57,85
Lampung Utara	Kotabumi	23	247	115,19
Way Kanan	Blambangan Umpu	14	227	209,32
Tulang Bawang	Menggala	15	151	119,36
Pesawaran	Gedong Tataan	11	144	25,98
Pringsewu	Pringsewu	9	131	41,40
Mesuji	Mesuji	7	105	204,34
Tulang Bawang Barat	Panaragan	9	96	139,60
Pesisir Barat	Krui	11	118	231,00
Bandar Lampung	Bandar Lampung	20	126	0,00
Metro	Metro	5	22	51,81
<b>Jumlah</b>		<b>228</b>	<b>2.643</b>	

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Pemerintah Provinsi Lampung telah menentukan target, sasaran serta sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang dikoordinasikan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Agenda Nawa Cita, “***membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan***’, dan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, dan pencapaian visi Gubernur Lampung, ‘***Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019***’, Pemerintah Provinsi Lampung telah meluncurkan program percepatan pembangunan berbasis perdesaan yaitu **Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai** atau **Gerbang Desa Saburai** yang diarahkan untuk penguatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan, khususnya di desa tertinggal. Program tersebut merupakan suatu gerakan guna meningkatkan kerja sama dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan kesatuan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong rotong menuju provinsi itu maju dan sejahtera.

Gerbang Desa Saburai merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi kepada pemerintah desa serta sinergi program dan kegiatan lintas sektor dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa.

Program Gerbang Desa Saburai mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dengan *Pilot Project* sebanyak 30 desa dan pada Tahun 2016 diperluas menjadi 100 desa tertinggal yang ada di Provinsi Lampung dan pada tahun 2019 ditargetkan 380 desa tertinggal telah dilakukan intervensi.

## **2.2 Kondisi Kemiskinan Daerah**

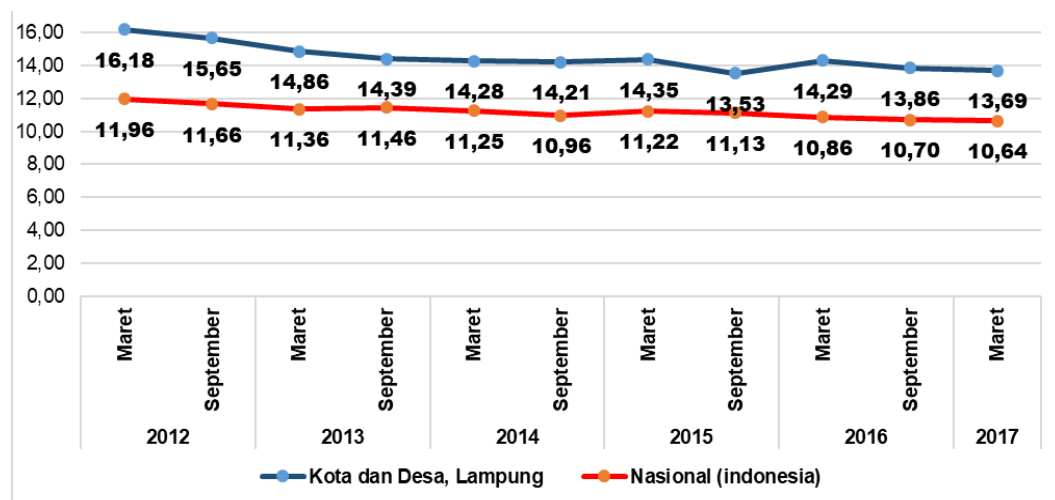
Data Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2016 diperoleh melalui 2 (dua) pendekatan :



## 1. Makro ( Hasil Survey BPS, Data Tingkat Kemiskinan).

Angka kemiskinan Provinsi Lampung mengalami penurunan pada September 2016. Berdasarkan hasil survei terbaru diketahui angka kemiskinan Lampung sebesar 13,86 persen atau 1.139,78 ribu jiwa. Data Maret 2016 angka kemiskinan Provinsi Lampung masih 14,29 persen atau 1.169,60 ribu jiwa. Dengan kata lain selama periode Maret 2016 – September 2016 telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 29,82 ribu jiwa. Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung ini juga sejalan dengan yang terjadi pada tingkat nasional namun penurunan angka kemiskinan Provinsi Lampung lebih cepat. Dengan demikian, gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung menjadi semakin sempit.

**Gambar 11 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional sampai Tahun 2017**

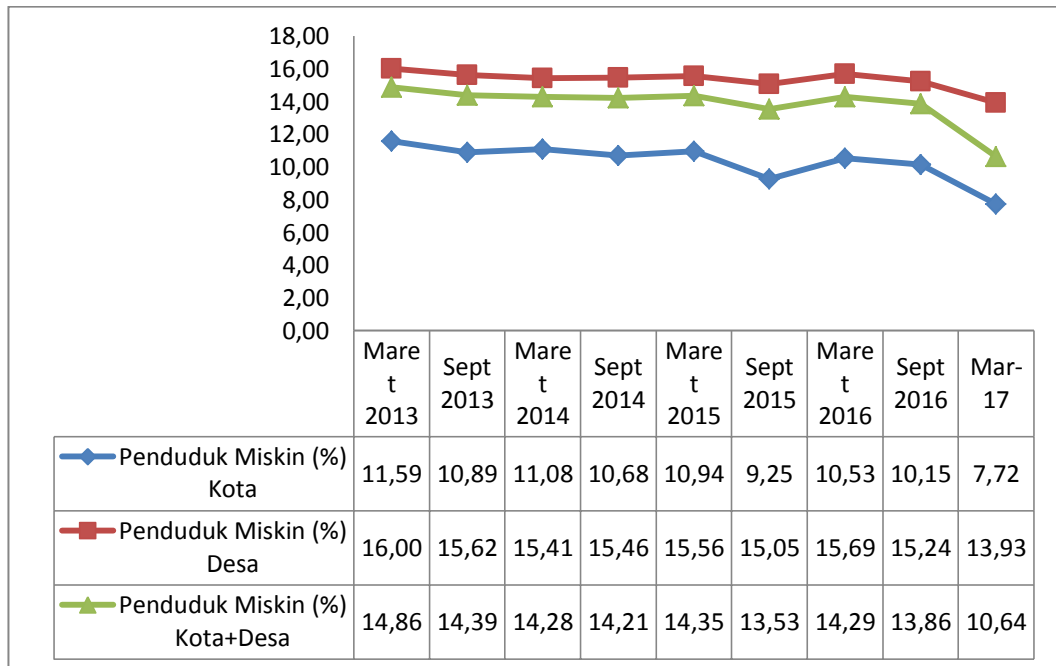


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,24 persen. Cukup jauh terpaut dengan kemiskinan di perkotaan yang 10,15 persen. Dari sisi jumlah penduduk miskin juga terdapat perbedaan yang signifikan yakni 227,44 ribu jiwa di perkotaan dan 912,34 ribu jiwa di daerah perdesaan.

Laju penurunan tingkat kemiskinan selama periode September 2016-Maret 2017, lebih signifikan terjadi di daerah urban (perkotaan) yang turun 1,25 persen, sedangkan di daerah rural (perdesaan) turun 1,06 persen.

**Gambar 12 Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2013 s.d Maret 2017**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Berdasarkan data di atas nampak bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi, walaupun sudah mengalami penurunan dari Maret sampai dengan tahun 2017. Penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dinilai sangat menghambat kinerja ekonomi suatu daerah sedangkan bila kinerja ekonomi mengalami tren yang positif, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan indikasi berkurangnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini bisa ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi pendidikan, angkatan kerja, kesehatan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung perlu diketahui faktor-faktor yang berhubungan atau mempengaruhi tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di masing-masing Kabupaten/Kota sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang

efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

**Tabel 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah, 2012-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2012 (Maret)	241,1	1 023,39	1 264,48	12	17,63	16,18
2012 (Sept)	240,11	990,05	1 230,16	11,88	16,96	15,65
2013 (Maret)	235,47	939,88	1 175,35	11,59	15,99	14,86
2013 (Sept)	224,81	919,95	1 144,76	10,89	15,62	14,39
2014 (Maret)	230,63	912,28	1 142,92	11,08	15,41	14,28
2014 (Sept)	224,21	919,73	1 143, 93	10,68	15,46	14,21
2015 (Maret)	233,27	930,22	1 163, 49	10,94	15,56	14,35
2015 (Sept)	197,94	902,74	1 100,68	9,25	15,05	13,53
2016 (Maret)	233,39	936,21	1 169,60	10,53	15,69	14,29
2016 (Sept)	227,44	912,34	1 139,78	10,15	15,24	13,86
2017 (Maret)	228,32	903,41	1 131,73	10,03	15,08	13,69

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Penurunan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2016 – September 2016, lebih tinggi terjadi di daerah urban (perkotaan) yang turun 3,55 persen (5,95 ribu jiwa), sedangkan di daerah rural (perdesaan) turun 2,88 persen (23,87 ribu jiwa).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

**Tabel 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Lampung Menurut Daerah, Sept. 2016-Maret 2017**

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
-1	-2	-3	-4
<b><u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</u></b>			
September 2016	1,29	2,	1,92
Maret 2017	1,553	2,	2,16
<b><u>Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)</u></b>			
September 2016	0,268	0,	0,41
Maret 2017	0,346	0,	0,50

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Pada periode Maret 2016 - September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 2,628 menjadi 1,924. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat mendekati garis kemiskinan. Demikian pula dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) turun dari 0,704 menjadi 0,411. Angka ini mengindikasikan bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin rendah.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Pada September 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,290 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,161. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,268 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,464. Dapat dimaknai bahwa kesenjangan penduduk miskin perdesaan lebih tinggi dibanding penduduk miskin perkotaan demikian pula dengan ketimpangan penduduk miskin perdesaan juga lebih tinggi dibanding penduduk perkotaan.

**Tabel 8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2015-2016**

Nama Kab/Kota	2015			2016		
	P0	P1	P2	P0	P1	P2
Lampung Barat	14.18	2.37	0.56	15.06	2.89	0.78
Tanggamus	14.26	1.98	0.46	14.05	2.01	0.43
Lampung Selatan	16.27	2.66	0.71	16.16	2.64	0.64
Lampung Timur	16.91	2.51	0.63	16.98	3.10	0.86
Lampung Tengah	13.30	2.41	0.59	13.28	2.15	0.58
Lampung Utara	23.20	4.08	1.14	22.92	4.68	1.37
Way Kanan	14.61	2.18	0.49	14.58	2.69	0.70
Tulangbawang	10.25	1.84	0.51	10.20	2	0.59
Pesawaran	17.61	3.12	0.75	17.31	2.77	0.74
Pringsewu	11.80	1.40	0.25	11.73	1.78	0.42
Mesuji	8.20	1.04	0.24	8	1.39	0.37
Tulang Bawang Barat	8.23	1.48	0.36	8.40	1.20	0.26
Pesisir Barat	15.81	2.52	0.64	15.91	2.76	0.72
Kota Bandar Lampung	10.33	1.26	0.24	10.15	1.65	0.47
Kota Metro	10.29	1.54	0.37	5.22	1.81	0.54

*Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017*

Jika dilihat dari tabel tersebut di atas maka persentase penduduk miskin yang paling tinggi Tahun 2016 adalah di Kabupaten Lampung Utara yaitu sebesar 22,92%, hal ini kemungkinan besar dikarenakan penduduk miskin di daerah pedesaan yang belum dapat sepenuhnya mandiri dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sedangkan presentase penduduk miskin terendah terdapat di Kota Metro pada tahun 2016 sebesar 5.22 % karena program pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan yang ada di Kota Metro sudah berjalan dan berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan mengenai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode 2015-2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan dari 2,36 di tahun 2015 menjadi 2,63 di tahun 2016. Ini artinya bahwa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam usaha mengurangi kemiskinan cukup berhasil, walaupun secara nominal penduduk miskin masih berada di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan nilai P1 terbesar di Provinsi Lampung pada tahun 2016 dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 4.68, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang terkecil di tahun 2016 adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 1.20.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara umum Indeks Keparahan Kemiskinan di Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan angka 0,59 menjadi 0,70 di tahun 2016. Kabupaten Lampung Utara memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan terbesar di Provinsi Lampung yaitu sebesar 1,37 di tahun 2016. Indeks keparahan terkecil dialami oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan indeks 0,26 di tahun 2016.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan secara keseluruhan bergerak naik, yang mengindikasikan adanya peningkatan yang positif mengenai kemiskinan di Provinsi Lampung.

INDIKATOR	TARGET RPJMD (2016)	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	STATUS
% Penduduk Miskin	12,93%	10,64%	13,69%	▼
P1	1,90	1,74	1,92	▼
P2	0,44	0,44	0,41	●

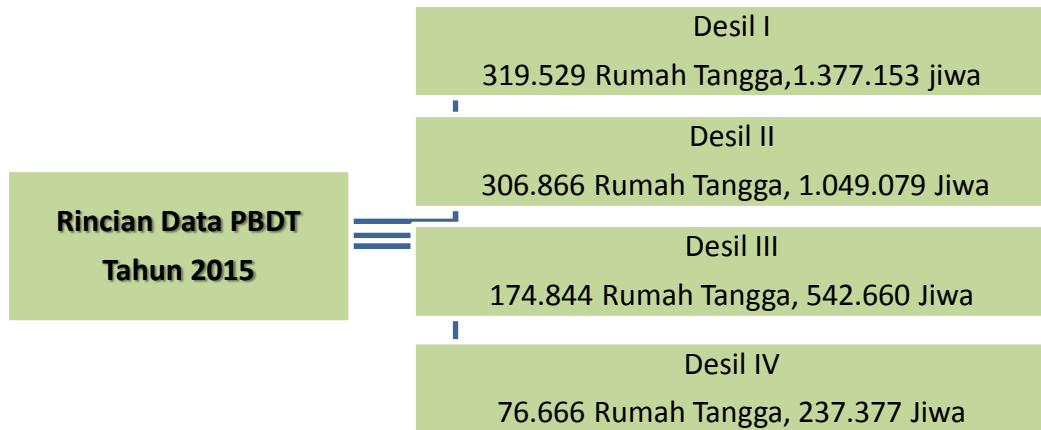
● = tercapai ▼ = sulit tercapai pada tahun 2016 (tidak tercapai)

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung sebesar 13,69%, belum memenuhi target RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 12,93% dan masih lebih tinggi dari capaian nasional Tahun 2016 yaitu sebesar 10,64 %. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 1,92, belum memenuhi target RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 1,90 dan masih jauh di atas rata-rata Nasional Tahun 2016 yaitu sebesar 1,74. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 0,41, sudah melebihi target capaian Nasional Tahun 2016 dan Target RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2016 yaitu sebesar 0,44.

## 2. Mikro (Hasil PBDT 2015, Data Tingkat Kesejahteraan).

Pendekatan Mikro diperoleh berdasarkan hasil updating data Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang memuat data individu dan rumah tangga dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 13 Rincian Data BDT Tahun 2015**



**Keterangan:**

<b>Desil 1</b>	<b>(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)</b>
<b>Desil 2</b>	<b>(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)</b>
<b>Desil 3</b>	<b>(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)</b>
<b>Desil 4</b>	<b>(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40% terendah di Indonesia)</b>

*Sumber : TNP2K, Tahun 2015*



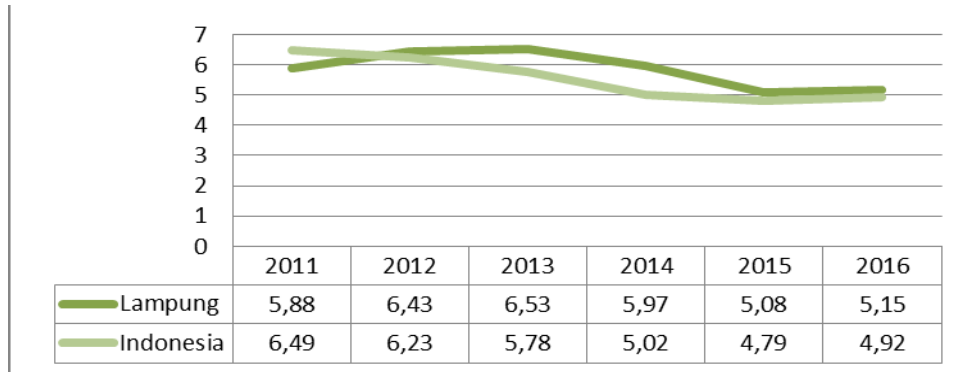
**Tabel 9 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Lampung Tahun  
2015**

KAB/KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN				TOTAL
	Desil I	Desil II	Desil III	Desil IV	
Lampung Selatan	38.225	38.699	32.700	22.587	132.211
Lampung Tengah	48.965	42.492	27.055	4.398	122.910
Lampung Timur	37.652	41.720	19.708	10.059	109.139
Bandar Lampung	37.564	29.612	9.991	3.482	80.649
Lampung Utara	36.649	26.126	7.010	3.677	73.462
Tanggamus	27.990	26.101	6.670	5.357	66.118
Pesawaran	21.777	22.625	14.808	2.258	61.468
Way Kanan	7.771	13.634	18.863	6.778	47.046
Tulang Bawang	7.188	11.580	15.279	7.811	41.858
Pringsewu	16.068	14.377	3.520	2.530	36.495
Lampung Barat	12.821	13.323	6.070	1.252	33.466
Tulang Bawang Barat	6.967	8.911	4.355	2.513	22.746
Mesuji	8.986	8.806	3.529	904	22.225
Pesisir Barat	9.361	6.877	2.770	629	19.637
<b>Metro</b>	<b>1.545</b>	<b>2.003</b>	<b>2.536</b>	<b>2.431</b>	<b>8.515</b>
<b>LAMPUNG</b>	<b>319.529</b>	<b>306.886</b>	<b>174.864</b>	<b>76.666</b>	<b>877.945</b>

Sumber : TNP2K, Tahun 2015

## 2.2.1 Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

**Gambar 14 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2011-2016**

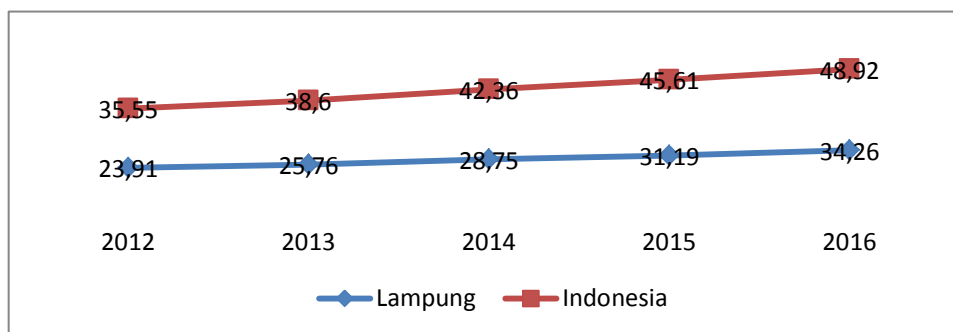


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 mengalami fluktuasi. Akan tetapi pada dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu tumbuh sebesar 0,07 persen dari 5,08 menjadi 5,15. Dan sejak tahun 2012 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata Nasional.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha seperti pengadaan listrik dan gas yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,49 persen, diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 10,63 persen, serta konstruksi sebesar 8,53 persen. Selain itu jasa keuangan pun tumbuh dengan laju 8,02 persen.

**Gambar 15 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Lampung dan Indonesia**

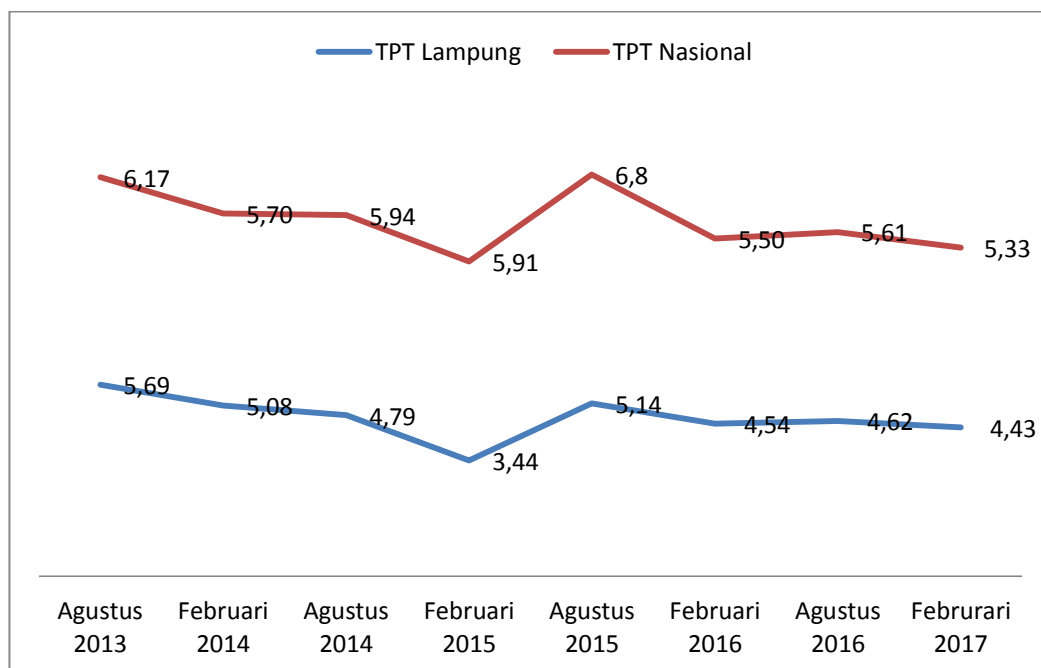


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Perekonomian Lampung tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 281,11 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 34,26 juta. Masih berada jauh dari capaian PDRB Nasional yaitu sebesar 48,92.

### ***Tingkat Pengangguran Terbuka***

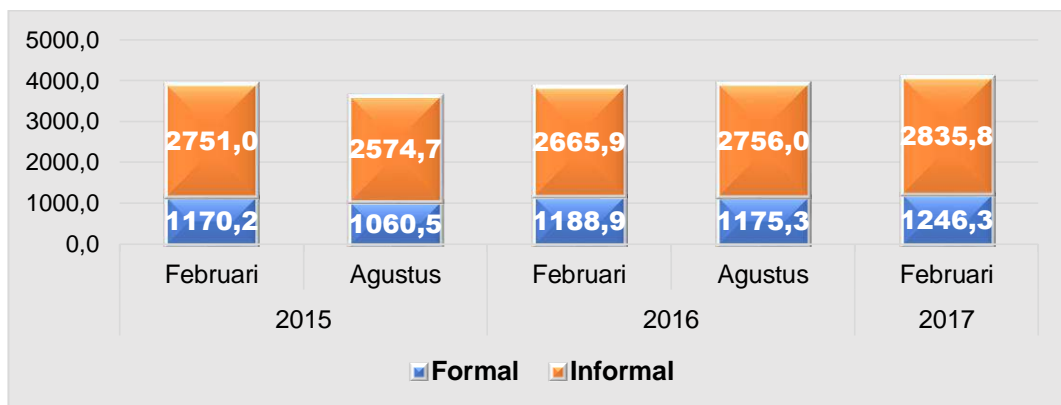
**Gambar 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2013-2017**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pendekatan pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya sebagian besar termasuk pekerja informal. Berdasarkan pendekatan identifikasi ini, maka pada Februari 2017 sekitar 1.246,3 ribu pekerja (30,53 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 2.835,8 ribu pekerja (69,47 persen) bekerja pada kegiatan informal.

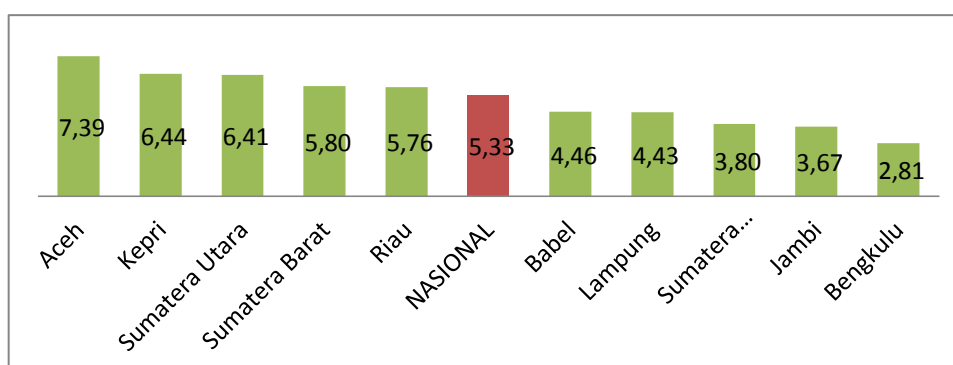
**Gambar 17 Perkembangan Penduduk yang bekerja menurut kegiatan Ekonomi Formal/Informal di Provinsi Lampung**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Tahun 2017

Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Sumatera relatif bervariasi. Lima provinsi memiliki tingkat pengangguran di atas angka nasional, sementara lima provinsi lainnya termasuk Lampung memiliki tingkat pengangguran di bawah angka nasional (5,33 persen). TPT tertinggi dialami Aceh yakni sekitar 7,39 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah sekitar 2,81 persen terjadi di Bengkulu. TPT Lampung merupakan TPT terendah keempat di Pulau Sumatera.

**Gambar 18 Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Dilihat perbandingan kota-desa, tingkat pengangguran lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan (*urban area*). Sebanyak 6,49 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja),

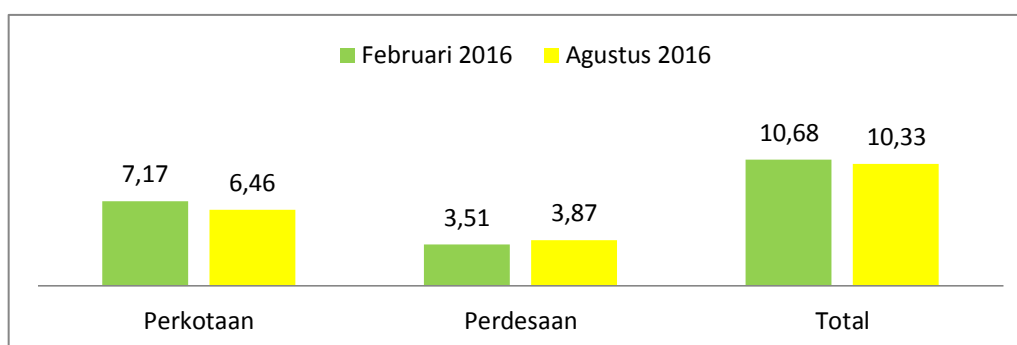
setara dengan 78,7 ribu orang. Sedangkan di wilayah perdesaan (*rural area*) tingkat pengangguran “hanya” 3,61 persen atau 110,4 ribu orang. Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah pengangguran di perkotaan berkurang sebanyak 3,1 ribu orang. Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran di perdesaan naik 8,6 ribu orang. Fenomena ini diduga berkaitan dengan menurunnya aktivitas sektor pertanian yang mendominasi kegiatan ekonomi di desa.

**Tabel 10 Pengangguran Terbuka menurut Daerah di Provinsi Lampung**

Daerah Tempat Tinggal	Februari 2016		Agustus 2016		Februari 2017	
	Absolut (000)	TPT (%)	Absolut (000)	TPT (%)	Absolut (000)	TPT (%)
Perkotaan	81,8	7,17	76,5	6,46	78,7	6,49
Perdesaan	101,7	3,51	113,8	3,87	110,4	3,61
Total	183,5	4,54	190,3	4,62	189,1	4,43

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

**Gambar 19 Pengangguran Terbuka menurut Daerah di Provinsi Lampung, 2016**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Disparitas gender pada partisipasi angkatan kerja sangat timpang. TPAK laki-laki sebesar 87,46 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 54,97 persen. Kondisi ini berkaitan dengan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga.

Laki-laki berperan sebagai pencari nafkah (*breadwinner*), sedangkan perempuan mengelola rumahtangga dan mengasuh anak-anaknya. Dibandingkan keadaan Februari 2016, partisipasi laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja mengalami kenaikan masing-masing 1,3 poin dan 4,81 poin. Sementara itu, disparitas jender pada pengangguran direpresentasikan oleh TPT perempuan yang lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yakni 5,63 persen berbanding 3,71 persen. TPT yang tinggi pada perempuan mengindikasikan adanya potensi yang tinggi pada partisipasi kerja perempuan.

Berdasarkan data perkembangan antar waktu di atas menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka ternyata cukup efektif. Hal ini dibuktikan adanya penurunan di setiap tahun baik angka kemiskinan maupun tingkat pengangguran terbuka.

Untuk Provinsi Lampung hal yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana mengurangi tingkat pengangguran terbuka, karena dibandingkan dengan Provinsi yang lain, Provinsi Lampung masih paling tinggi. Jadi Program dan kegiatan diprioritaskan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

INDIKATOR	TARGET RPJMD (2016)	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	STATUS
% Pertumbuhan Ekonomi	6,35-6,50	4,92	5,15	▼
Indeks Gini	0,33	0,394	0,36	●
PDRB	32,82	48,92	34,26	●
% TPAK	65,91	66,34	69,61	●
% TPT	5,01	5,61	4,43	▼

● = tercapai ▼ = sulit tercapai pada tahun 2016 (tidak tercapai)

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 5,15%, lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 4,92 %, ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dari Target mengalami peningkatan, sudah mencapai

RPJMD Tahun 2016 yaitu sebesar 6,35-6,50 %. Untuk Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 0,36 sudah melampaui Target RPJMD Tahun 2016 sebesar 0,33 dan tidak berada jauh dari capaian nasional 0,394.

Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 281,11 triliun dan PDRB perkapita mencapai 34,26. Sudah melampaui Target RPJMD Tahun 2016 yaitu sebesar 32,82, akan tetapi masih jauh dari capaian Nasional yaitu sebesar 48,92.

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 69,61%, tidak berbeda jauh dari TPAK capaian Nasional sebesar 66,34% dan TPAK Target RPJMD Tahun 2016 sebesar 65,91%. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar 4,43%, sudah mendekati Target RPJMD Tahun 2016 yaitu sebesar 5,01 dan selisih 1,18 poin dari TPT capaian Nasional yaitu sebesar 5,61%.

### **2.2.2 Dimensi Pendidikan**

Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan. Pembangunan bidang pendidikan juga merupakan salah satu faktor penunjang dalam pengentasan kemiskinan. Pentingnya peranan pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga hampir 23,03% APBD Provinsi diperuntukkan pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan indikator pembangunan pendidikan yang digambarkan di atas, terlihat bahwa program kegiatan yang telah dilaksanakan membawa hasil yang cukup efektif dalam peningkatan bidang pendidikan masyarakat di Provinsi Lampung.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Provinsi Lampung untuk

dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masalah utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Provinsi Lampung adalah biaya/ekonomi masyarakat yang rendah, akses antara lokasi rumah dan sekolah terlalu jauh, dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan formal masih rendah. Hal yang perlu di prioritaskan untuk diintervensi adalah menurunkan lagi anak-anak yang putus sekolah khususnya untuk jenjang SMA/MA/SMK.

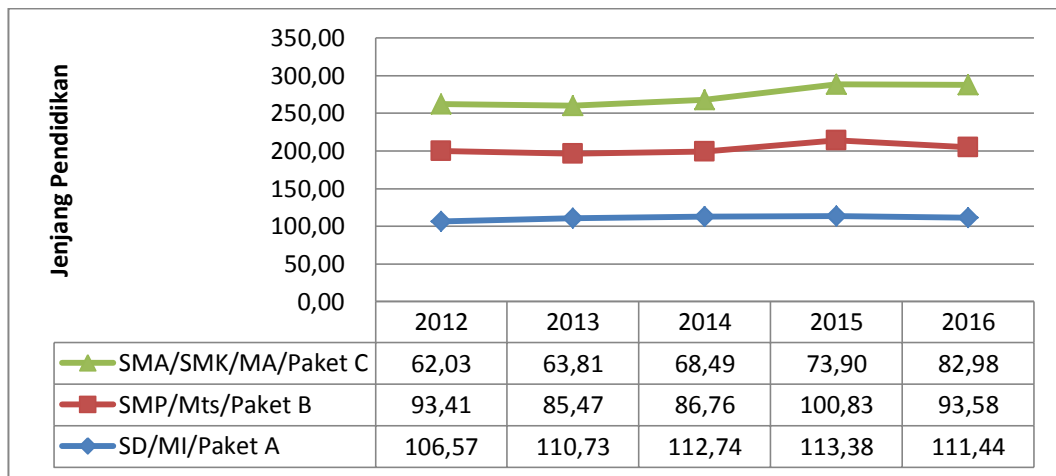
### ***Angka Partisipasi Kasar***

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK mencerminkan partisipasi dan akses penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sebagai contoh terdapat anak-anak di bawah usia 6 tahun tetapi sudah bersekolah di tingkat SD atau anak usia 13 tahun masih bersekolah di SD.



**Gambar 20 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan, 2012-2016**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan perkembangan capaian kinerja yang meningkat selama 5 tahun terakhir. Capaian kinerja APK SD/MI/Paket A sempat mengalami fluktuasi nilai, dimana dengan tahun dasar 2012 yaitu 106,57%; tahun 2015 naik menjadi 113,38% dan pada akhir tahun 2016 turun menjadi sebesar 111,44%. Artinya selama 4 tahun tersebut APK jenjang SD/MI masih menunjukkan perkembangan kinerja yang baik walau pada akhirnya mengalami penurunan pada Tahun 2016.

Perkembangan turun naik capaian APK terjadi pada jenjang SMP/MTs, dimana pada tahun dasar 2012 mengalami penurunan dari 93,41% menjadi 85,47% pada tahun 2013, pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari 86,76% menjadi 100,83% pada tahun 2015. Capaian kinerja APK ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mencapai tingkatan tuntas madya apabila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung sebesar 93,58%.

Untuk capaian APK jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA/MA/SMK dan Sederajat menunjukkan trend perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 sebesar 62,03% meningkat terus menjadi 73,90% pada tahun 2015, dan tahun 2016 sebesar 82,98%. Hal ini menunjukkan

bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengembangan pendidik menengah juga semakin baik.

**Tabel 11 APK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2016**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laki-Laki +Perempuan / <i>Male + Female</i>			
	Jenjang Pendidikan / <i>Educational Level</i>			
	SD / <i>Primary School</i>	SMP / <i>Junior High School</i>	SMA / <i>Senior High School</i>	PT / <i>University</i>
-1	-2	-3	-4	-5
Lampung Barat	114.42	94.40	84.63	1.60
Tanggamus	111.87	105.40	75.80	6.43
Lampung Selatan	109.60	89.13	80.60	10.29
Lampung Timur	104.32	101.36	78.43	6.07
Lampung Tengah	114.57	91.36	69.81	13.38
Lampung Utara	114.87	89.97	90.44	7.41
Way Kanan	110.71	92.66	93.99	6.22
Tulang Bawang	115.87	93.58	70.14	5.10
Pesawaran	111.74	87.42	112.41	6.53
Pringsewu	112.22	95.24	83.48	11.78
Mesuji	106.94	101.35	61.52	2.12
Tulang Bawang Barat	111.69	109.42	84.17	3.59
Pesisir Barat	109.38	94.01	85.35	7.49
Bandar Lampung	113.85	85.41	97.38	42.59
Metro	106.58	101.78	103.83	14.20
<b>Lampung</b>	<b>111.44</b>	<b>93.58</b>	<b>82.98</b>	<b>13.52</b>

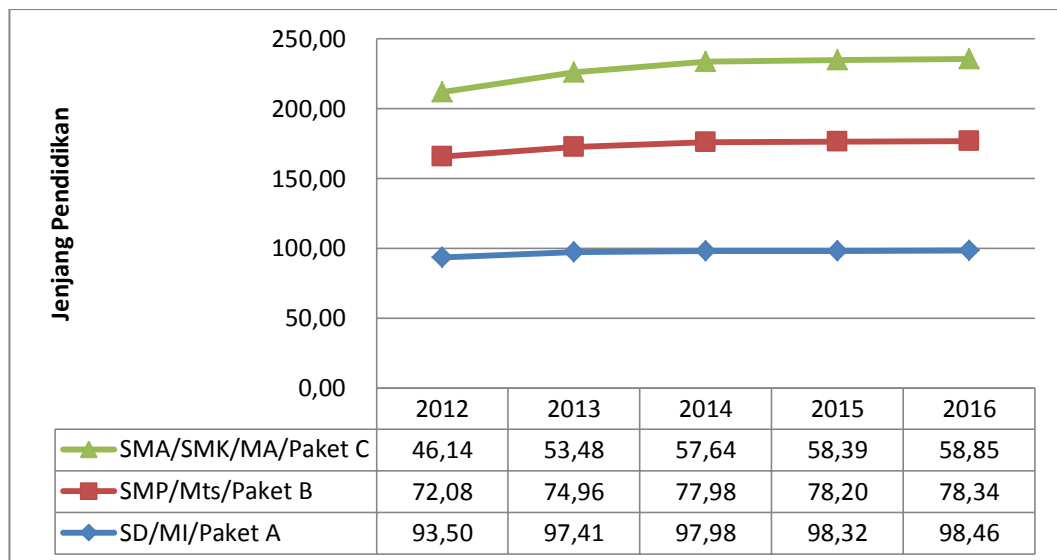
*Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2017*

Kondisi APK SD, SMP dan SMA/MA di Provinsi Lampung pada tahun 2016 berturut-turut sebesar 111,44, 93,58 dan 82,98. APK SD terendah berada di Kabupaten Lampung Timur, APK SMP terendah berada di Kota Bandar Lampung dan APK SMA/MA terendah berada di Kabupaten Mesuji. Untuk APK SD tertinggi ada di Kabupaten Tulang Bawang, APK SMP tertinggi ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk APK SMA/MA tertinggi berada di Kabupaten Pesawaran.

### Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM untuk mengukur anak yang bersekolah tepat pada waktu dengan kata lain APM dapat menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

**Gambar 21 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan, 2012-2016**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Demikian pula capaian kinerja pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan bahwa perkembangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya nilai APM pada semua jenjang pendidikan tersebut karena komitmen pemerintah terhadap pendidikan dasar dan menengah sangat baik. Indikator terakhir yang digunakan adalah tingkat kelulusan dan dalam waktu 3 tahun terakhir, bahwa hampir seluruh jenjang pendidikan telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sehingga mampu mencapai tingkat kelulusan sebesar 100%.

Nilai APM selalu lebih rendah dibanding nilai APK, hal ini disebabkan oleh murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, lulus lebih awal (kelas akselerasi), menunda/mempercepat saat mulai sekolah. Keterbatasan APM adalah tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5-6 tahun, lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD/ sederajat, selain itu referensi tanggal masuk ke pendidikan dasar tidak bertepatan dengan tanggal lahir dari semua kelompok yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni juga mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD penduduk usia 7-12 tahun mencapai 98,46%, APM pada jenjang pendidikan SMP 78,34% dan APM pada jenjang pendidikan SMA 58,85%.

APM perempuan lebih tinggi dari APM laki-laki pada setiap jenjang pendidikan. Dilihat dari angka putus sekolahnya di Provinsi Lampung yang diolah BPS 2017, menunjukkan potensi angka putus sekolah lebih besar pada wanita di jenjang pendidikan rendah yaitu SD dan sebaliknya potensi putus sekolah lebih besar pria pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi potensi putus sekolahnya.

**Tabel 12 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan  
Kabupaten/Kota, 2016**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laki-Laki + Perempuan / <i>Male + Female</i>			
	Jenjang Pendidikan / <i>Educational Level</i>			
	SD / <i>Primary School</i>	SMP / <i>Junior High School</i>	SMA / <i>Senior High School</i>	PT / <i>University</i>
-1	-2	-3	-4	-5
Lampung Barat	100.00	74.19	64.86	0.94
Tanggamus	99.04	80.40	55.57	5.61
Lampung Selatan	98.13	76.42	48.44	6.83
Lampung Timur	95.35	84.23	61.96	4.21
Lampung Tengah	94.24	74.06	54.87	7.47
Lampung Utara	100.00	77.88	61.04	3.03
Way Kanan	99.31	78.78	62.68	3.96
Tulang Bawang	99.76	79.11	48.40	4.91
Pesawaran	99.32	77.88	66.26	6.53
Pringsewu	99.20	81.51	62.92	8.76
Mesuji	99.69	80.74	50.84	1.46
Tulang Bawang Barat	99.12	87.16	57.44	2.15
Pesisir Barat	97.66	84.44	69.12	7.49
Bandar Lampung	96.76	73.08	64.66	29.71
Metro	100.00	94.29	82.65	9.52
<b>Lampung</b>	<b>98.46</b>	<b>78.34</b>	<b>58.85</b>	<b>9.22</b>

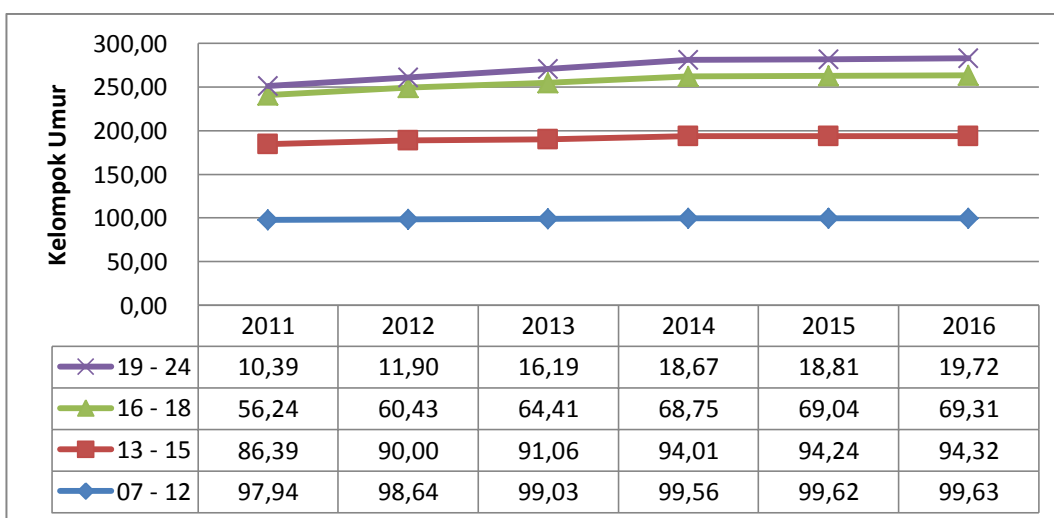
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Tahun 2017

Kondisi APM SD, SMP dan SMA/MA di Provinsi Lampung pada tahun 2016 berturut-turut sebesar 98,46, 78,34 dan 58,85. APM SD terendah berada di Kabupaten Lampung Timur, APM SMP terendah berada di Kota Bandar Lampung dan APM SMA/MA terendah berada di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk APM SD tertinggi ada di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara dan Kota Metro, APM SMP tertinggi ada di Kota Metro dan untuk APM SMA/MA tertinggi berada di Kabupaten Tulang Bawang.

### **Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang masih sekolah, terhadap seluruh penduduk pada kelompok umur usia yang sama. Kelompok umur yang dipakai untuk melihat angka partisipasi sekolah adalah kelompok umur yang ditujukan untuk program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dan kelompok umur pada jenjang pendidikan menengah 16-18 tahun. Pada gambar berikut disajikan APS menurut usia sekolah.

**Gambar 22 Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun sudah menunjukkan persentase yang menggembirakan, yaitu sebesar 99,63 persen di tahun 2016 dengan tren yang fluktuatif sejak tahun 2011. Pada usia 13-15 tahun APS sebesar 94,32 persen, sedangkan APS usia 16-18 tahun hanya sebesar 69,31 persen. Angka partisipasi sekolah yang menurun seiring dengan kenaikan usia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan angka IPM. Penurunan ini mungkin dipengaruhi

minimnya ketersediaan sarana pendidikan atau karena kondisi ekonomi rumah tangga yang masih kekurangan sehingga masih cukup banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada periode 2011-2016, APS Provinsi Lampung meningkat setiap tahunnya pada setiap kelompok usia sekolah. Perkembangan APS untuk usia sekolah 7-12 tahun tidak mengalami peningkatan yang berarti karena tidak mencapai 1 persen. Namun kelompok usia ini bukanlah target utama untuk ditingkatkan angka partisipasi sekolahnya karena sudah hampir 100 persen anak sudah bersekolah. Perkembangan APS yang paling tinggi ada pada kelompok usia 16-18 tahun yang bertambah sekitar 0,3 persen tiap tahunnya. Akan tetapi, masih perlu ditingkatkan lagi karena APS pada kelompok usia ini baru mencapai 69,31 persen pada tahun 2016.

**Tabel 13 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kabupaten/Kota, 2016**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laki-Laki + Perempuan / <i>Male + Female</i>			
	Kelompok Umur / <i>Age Group</i>			
	07-Des	13-15	16-18	19-24
-1	-2	-3	-4	-5
Lampung Barat	100.00	93.05	76.80	13.51
Tanggamus	99.04	90.20	76.48	19.34
Lampung Selatan	99.51	92.36	58.74	16.34
Lampung Timur	98.49	93.73	65.18	13.56
Lampung Tengah	99.60	95.94	64.89	15.13
Lampung Utara	100.00	93.81	71.30	17.40
Way Kanan	100.00	95.29	69.29	22.26
Tulang Bawang	100.00	94.37	61.06	13.90
Pesawaran	100.00	98.07	73.74	20.57
Pringsewu	100.00	96.61	71.32	21.91
Mesuji	100.00	88.78	64.79	12.56
Tulang Bawang Barat	100.00	94.05	73.95	17.02
Pesisir Barat	100.00	87.81	71.87	16.30
Bandar Lampung	100.00	96.53	79.50	36.06
Metro	100.00	95.58	87.66	24.66
<b>Lampung</b>	<b>99.63</b>	<b>94.32</b>	<b>69.31</b>	<b>1972.00</b>

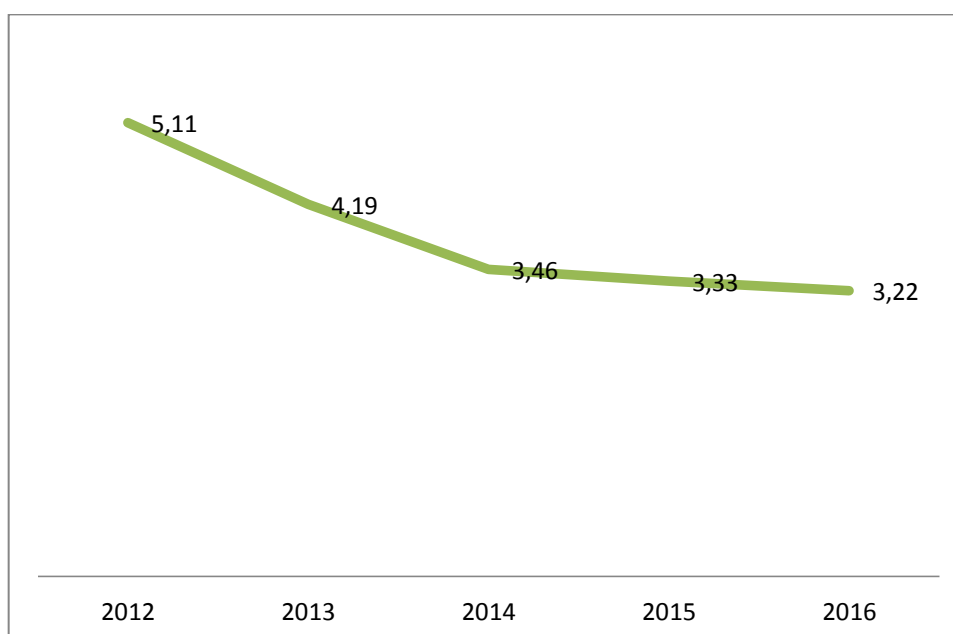
Sumber : BPS Provinsi Lampung, Tahun 2017

Angka putus sekolah usia 7–12 tahun di Provinsi Lampung terendah pada Kabupaten Tanggamus sebesar 99,04. Angka ini tergolong baik karena berada di bawah angka putus sekolah usia 7–12 tahun di tingkat Provinsi sebesar 99,63. Angka putus sekolah usia 13–15 tahun terendah pada Kabupaten Pesisir Barat sebesar 87,81 jauh di bawah provinsi sebesar 94,32, dan untuk angka putus sekolah usia 16-18 tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih ada yang di bawah angka rata-rata yaitu ada 6 (enam) kabupaten/kota yang harus mendapat perhatian lebih dalam rangka mengurangi angka putus sekolah di Provinsi Lampung.

### ***Angka Buta Huruf 15+***

Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Gambar grafik di bawah ini menunjukkan bahwa posisi Angka Buta Huruf penduduk berusia 15–24 tahun dari tahun 2012 ke tahun 2016 bergerak menurun, dan terus membaik dari 5,11 persen di tahun 2012 menjadi 3,22 persen pada tahun 2016.

**Gambar 23 Persentase Penduduk Buta Huruf 15+, 2012–2016**

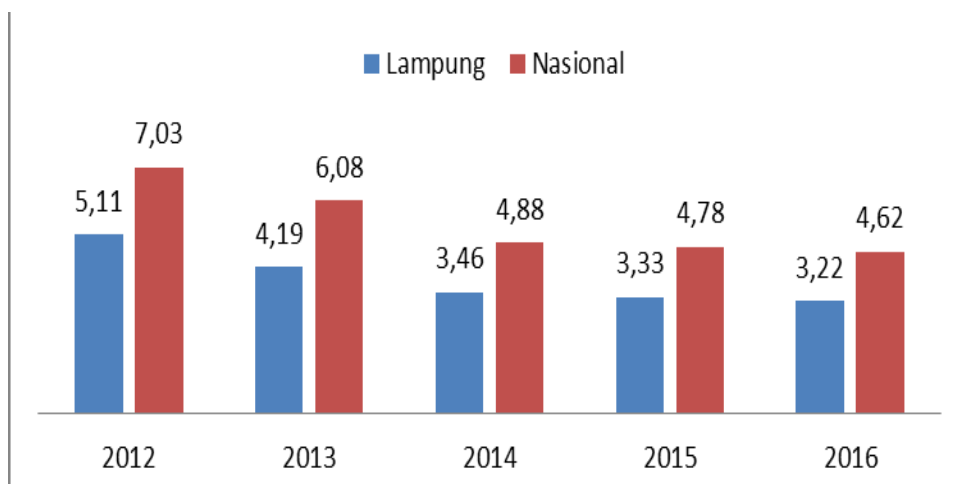


*Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2017*



Jika dilihat dari perbandingan Angka Buta Huruf antara Provinsi dan Nasional untuk penduduk usia 15 tahun ke atas, gambar grafik di bawah ini menunjukkan bahwa posisi Angka Buta Huruf penduduk berusia 15+ Nasional masih berada jauh di atas Provinsi Lampung yang mana pada Tahun 2016 Provinsi Lampung berada pada posisi 3,22 persen sedangkan Nasional berada pada 4,62 persen. Membandingkan persentase Angka Buta Huruf Provinsi dengan Nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir (periode 2014-2015) juga mengindikasikan Angka Buta Huruf Provinsi masih lebih baik (lihat Gambar di bawah) namun kondisi-kondisi ini tetap mengindikasikan bahwa target MDGs untuk Angka Buta Huruf di Provinsi Lampung tidak tercapai.

**Gambar 24 Angka Buta Huruf Umur 15+ Tahun Provinsi Lampung dan Nasional, Tahun 2012-2016**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Gambar di bawah menunjukkan bahwa di tingkat kabupaten dan kota Angka Melek Huruf (AMH) tertinggi ada di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 99,32 sedangkan untuk Angka Melek Huruf (AMH) terendah ada di Kabupaten Mesuji. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 14 Angka Melek Huruf 10+Kabupaten Kota, 2016**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
Lampung Barat	98,97	97,92	98,48
Tanggamus	97,59	94,88	96,30
Lampung Selatan	98,24	95,28	96,80
Lampung Timur	97,39	94,20	95,83
Lampung Tengah	97,73	95,74	96,75
Lampung Utara	98,62	96,34	97,50
Way Kanan	98,52	95,64	97,15
Tulang Bawang	98,26	96,73	97,53
Pesawaran	98,50	94,44	96,55
Pringsewu	98,43	96,56	97,52
Mesuji	97,22	94,12	95,75
Tulang Bawang Barat	96,74	93,60	95,21
Pesisir Barat	99,42	97,49	98,51
Bandar Lampung	99,66	98,98	99,32
Metro	98,97	97,39	98,17
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>98,23</b>	<b>95,93</b>	<b>97,11</b>

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

INDIKATOR	TARGET 2016 (RPJMD)	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	STATUS
% AMH	98%	-	96,67	▼
APK SD/MI	112,08	109,31	111,44	▼
APK SMP/MTs	97,62	90,12	93,58	▼
APK SMA/SMK/MA	78	80,89	82,98	●
APM SD/MI	95,75	96,82	98,46	●
APM SMP/MTs	77,10	77,95	78,34	●
APM SMA/SMK/MK	70	59,95	58,85	▼
% Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,70	-	7,56	▼

● = tercapai ▼ = sulit tercapai pada tahun 2016 (tidak tercapai)

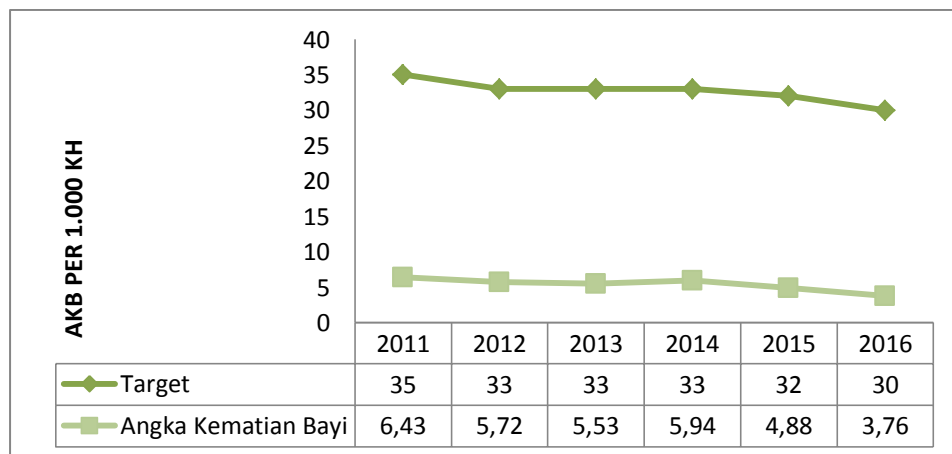
### 2.2.3 Dimensi Kesehatan

Secara keseluruhan, tingkat kesehatan dan perkembangan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung sejalan dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut membuktikan adanya keterkaitan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut membuktikan adanya keterkaitan dan efektivitas program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Untuk Provinsi Lampung hal yang perlu diprioritaskan adalah menstabilkan angka kematian Ibu melahirkan karena angka tersebut mengalami grafik yang naik turun.

#### *Angka Kematian Bayi*

**Gambar 25 Trend Kematian Bayi Lampung dan Indonesia, 2010-2016**



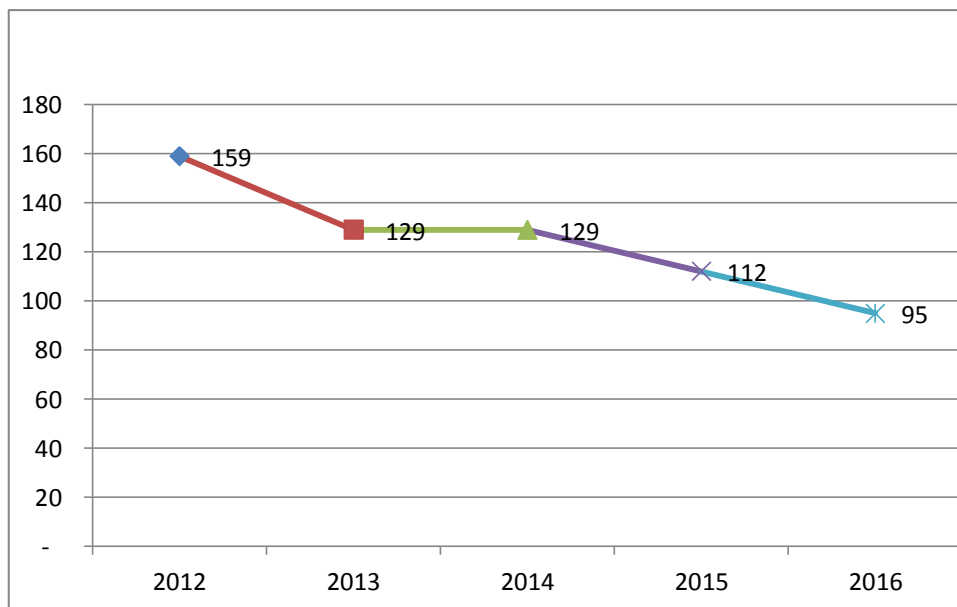
Sumber: Dinas Kesehatan 2017

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan matematik tidak dapat menggambarkan AKB yang sesungguhnya ada di populasi karena AKB ini dihitung berdasarkan kasus kematian bayi yang dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan saja (tidak mencakup semua kematian yang ada di populasi). Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AKB berdasarkan perhitungan matematik dengan menggunakan data rutin atau laporan secara kinerja telah tercapai, namun

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup tahun 2016 di Provinsi Lampung sebesar 3,76 per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan data pelaporan rutin belum dapat menggambarkan AKB di populasi atau dibandingkan dengan data hasil survey SDKI 2012.

Data AKB hasil perhitungan dengan data rutin ini hanya menggambarkan kematian yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan tidak menggambarkan kematian yang ada di populasi. Bila data AKB hasil perhitungan data rutin ini dibandingkan dengan AKB hasil SDKI tahun 2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 33 per 1000 kelahiran hidup maka AKB hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin tersebut hanya menggambarkan seperenam dari AKB sesungguhnya dipopulasi AKB yang dihitung berdasarkan laporan data rutin tidak menggambarkan AKB yang sesungguhnya di populasi dan tidak dapat dibandingkan dengan AKB hasil Survey (SDKI). AKB berdasarkan hasil perhitungan hanya menggambarkan seperenam dari AKB yang dihasilkan dari Survey (SDKI). Hal ini terjadi karena data rutin

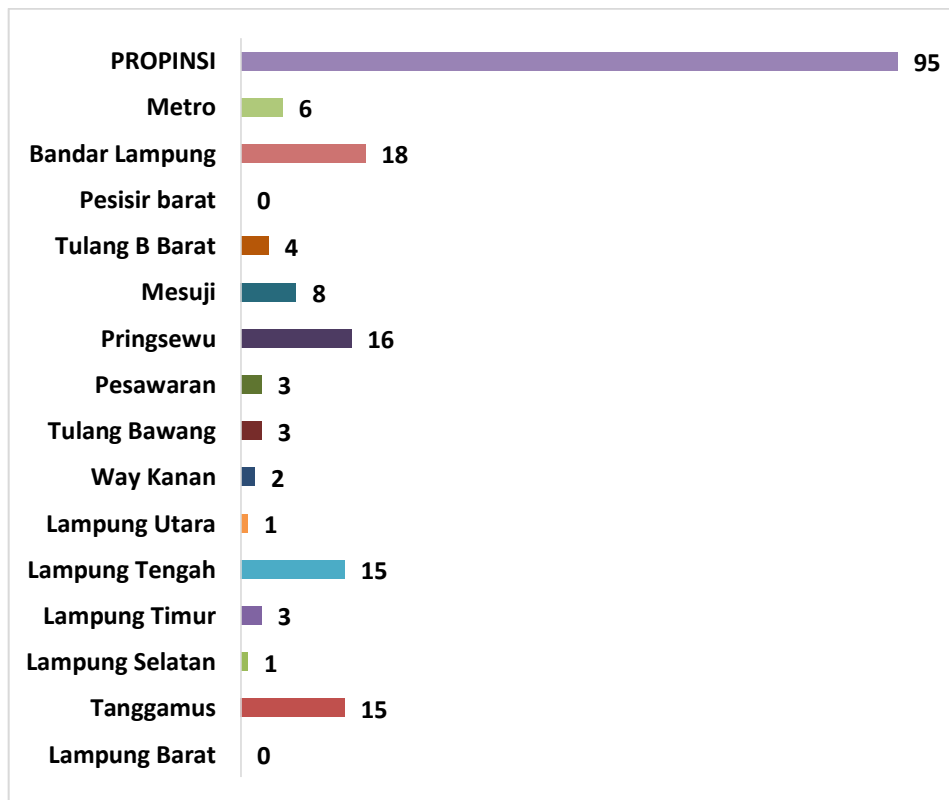
**Gambar 26 Trend Kematian Bayi Lampung dan Indonesia, 2010-2016**



Sumber: Dinas Kesehatan 2017

Grafik di atas memperlihatkan trend kasus kematian bayi sejak tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan. Distribusi tenaga kesehatan ke semua wilayah sampai ke pedesaan dan daerah terpencil serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan kegawat daruratan pada neonatal dan bayi turut berperan dalam penurunan kasus kematian bayi, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan kematian serta pelayanan kunjungan bayi nya sudah semakin baik.

**Gambar 27 Jumlah Kasus Kematian Bayi Provinsi Lampung Tahun 2016**

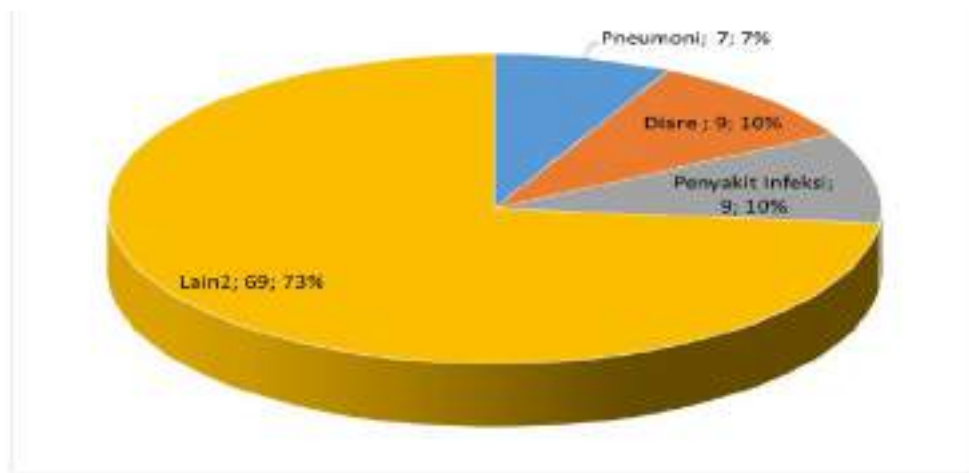


Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

Melihat grafik di atas, pada Tahun 2016 Terjadi 95 kasus kematian bayi (1 bl - <1 th) di Provinsi Lampung. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kasus pada tahun 2015 yang mencapai 112 kasus kematian bayi . Untuk kasus kematian bayi terbanyak ada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 19 Kasus, Pringsewu 16 Kasus dan Lampung Tengah serta

Tanggamus masing masing 15 kasus. Jumlah penduduk yang besar memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. tetapi seharusnya dengan jumlah tenaga kesehatan yang mencukupi, akses yang mudah dan sarana prasarana yang cukup kasus kematian bayi ini tidak boleh terjadi. Koordinasi yang telah dilakukan dengan lintas sektor terkait terutama dinas kependudukan untuk laporan kasus kematian bayi memungkinkan hal ini terjadi. Kasus Kematian yang tinggi menggambarkan adanya masalah kesehatan anak di wilayah tersebut yang harus segera diatasi.

**Gambar 28 Grafik Penyebab Kematian Bayi Di Provinsi Lampung**

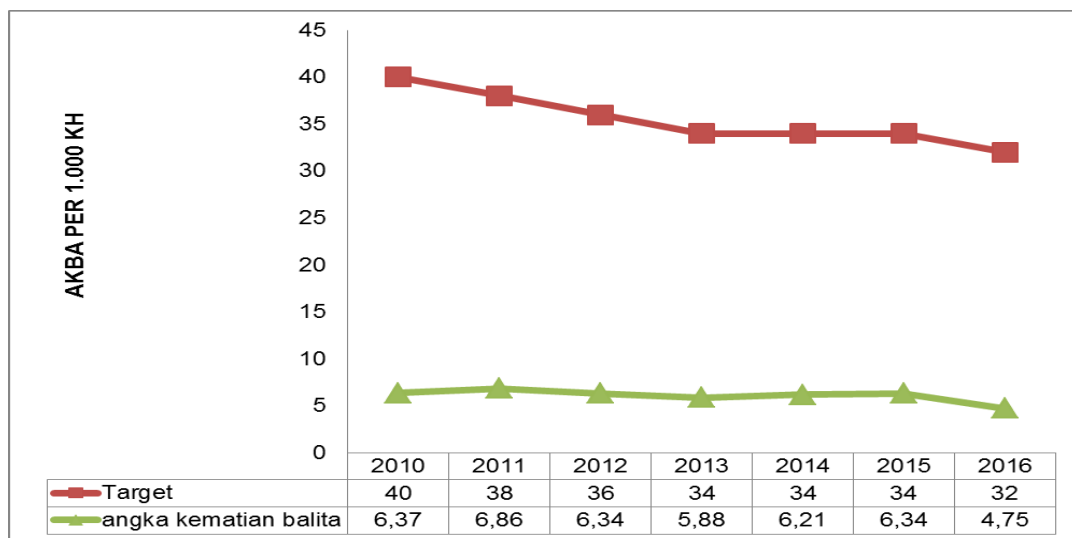


*Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017*

Jika dilihat dari penyebab kematian bayi, terbanyak angka kematian bayi dikarenakan sebab lain-lain yang tidak terdefiniskan. Perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam penyebab tingginya kasus kematian bayi ini guna mencari akar masalah dan penanganannya. Penyebab terbanyak lainnya masih disebabkan oleh penyakit- penyakit infeksi yaitu Diare dan ISPA. Peran Tenaga kesehatan dalam meningkatkan KIE pada masyarakat seharusnya dapat ditingkatkan untuk mencegah tingginya angka kematian karena penyakit infeksi. selain itu kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan penanganan infeksi serta kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai standar ikut berkontribusi dalam kasus kematian karena penyakit infeksi ini.

## Angka Kematian Balita

Gambar 29 Angka Kematian Balita, 2010-2016



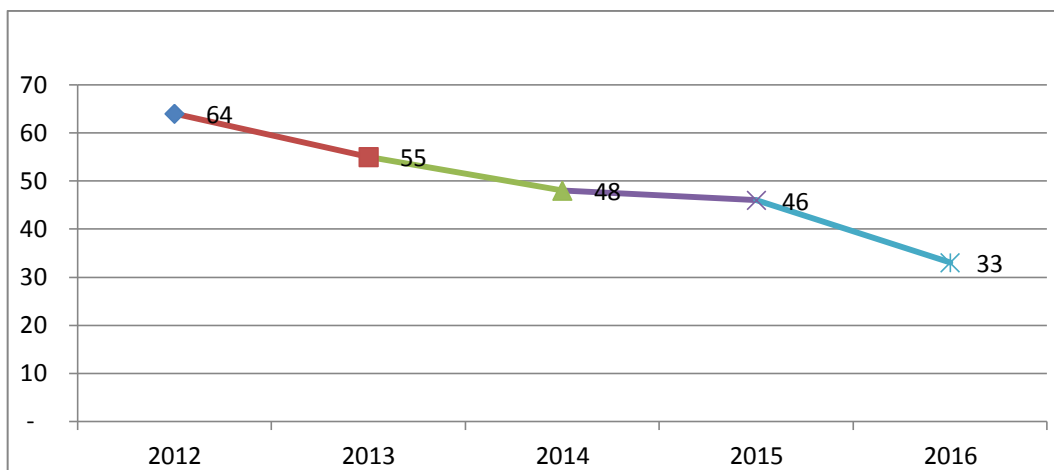
Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AKABA berdasarkan perhitungan matematik dengan menggunakan data rutin atau laporan secara kinerja telah mencapai target namun data Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 lahir hidup tahun 2016 di Provinsi Lampung sebesar 4,75 per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan data pelaporan rutin belum dapat menggambarkan atau dibandingkan dengan data hasil survey SDKI 2012. Data AKABA hasil perhitungan dengan data rutin ini hanya menggambarkan kematian balita (usia 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun) yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan tidak menggambarkan kematian yang ada di populasi.

Bila data AKABA hasil perhitungan data rutin ini dibandingkan dengan AKABA hasil SDKI tahun 2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 38 per 1000 kelahiran hidup maka AKABA hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin tersebut hanya menggambarkan seperenam dari AKABA sesungguhnya dipopulasi. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan matematik tidak dapat menggambarkan AKB yang sesungguhnya ada di populasi karena AKB ini dihitung berdasarkan kasus kematian bayi yang dilaporkan oleh fasilitas

pelayanan kesehatan saja (tidak mencakup semua kematian yang ada di populasi) Pemantauan yang dilakukan dalam masa anak balita atau usia 1 - <5 tahun adalah dengan melihat capaian kunjungan anak balita. Selama masa ini anak balita dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, dimana setiap tahunnya anak balita minimal mendapatkan 8 jenis pelayanan.

**Gambar 30 Trend Kasus Kematian Anak Balita Di Provinsi Lampung**



*Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017*

Sejak Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 trend kasus kematian Anak Balita cenderung menurun. Untuk penurunan kasus kematian balita ini dimungkinkan karena seluruh puskesmas di Provinsi Lampung menerapkan MTBS dalam menangani Balita Sakit sehingga kasus kematian akibat lima penyakit utama dapat segera ditangani sehingga kematian pada anak balita dapat dicegah.

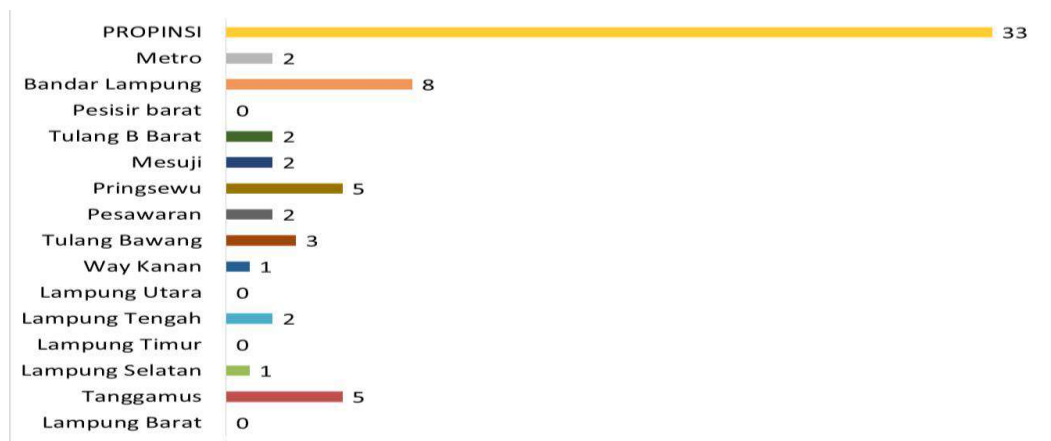
Pada tahun 2016 terjadi 33 kasus kematian Anak Balita, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 46 kasus. Kasus kematian Anak Balita tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung. Ditinjau dari jumlah SDM, Sarana dan prasarana serta akses ke fasilitas kesehatan seharusnya hal ini tidak terjadi, sehingga perlu kajian mendalam mengapa kasus kematian anak balita tinggi di Kota Bandar Lampung. Kemungkinan penyebab lainnya adalah rendahnya kualitas pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan kasus komplikasi yang tidak tertangani diduga menjadi



penyebab tingginya angka kematian ini. Terdapat 4 (empat) Kabupaten dengan kasus kematian Anak balita 0 yaitu Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara dan Pesisir Barat. Mengingat kondisi geografis yg sulit, Perlu dikaji apakah ada kemungkinan kasus kematian Anak Balita sebenarnya terjadi tetapi tidak dilaporkan.

Untuk melihat Kasus Kematian Anak Balita di Provinsi Lampung Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik

**Gambar 31 Kasus Kematian Anak Balita  
Di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016**



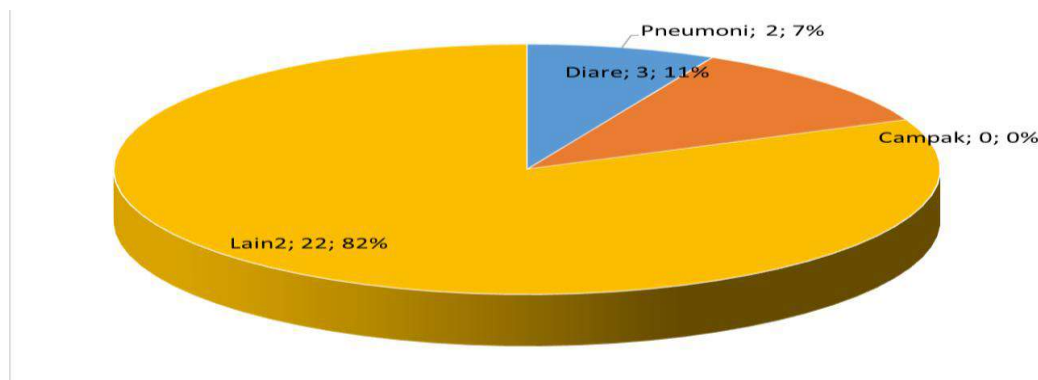
Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

Pada tahun 2016 terjadi 33 kasus kematian Anak Balita, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 46 kasus. Kasus kematian Anak Balita tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung. Ditinjau dari jumlah SDM, Sarana dan prasarana serta akses ke fasilitas kesehatan seharusnya hal ini tidak terjadi, sehingga perlu kajian mendalam mengapa kasus kematian anak balita tinggi di Kota Bandar Lampung. Kemungkinan penyebab lainnya adalah rendahnya kualitas pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan kasus komplikasi yang tidak tertangani diduga menjadi penyebab tingginya angka kematian ini. Terdapat 4 kabupaten dengan kasus kematian Anak balita 0 yaitu Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara dan Pesisir Barat. Mengingat kondisi geografis yg sulit, Perlu dikaji

apakah ada kemungkinan kasus kematian Anak Balita sebenarnya terjadi tetapi tidak dilaporkan.

Diare dan Pneumonia masih menjadi penyebab tingginya kematian balita, sedangkan penyebab utama kematian Anak Balita adalah penyakit lain-lain (82%) . Harus diwaspadai dalam penentuan klasifikasi penyakit untuk menghindari kesalahan data, agar dapat mencari penyebab pasti dan menentukan intervensi untuk mengatasi masalah dengan tepat. Penyebab kematian Anak Balita dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 32 Penyebab Kematian Anak Balita Di Provinsi Lampung**

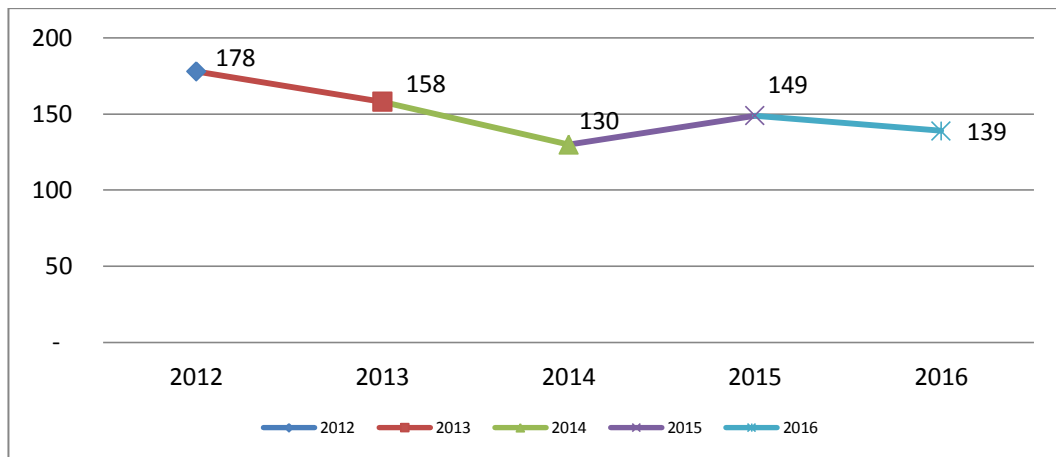


Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

### **Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu per 100.000 penduduk Nasional berdasarkan SDKI 2012 sebesar 359 per 100.000 (AKI untuk provinsi Lampung tidak tersedia datanya dari SDKI karena keterbatasan sampel SDKI). Bila dilihat berdasarkan kasus kematian ibu selama lima tahun dari 2012 – 2016 terlihat berfluktuasi, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar 33 Tren Kasus Kematian Ibu, 2011 – 2016**

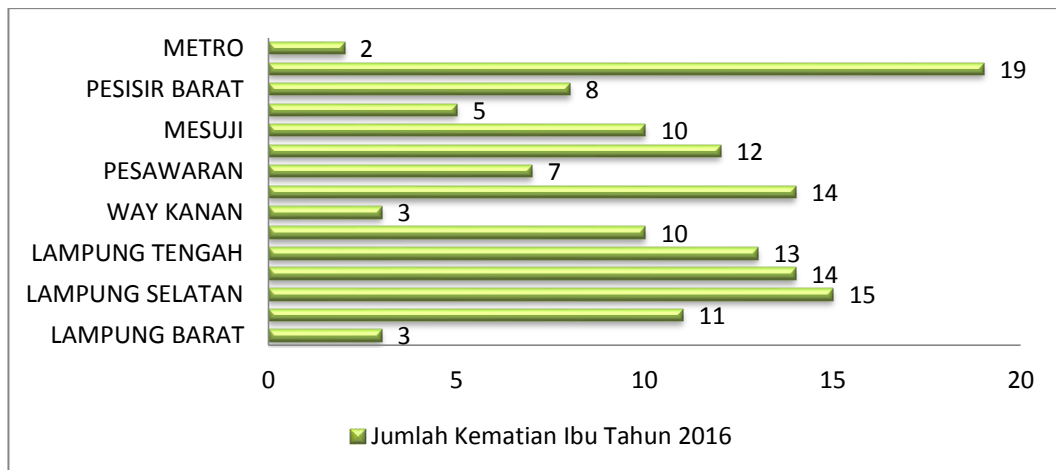


*Sumber: Dinas Kesehatan 2017*

Trend kasus kematian ibu selama lima tahun terakhir sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terlihat bahwa pada 3 tahun pertama trend kasus kematian ibu di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan yang signifikan, namun terjadi peningkatan jumlah kematian dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2016. Tetapi kasus kematian ibu tetap tinggi. Kasus kematian ibu yang cukup tinggi ini dimungkinkan karena pengawasan selama kehamilan kurang (kualitas ANC yang perlu dikaji ulang), atau penanganan kegawatdaruratan yang kurang (baik secara SDM, alat dan obat, akses kefaskes yang kurang atau penanganan di RS Rujukan yang buruk) serta kemungkinan system pencatatan dan pelaporan yang mulai baik sehingga kasus kematian ibu yang terjadi terlaporkan.

Pelaksanaan P4K harus makin ditingkatkan, karena diharapkan dengan Perencanaan persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang berkualitas kasus kematian ibu adalah zero atau 0. Program P4K dimaksudkan sebagai upaya peningkatan deteksi terhadap keberadaan ibu hamil dan nifas serta ibu dengan resiko tinggi oleh masyarakat dan juga diharapkan dapat memberikan dampak bagi penurunan kasus kematian ibu, karena dengan peran aktif masyarakat dan keluarga, ibu dengan komplikasi dapat ditangani dengan cepat.

**Gambar 34 Kasus Kematian Ibu menurut Wilayah, 2016**

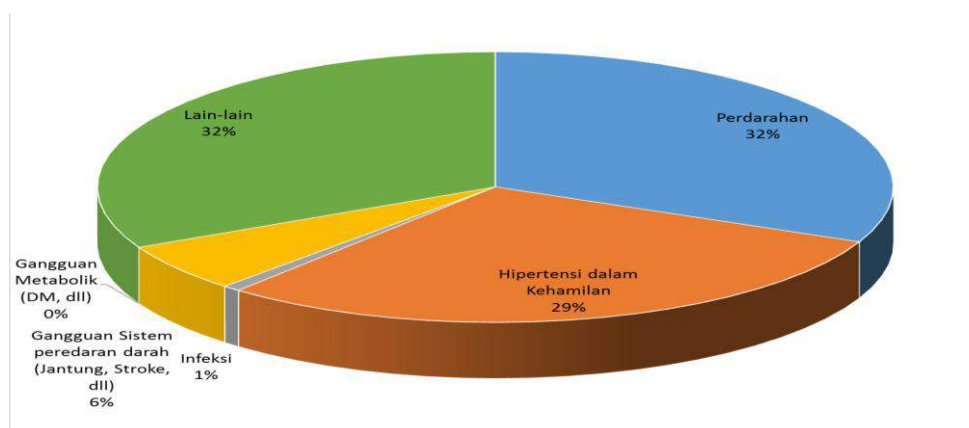


Sumber: Dinas Kesehatan 2017

Pada tahun 2016 Kasus Kematian Maternal yang dilaporkan sebanyak 139 kasus, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu 149 kasus. Dari sisi jumlah, Penyumbang kematian terbanyak adalah Kota Bandar Lampung yaitu 19 kasus kematian.

Jika menilik jumlah SDM, Sarana prasarana yang tersedia dan akses yang tidak sulit, tidak seharusnya ada begitu banyak kasus kematian ibu di Kota Bandar Lampung, perlu dilakukan Audit Maternal Perinatal lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kematian ibu.

**Gambar 35 Penyebab Kematian Ibu Di Provinsi Lampung Tahun 2016**



Sumber: Dinas Kesehatan 2017

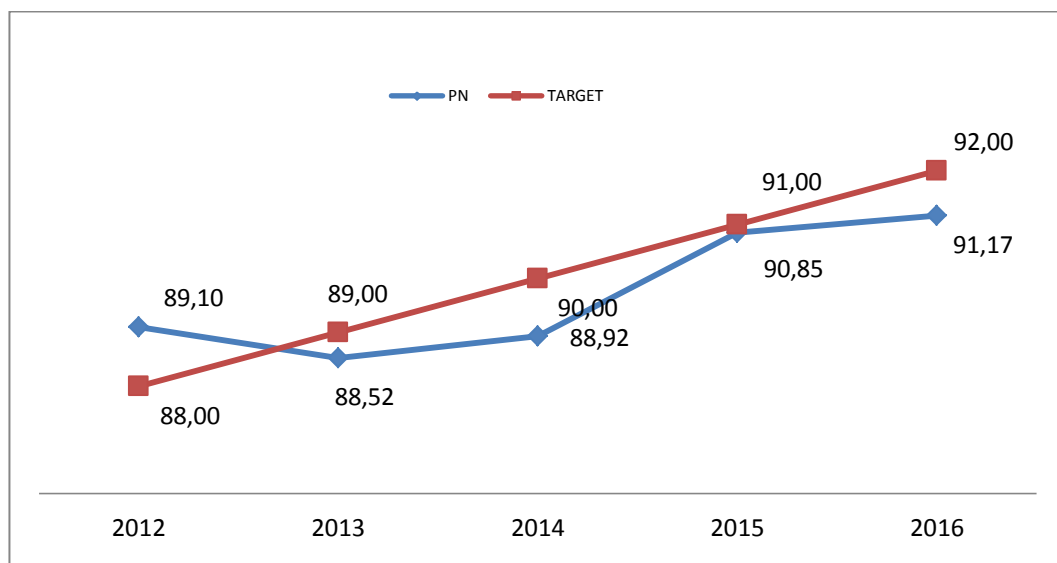
Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyebab utama kematian ibu di Provinsi Lampung masih didominasi oleh perdarahan, dan Hipertensi dalam kehamilan. Dengan angka cakupan penanganan komplikasi yang sudah cukup tinggi seharusnya ibu dengan hipertensi mendapatkan penanganan yang adekuat, kematian ibu karena penyebab ini dapat dicegah dengan melakukan antenatal secara komprehensif, eklamsi dan perdarahan dapat diantisipasi apabila tenaga kesehatan mematuhi standar pelayanan bagi ibu bersalin dan merujuk ibu untuk bersalin di fasilitas rujukan. Tetapi ditemukan juga beberapa kasus kematian ibu yang sudah di rawat di RS beberapa hari, perlu dilakukan kajian kualitas pelayanan di RS Rujukan sehingga ibu dengan resiko tinggi tidak terselamatkan.

Namun, ternyata masih ada faktor lain yang juga cukup penting. Misalnya, pemberdayaan perempuan yang tak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga berpengaruh. Kaum lelaki juga dituntut harus berupaya ikut aktif dalam segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih bertanggung jawab. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami.

Selain itu penyebab kematian “lain lain” adalah penyumbang tertinggi (32%), diupayakan untuk lebih spesifik menentukan penyebab kematian ibu agar dapat ditentukan upaya penanggulangannya. Dengan tingginya jumlah Tenaga kesehatan terlatih, mudahnya akses ke fasilitas kesehatan juga sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai seharusnya kasus kematian ibu semakin menurun. Perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi faktor penyebab yang membuat kasus kematian ibu tetap tinggi. Agar dapat diambil langkah strategis untuk menurunkan kasus kematian ibu di masa yang akan datang.

Di Provinsi Lampung paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh pendarahan; proporsinya berkisar antara kurang dari 10 persen sampai hampir 60 persen. Walaupun seorang perempuan bertahan hidup setelah mengalami pendarahan pasca persalinan, namun ia akan menderita akibat kekurangan darah yang berat (anemia berat) dan akan mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan.

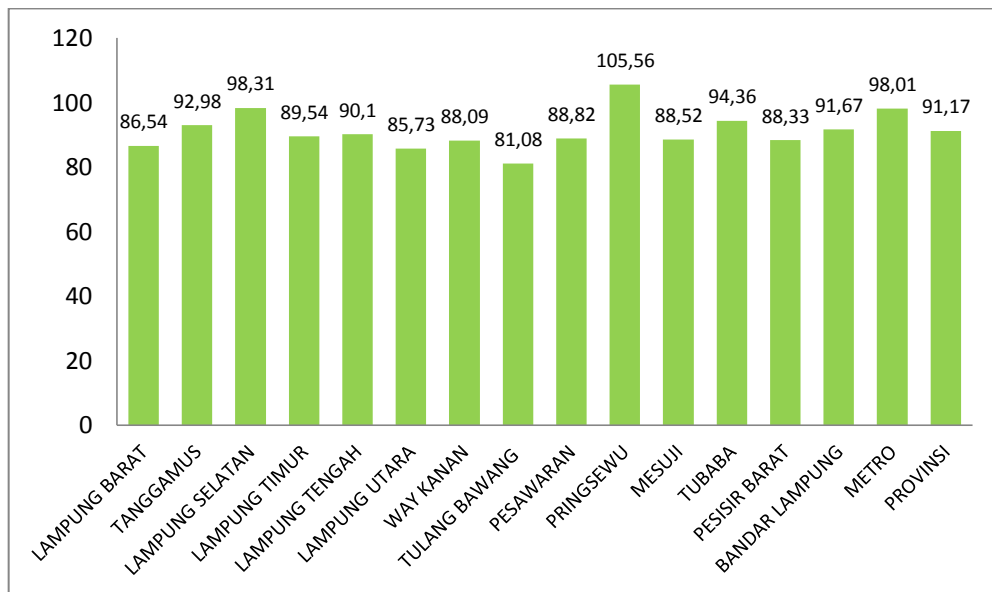
**Gambar 36 Trend Cakupan Penolong Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung**



Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

Dari Grafik di atas dapat kita lihat trend persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, terjadi peningkatan secara signifikan Mulai tahun 2013 sampai tahun 2015 dan hanya bergerak sedikit dari tahun 2015 ke tahun 2016. Cakupan belum mencapai target yang diharapkan dan lebih rendah dari cakupan kunjungan K4 Ibu hamil yang mencapai 91,40% ini menunjukkan bahwa ada sebagian ibu hamil yang sudah melakukan antenatal care sesuai standar, tetapi tidak melakukan persalinan di tenaga kesehatan. Rendahnya kualitas pelayanan, kurangnya motivasi dan konseling serta kurang baiknya kemitraan antrara bidan dan dukun memungkinkan terjadinya hal tersebut.

**Gambar 37 Persentase Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih per Kabupaten/Kota, 2016**



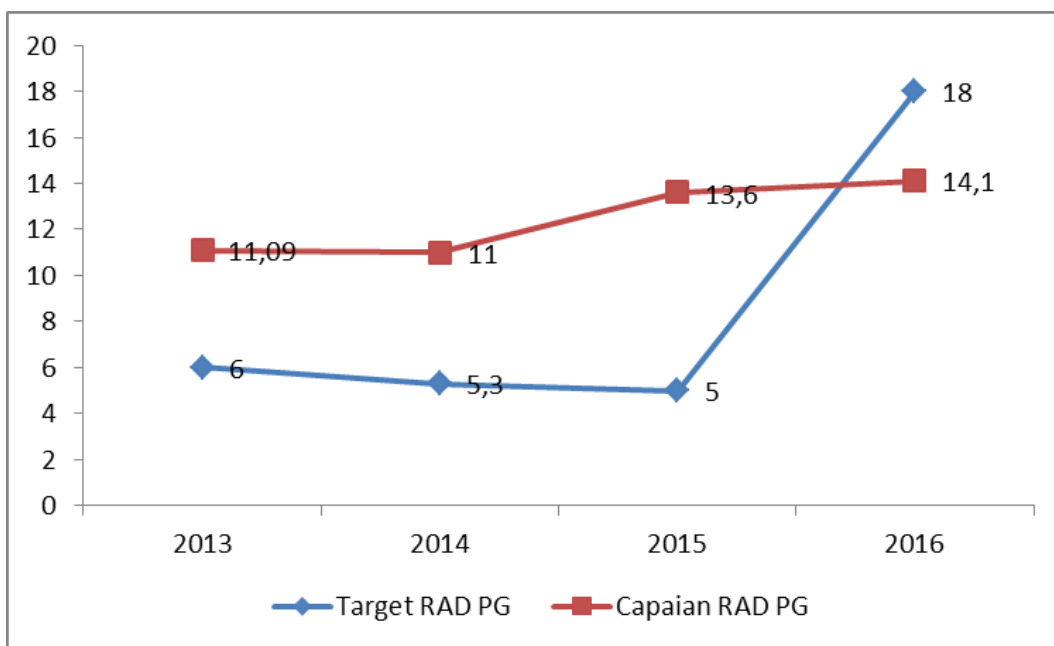
*Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017*

Pada Tahun 2016 cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Provinsi Lampung mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2015 90,85 % dan tahun 2016 91,17%) walaupun mengalami peningkatan, cakupan Persalinan ditolong tenaga kesehatan ini masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu 92%. Dari 15 Kabupaten/Kota hanya 5 Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan di atas target yang diharapkan yaitu Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Sedangkan 10 Kabupaten lain masih berada di bawah target dengan cakupan terendah di Kabupaten Tulang Bawang yang hanya mencapai 81,08%, hal ini dimungkinkan karena Kondisi geografis yang sulit terjangkau, rendahnya kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan sulitnya akses ke fasilitas kesehatan serta budaya yang berkembang.

### **Prevelensi Gizi Buruk**

Usia 0-6 tahun merupakan usia kritis bagi perkembangan dan pertumbuhan semua anak. Dimana pada usia tersebut adalah masa terjadinya pembentukan otak sehingga seorang anak membutuhkan gizi dan nutrisi yang cukup serta interaksi yang baik dan perhatian dari orang tua serta orang-orang di sekitarnya. Anak yang mengalami gizi kurang apabila tidak cepat ditangani akan meningkat menjadi gizi buruk, yang selanjutnya anak-anak akan gampang terkena penyakit dan memiliki kecerdasan mental yang kurang. Gambaran kondisi balita gizi kurang di provinsi Lampung dari Tahun 2013-2016.

**Gambar 38 Target dan Capaian Prevalensi Balita Gizi Kurang**



Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

Prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Lampung Tahun 2013 sebesar 11,09% dan masih melebihi target yang ditetapkan yang sebesar 6%. Begitu juga Tahun 2014 dan 2015, prevalensi Balita Gizi Buruk dari 11% naik menjadi 13,6% yang berarti masih belum mencapai target. Untuk tahun 2016, target yang ditetapkan adalah sebesar 18% dengan capaian RAD PG pada angka 14,10%, yang artinya Prevalensi Balita Gizi Kurang telah



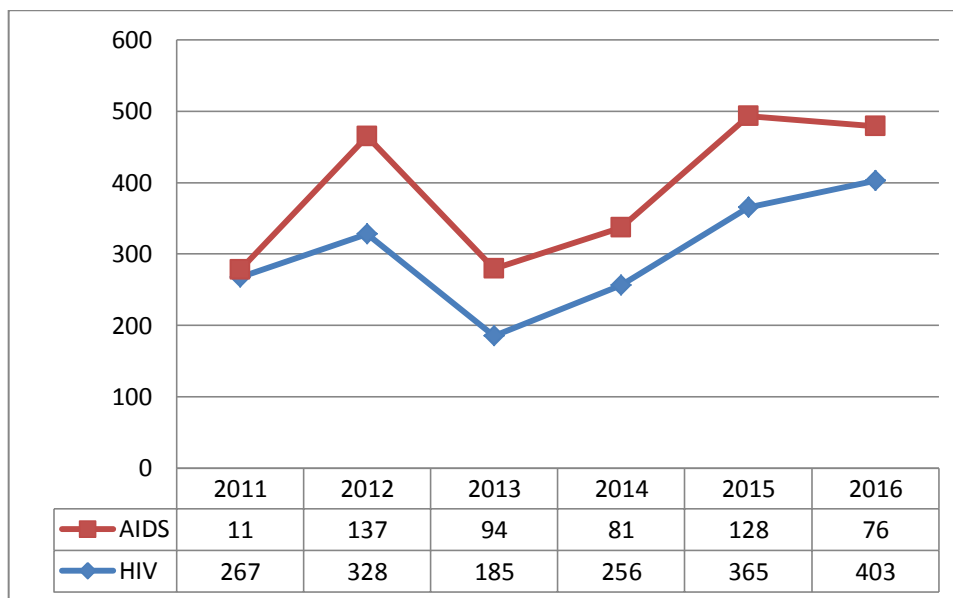
mencapai target yang ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Prevalensi Balita Gizi Kurang terus mengalami kenaikan.

### ***Kasus HIV/AIDS***

Untuk Indikator HIV diharapkan kurang dari <0,5% di Provinsi Lampung. Prevelensi HIV berdasarkan target indikator MDGs dari Tahun 2010 sebagai baseline data sampai dengan tahun 2016 berkisar antara 0,03% sampai dengan 0,04% prevelensi HIV per tahun.

Jumlah kasus yang dilaporkan di tahun 2016 berjumlah 479 kasus. Peningkatan kasus HIV tertinggi terjadi di tahun 2012, dari 278 kasus menjadi 465 kasus di tahun 2012, menurun di tahun 2013 (279 kasus) namun meningkat kembali di tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan 337 kasus, 343 kasus dan 479 kasus.

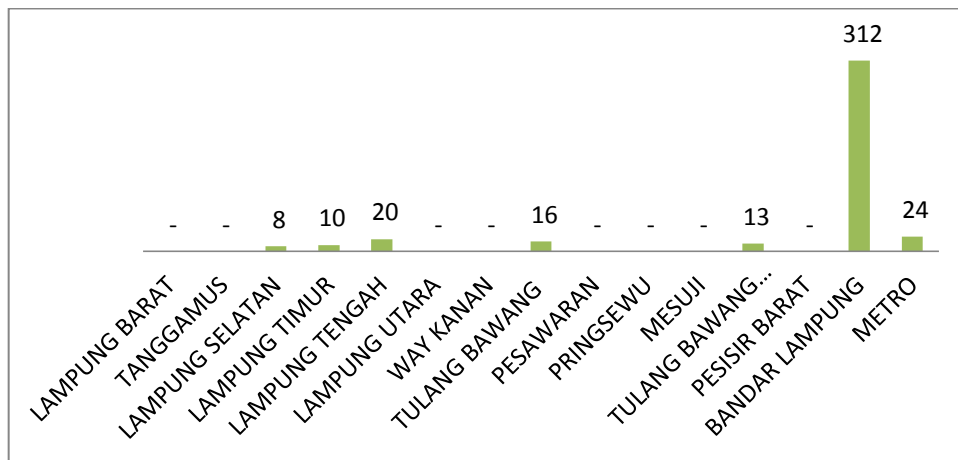
**Gambar 39 Jumlah Kasus Kumulatif HIV/AIDS yang Terlaporkan, 2011-2016**



*Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2017*

Untuk sebaran jumlah kasus di tahun 2016 tertinggi tercatat di Kota Bandar Lampung dengan 360, dengan 3 (tiga) kabupaten tidak ada kasus yang dilaporkan, yaitu Kabupaten Way Kanan, Mesuji dan Pesisir Barat.

**Gambar 40 Distribusi Kasus HIV/AIDS per Kab/Kota di Provinsi Lampung, 2016**

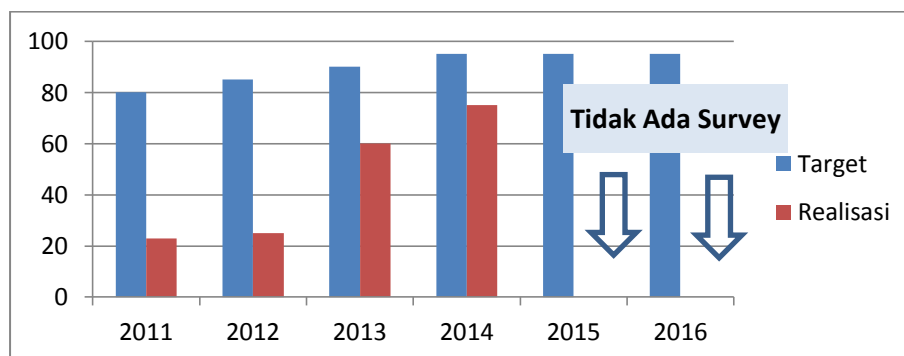


Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

Upaya lain yang juga dilakukan untuk menekan laju penularan penyakit HIV dan AIDS adalah dengan meningkatkan pengetahuan penduduk melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Untuk mengetahui angka persentase Penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS dilaksanakan melalui kegiatan survey. Hasil survey yang dilaksanakan untuk mengetahui persentase pengetahuan komprehensif pada penduduk berusia 15-24 tahun yang dilaksanakan, yaitu seperti pada grafik dibawah ini :

**Gambar 41 Persentase Penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS, 2011-2015**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2017

Untuk mengendalikan laju penularan kasus HIV dan AIDS, dilakukan berbagai upaya *preventive* diantaranya adalah penggunaan kondom pada hubungan seksual berisiko tinggi menularkan HIV dan AIDS, akan tetapi upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.

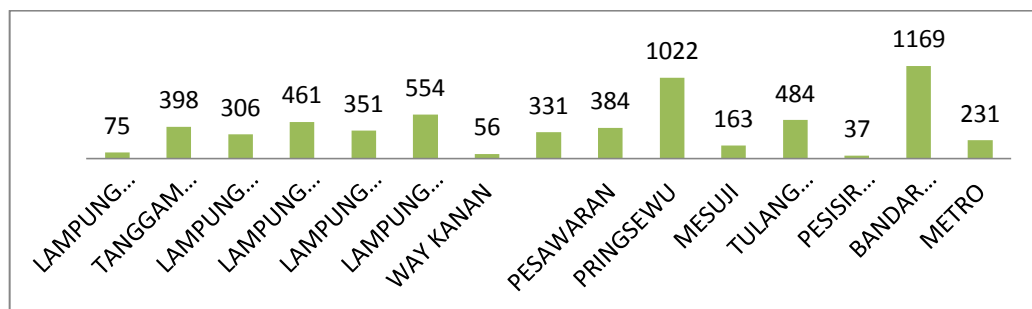
### ***Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)***

Setiap Tahun, kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia cenderung meningkat pada pertengahan musim penghujan sekitar bulan Januari, dan cenderung turun pada Bulan Februari hingga ke penghujung Tahun. Sepanjang Januari 2016 Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Kementerian Kesehatan mencatat 3.298 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 50 kasus di Indonesia.

Untuk Provinsi Lampung Tahun 2016 kasusu DBD sebanyak 6.022 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 25 orang, Angka Kesakitahn(IR) DBD 74,86 per 100.000 penduduk dari Indikator Nasional 49 per 100.000 penduduk dan Angka Kematian (CFR) DBD 0,42% dari Indikator Nasional <1%.

Dilihat berdasarkan sebaran kasus di kabupaten/kota, maka seluruh (15) kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki catatan kasus DBD, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan angka kasus DBD tertinggi dan yang terendah ada di kabupaten Tulang Bawang Barat.

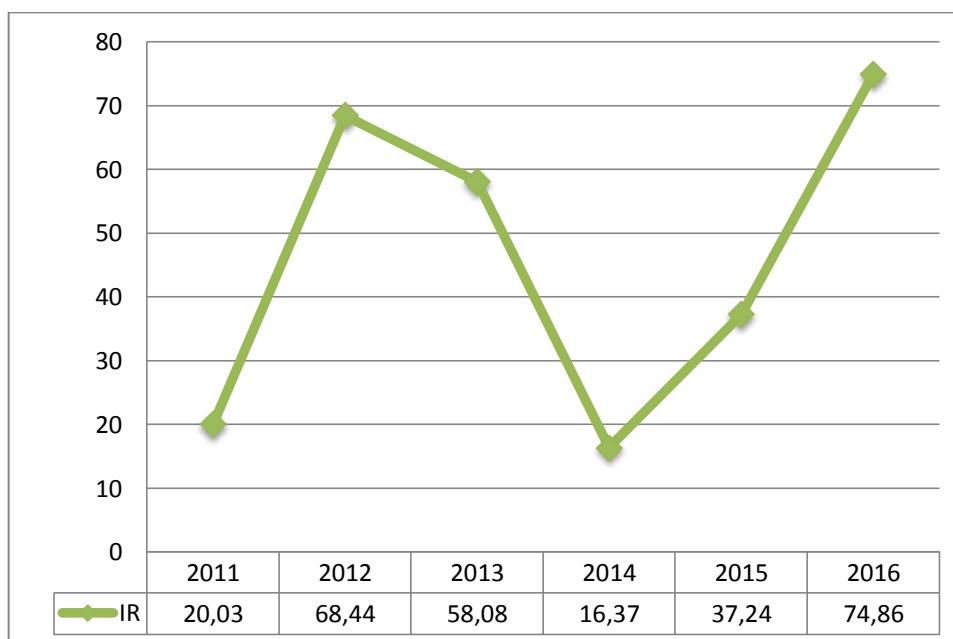
**Gambar 42 Kasus DBD per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2017

Berdasarkan data yang masuk dari semua Kab/Kota dari Tahun 2011-2016 dan setelah dianalisis, maka dapat dilihat bahwa pola atau kecenderungan penyakit DBD (Angka Kesakitan) di Provinsi Lampung memiliki kecenderungan untuk meningkat dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2012 kita mengalami peningkatan angka kesakitan yang cukup tinggi, pada Tahun 2013 s.d 2014 Angka Kesakitan DBD di Provinsi Lampung mengalami penurunan namun terjadi peningkatan lagi pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Hal itu dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

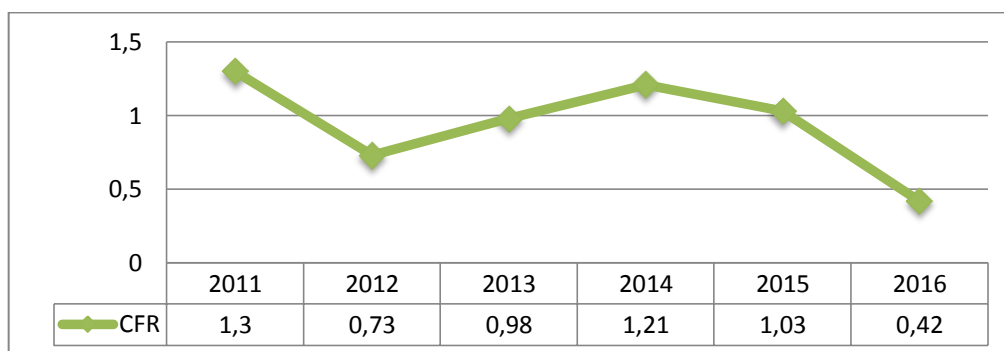
**Gambar 43 Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung, 2011-2016**



*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2017*

Sedangkan untuk Angka Kematian (CFR), data yang didapat dari semua Kab/Kota dari Tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 s.d 2014 mengalami kenaikan namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sampai tahun 2016.

**Gambar 44 Angka Kematian DBD per 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung, 2011-2016**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2017

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk selama tahun 2004-2016 terlihat berfluktuasi dan angka kesakitan ini masih tinggi dibandingkan dengan target yang diharapkan yaitu 49 per 100.000 penduduk.

**Tabel 15 Angka Kesakitan dan Jumlah Kasus DBD, 2004-2016**

Tahun	Kasus DBD	Meninggal	IR DBD Per 100.000 Penduduk	CFR (%)	ABJ
2004	912	14	13,19	1,54	64,93
2005	696	10	9,97	1,46	67,61
2006	1.402	14	18,94	1,02	83,77
2007	4.470	24	61,32	0,50	91,21
2008	4.869	39	65,28	0,80	61,40
2009	1.862	20	24,85	1,05	74,93
2010	1.714	29	22,88	1,69	NA
2011	1.328	17	20,03	3	68,51
2012	5.207	38	68,44	0,72	81
2013	4.510	49	58,08	0,98	69,8
2014	1.350	22	16,37	1,21	48
2015	2.996	31	37,24	1,03	48*
2016	6.022	25	74,86	0,42	23,54

Sumber: Dinas Kesehatan Provnsi Lampung, Tahun 2017

Jaminan kesehatan di Indonesia saat ini memang tak selalu diidentikkan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Program penjamin kesehatan masyarakat yang berasal dari pemerintah ini memang dinilai memberikan alternatif atau solusi lain untuk masyarakat supaya bisa hidup sehat selalu. Dengan adanya BPJS Kesehatan biaya pengobatan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung menjadi tertangani. Meskipun sistem dan mekanisme BPJS Kesehatan di beberapa sisi masih nampak sulit dan rumit, namun pemerintah beserta segenap pihak yang terkait terus berusaha membenahi dan memperbaiki sistem agar tercipta layanan yang baik dan kepuasan bagi para peserta BPJS.

Masalah yang terjadi di Provinsi Lampung adalah persoalan gizi buruk dan kurang, cakupan pelayanan dan kualitas SDM yang belum memenuhi standar nasional kesehatan, cakupan pelayanan puskesmas yang masih terbatas, serta trend pergeseran penyakit. Usaha-usaha preventif dan promotif seperti gizi, sanitasi, konseling genetika, asuransi, dan estetika termasuk di dalamnya telah diatasi secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

INDIKATOR	TARGET 2016 (RPJMD)	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	STATUS
AKB	30		3,76	▼
AKI	333		81,07	▼
Prev. Balita Kurang Gizi	18,08		14,10	●
Prev.HIV/AIDS	0,49		0,01	●
Angka Kesakitan DBD	49		56,23	▼

● = tercapai ▼ = sulit tercapai pada tahun 2016 (tidak tercapai)

## 2.2.4 Dimensi Prasarana Dasar

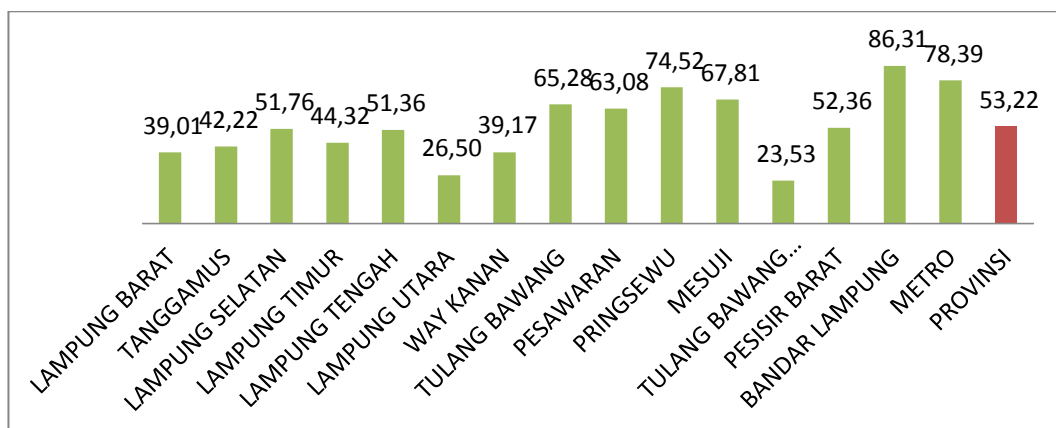
Keefektifan program kegiatan terlihat dari adanya peningkatan yang terjadi pada akses listrik yang telah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Lampung, atau sekitar 98,51% dari seluruh masyarakat Provinsi Lampung yang telah terlayani oleh listrik PLN maupun Listrik Non PLN.

Untuk Provinsi Lampung hal yang perlu di prioritaskan adalah bagaimana meningkatkan akses sanitasi yang layak karena masih ada masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk MCK, jadi program dan kegiatan diprioritaskan untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak.

### Ketersediaan air minum layak

Gambar di bawah memperlihatkan persentase rumah tangga dengan ketersediaan air minum layak di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2016, dengan sebaran persentase terendah 23,53 persen (kabupaten Tulang Bawang Barat) dan tertinggi di kota Bandar Lampung sebesar 86,31 persen. Dua daerah dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak adalah kota Bandar Lampung dan kota Metro. Tingginya persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di daerah perkotaan dimungkinkan karena fasilitas di perkotaan lebih tersedia, khususnya untuk air minum ledeng.

**Gambar 45 Akses Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota**



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2017

### ***Kemantapan Jalan Provinsi***

Fasilitas wilayah atau infrastruktur untuk daya saing daerah adalah fasilitas yang menunjang aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Aksesibilitas Provinsi Lampung dapat ditunjukkan dengan infrastruktur transportasi. Provinsi Lampung memiliki jaringan jalan nasional sepanjang 1.159.573 Km dan jalan Provinsi sepanjang 1.702,81 km.

**Tabel 16 Panjang Jalan Negara menurut kondisi Jalan di Provinsi Lampung**

Kondisi Jalan	2013			2015		
	Kondisi Jalan (km)			Kondisi Jalan (km)		
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Nasional dan Jalan Provinsi	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
Baik	266.001	604.790	870.791	266.001	722.220	988.221
Sedang	710.905	446.730	1.157.635	710.905	218.770	929.675
Rusak	116.688	366.410	483.098	116.688	237.030	353.718
Kritis	65.979	284.880	350.859	65.979	524.790	590.769

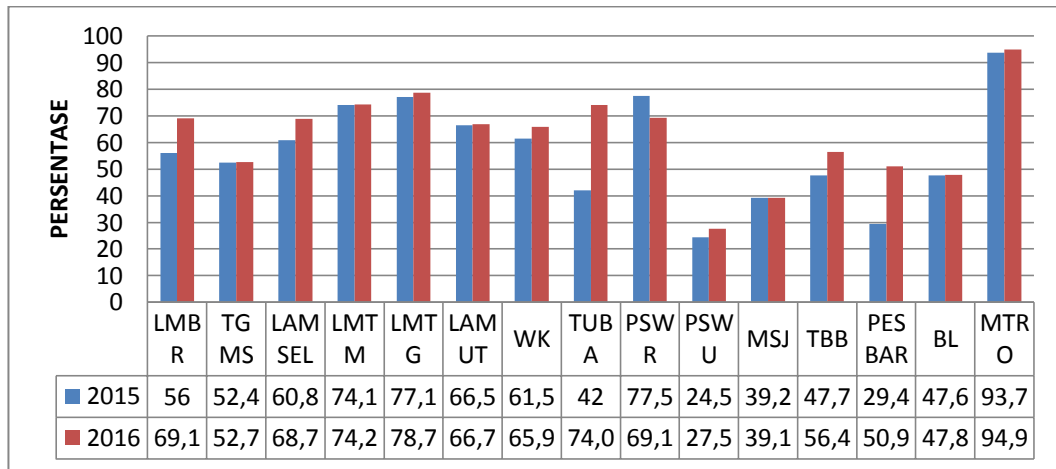
*Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017*

### ***Ketersediaan Sanitasi Layak***

Gambar di bawah memperlihatkan proporsi rumah tangga berkelanjutan terhadap sanitasi layak di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2015 dan 2016. Dengan sebaran persentase terendah Tahun 2016 27,52 persen (kabupaten Pringsewu) dan tertinggi di kota Metro sebesar 94,98 persen. Dua daerah dengan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.



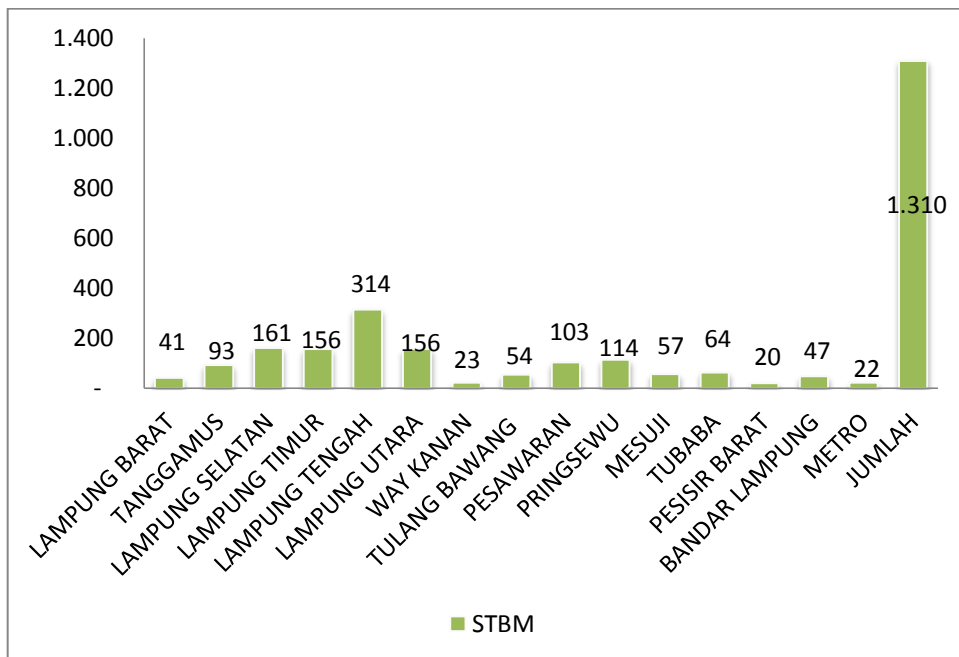
**Gambar 46 Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 s.d 2016**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2017

Adapun desa yang sudah difasilitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan mengadakan pemecuan untuk mencapai desa stop Buang air Besar Sembarangan (Stop BAS) adalah sebagai berikut :

**Gambar 47 Jumlah Desa yang difasilitasi STBM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2017

### ***Ketersediaan Listrik bagi Rumah Tangga***

Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik, karena cahaya yang dihasilkan dari listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya, seperti petromak, pelita, sentir ataupun obor. Berdasarkan data Susenas, penerangan listrik yang dimaksud adalah penerangan listrik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN, untuk penerangan yang bersumber dari PLN termasuk juga rumah tangga yang menggunakan listrik tanpa meteran ataupun menyambung dari rumah tangga lain.

**Tabel 17 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Ketersediaan Listrik PLN dan Non-PLN, 2016**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>RUMAH TANGGA LISTRIK PLN</b>	<b>RUMAH TANGGA LISTRIK NON PLN</b>	<b>RUMAH TANGGA BUKAN LISTRIK</b>	<b>JUMLAH</b>
Lampung Barat	59,69	35,42	4,88	100,00
Tanggamus	85,12	11,05	3,83	100,00
Lampung Selatan	95,92	3,65	0,43	100,00
Lampung Timur	99,60	0,20	0,20	100,00
Lampung Tengah	94,49	4,59	0,92	100,00
Lampung Utara	96,74	1,35	1,91	100,00
Way Kanan	94,29	4,69	1,02	100,00
Tulang Bawang	66,63	29,98	3,40	100,00
Pesawaran	95,36	3,83	0,81	100,00
Pringsewu	99,79	0,00	0,21	100,00
Mesuji	71,25	24,12	4,63	100,00
Tulang Bawang Barat	96,10	3,90	0,00	100,00
Pesisir Barat	65,70	18,03	16,27	100,00
Bandar Lampung	99,02	0,88	0,09	100,00
Metro	99,82	0,15	0,03	100,00
<b>Total</b>	<b>91,90</b>	<b>6,61</b>	<b>1,50</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016, BPS Lampung, p.113*

Dengan adanya program gerbang desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, maka sedikit demi sedikit desa tertinggal yang ada di Provinsi Lampung ini mulai dibantu, hal ini telah dibuktikan tahun 2015 dengan adanya 30 desa yang telah mendapatkan bantuan 100

juta/desa. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 100 desa (30 desa tahun 2015 + 70 desa baru tahun 2016) dengan bantuan masing-masing sebesar 300juta/desa.

Perpindahan penduduk yang tinggal di desa ke wilayah perkotaan merupakan yang fenomena yang sering terjadi dalam proses pembangunan. Ada ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya arus urbanisasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Faktor pendorong terjadi karena (1) tidak tersedianya pembangunan ekonomi di pedesaan sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan sebagai mata pencaharian; (2) akses terhadap listrik di pedesaan tidak luas sehingga mereka memiliki keterbatasan aktifitas di malam hari. Sedangkan faktor penariknya adalah (1) pembangunan ekonomi lebih banyak terjadi di perkotaan sehingga ada banyak pilihan pekerjaan sebagai mata pencaharian; (2) akses terhadap listrik sudah lebih luas. Menelaah lebih lanjut mengenai faktor urbanisasi tersebut, dapat dilihat bahwa pemenuhan akses terhadap listrik di pedesaan akan mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan sehingga penduduk pedesaan akan memiliki banyak pilihan pekerjaan di pedesaan dan tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di perkotaan karena tingkat kelistrikan di desapun telah masuk secara perlahan.

INDIKATOR	TARGET 2016 (RPJMD)	CAPAIAN PROVINSI	STATUS
% RT dengan air minum layak	74,34	53,22	▼
% kemantapan jalan Provinsi	70	70,02	●
% RT dengan sanitasi layak	62,86	62,45	▼

● = tercapai ▼ = sulit tercapai pada tahun 2016 (tidak tercapai)

### 2.2.5 Dimensi Ketahanan Pangan

Berdasarkan data dan grafik yang menggambarkan tingkat produksi tanaman padi di Provinsi Lampung, terus mengalami kenaikan dari Tahun 2011 s.d 2016. Program kegiatan yang berbasis pada peningkatan tanaman pangan belum dikatakan tidak efektif, karena ada faktor eksternal yang diluar prediksi dan perlu mendapatkan perhatian, seperti gangguan hama yang diluar prediksi terjadi wabah dan lain sebagainya.

**Tabel 18 Perbandingan NTP dan Perubahan NTP Juni 2017 menurut Provinsi se-Sumatera (2012=100)**

Provinsi	NTP	Ranking	Perubahan NTP (%)	Ranking
11)	2	3	4	5
Aceh	94,72	7	0,18	3
Sumatera Utara	99,54	3	0,47	2
Sumatera Barat	96,66	6	(0,42)	7
Riau	102,59	2	0,60	1
Jambi	98,75	4	(0,63)	8
Sumatera Selatan	92,77	10	(0,96)	9
Bengkulu	93,30	9	(0,20)	5
Lampung	104,18	1	(0,38)	6
Bangka Belitung	94,44	8	(1,42)	10
Kep. Riau	96,99	5	0,00	4

*Sumber BPS Provinsi Lampung, 2017*

**Tabel 19 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi  
Lampung Per Subsektor Mei 2017 s.d. Juni 2017**

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	Mei 2017	Juni 2017	
1	2	3	4
1. Tanaman Padi & Palawija			
a. Indeks yang Diterima (It)	129,61	130,59	0,75
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	127,67	127,93	0,21
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	101,52	102,07	0,54
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-P)	109,44	109,91	0,43
2. Hortikultura			
a. Indeks yang Diterima (It)	121,56	121,05	-0,41
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	124,99	125,4	0,33
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	97,25	96,53	-0,74
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-H)	108,27	107,63	-0,59
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Indeks yang Diterima (It)	131,79	130,12	-1,27
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	126,43	126,96	0,41
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	104,23	102,49	-1,67
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-	113,96	111,99	-1,73
4. Peternakan			
a. Indeks yang Diterima (It)	137,83	138,86	0,75
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	118,7	119,09	0,33
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	116,12	116,6	0,42
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pt)	123,85	124,41	0,45
5. Perikanan Tangkap			
a. Indeks yang Diterima (It)	135,06	136,54	1,1
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	121,64	122,11	0,38
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	111,03	111,82	0,71
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pi)	122,5	123,62	0,92
6. Perikanan Budidaya			
a. Indeks yang Diterima (It)	116,52	116,9	0,33
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	123,49	123,84	0,28
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	94,35	94,4	0,05
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pi)	100,52	101,00	0,48
<b>GABUNGAN</b>			
a. Indeks yang Diterima (It)	130,52	130,44	-0,06
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	124,81	125,21	0,32
c. Nilai Tukar Petani (NTPp)	104,58	104,18	(0,38)
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPp)	113,56	113,12	-0,39

Sumber BPS Provinsi Lampung, 2017

Untuk kedepan, mungkin program kegiatan yang dilakukan lebih diprioritaskan pada menjaga kesetabilan produksi tanaman padi serta kesiapan dalam menghadapi gangguan produksi secara eksternal maupun internal. Di wilayah Sumatera sebagian besar provinsi mengalami penurunan NTP. Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau yaitu sebesar 0,60 persen dan penurunan terendah terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 1,42 persen. NTP Provinsi Lampung pada bulan Mei 2017 sebesar 104,18 persen merupakan NTP tertinggi pertama di Sumatera. Sedangkan NTP terendah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 92,77 persen. NTP Provinsi Lampung yang turun sebesar 0,38 persen menempati peringkat keenam di wilayah Sumatera dan peringkat ke-23 secara nasional.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 12 (dua belas) kabupaten di Provinsi Lampung, pada Juni 2017 NTP Provinsi Lampung sebesar 104,18 atau mengalami penurunan sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan Mei 2017 yang sebesar 104,58. Sementara itu, NTP nasional naik sebesar 0,38 persen, dari sebesar 100,15 pada Mei 2017 menjadi 100,53 pada Juni 2017.

Pada Juni 2017 NTP-P Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima lebih besar dari indeks harga yang dibayar petani yaitu masing-masing sebesar 0,75 persen dan 0,21 persen. Sementara kenaikan Ib yang sebesar 0,21 persen disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumahtangga (IKRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,18 persen dan 0,32 persen.

NTP-H bulan Juni 2017 Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,74 persen disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,41 persen dan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,33 persen. Kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,33 persen, akibat dari naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,37 persen dan 0,18 persen.

NTP-Pr bulan Juni 2017 mengalami penurunan sebesar 1,67 persen disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,27 persen dan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,41 persen. Kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,41 persen, akibat dari naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,40 persen dan 0,47 persen.

Pada Juni 2017 NTP-Pt Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima lebih besar dari indeks harga yang dibayar petani yaitu masing-masing sebesar 0,75 persen dan 0,33 persen. Sementara kenaikan Ib yang sebesar 0,33 persen disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumahtangga (IKRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,37 persen dan 0,30 persen.

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia. Pada umumnya tanaman pangan termasuk dalam tanaman musiman atau yang mampu menghasilkan dalam waktu semusim saja. Upaya yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan diantaranya dengan meningkatkan dan mengembangkan produksi pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan tanaman pangan.

Gambaran secara umum ketersediaan pangan di Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 20 Kinerja Produksi Tanaman Pangan Provinsi Lampung**

Kinerja Produksi							
NO.	KOMODITAS	PRODUKSI (Ton)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Padi	2.940.795	3.101.455	3.207.002	3.320.064	3.641.895	4.020.420
2.	Jagung	1.817.906	1.760.275	1.760.278	1.719.386	1.502.800	1.720.196
3.	Kedelai	10.984	7.993	6.156	13.777	9.815	9.960
4.	Ubi Kayu	9.193.676	8.387.351	8.329.201	8.034.016	7.387.084	6.481.382

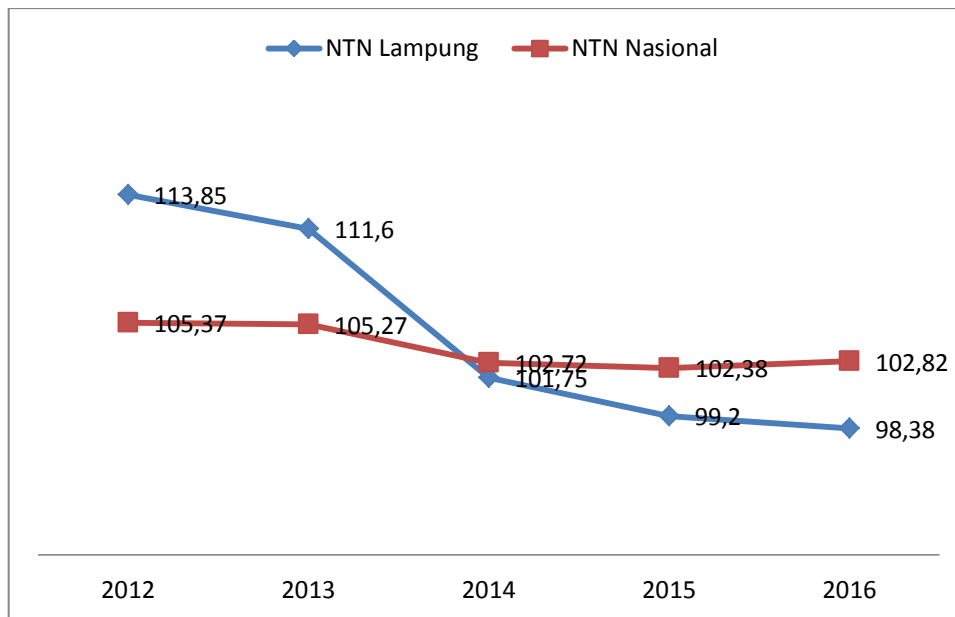
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Lampung

Berdasarkan angka tetap Dinas Pertanian tahun 2016, produksi padi di Provinsi Lampung sebesar 4.020.420 ton, lebih tinggi dari produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, dan Ubi Kayu. Dengan adanya kondisi ini, seharusnya petani di Lampung sudah dapat menikmati kemakmuran tetapi kenyataan di lapangan tidaklah demikian, hal ini karena petani tidak menguasai sistem pemasaran. Sistem pemasaran ini masih dikuasai oleh pedagang/pedagang pengumpul sehingga keuntungan masih dikuasai oleh pedagang pengumpul.

Nilai tukar nelayan (NTN) Nasional terus mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar 105,37 menjadi 102,8 di tahun 2016. Terjadi juga pada Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan secara signifikan dari Tahun 2012 sebesar 113,85 menjadi 98,38 di Tahun 2016.



**Gambar 48 Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Lampung dan Nasional**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Tahun 2017

Pada awal Tahun 2016 curah hujan di Provinsi Lampung diperkirakan berkurang akibat pengaruh El-Nino. Dampak El-Nino mengakibatkan curah dan intensitas hujan pada musim penghujan di Provinsi Lampung berkurang 40 hingga 80 persen dibandingkan musim penghujan sebelumnya. Dampak yang diakibatkan oleh badai tropis itu sangat signifikan karena curah dan intensitas hujan secara umum di Provinsi Lampung berkurang hingga 40 persen, bahkan di beberapa wilayah mengalami pengurangan curah hujan 80 persen dibandingkan musim penghujan sebelumnya. Akibat turunnya intensitas hujan tersebut akan sangat mempengaruhi pola tanam di Provinsi Lampung.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Provinsi Lampung untuk tahun 2016 telah ditargetkan sebesar 85,6 tapi realisasi hanya mencapai 75,08 atau 87,71% dari yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100.

**Tabel 21 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator PPH Ketersediaan dan Indikator Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2016**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan Ketersediaan Yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85,6	75,08	87,71
Penurunan Penduduk Pangan	Jumlah Persentase Penurunan Penduduk Rawan Pangan	1	0,43	43

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan penghitungan ketersediaan pangan tahun 2016 didapatkan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Provinsi Lampung menurut kelompok pangan sebagai berikut :

**Tabel 22 Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung Tahun 2016**

Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
	Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	1.876	66,54	78,2	0,50	33,27	39,09	25,00	<b>25,00</b>
Umbi-umbian	49	1,73	2,0	0,50	0,87	1,02	2,50	<b>1,0</b>
Pangan Hewani	128	4,55	5,4	2,00	9,11	10,70	24,00	<b>10,7</b>
Minyak & Lemak	155	5,51	6,5	0,50	2,75	3,23	5,00	<b>3,2</b>
Buah/Biji Berminyak	58	2,04	2,4	0,50	1,02	1,20	1,00	<b>1,0</b>
Kacang-kacangan	20	0,69	0,8	2,00	1,39	1,63	10,00	<b>1,6</b>
Gula	224	7,96	9,3	0,50	3,98	4,67	2,50	<b>2,50</b>
Sayur dan Buah	309	10,97	12,9	5,00	54,85	64,44	30,00	<b>30,00</b>
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.819</b>	<b>100</b>	<b>117,5</b>		<b>107,24</b>	<b>125,98</b>	<b>100</b>	<b>75,08</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan didominasi oleh kelompok pangan padi-padian 66,54%, kelompok sayur/buah 10,97%, kelompok gula 7,96%, kelompok minyak dan lemak 5,51%, kelompok pangan

hewani 4,55%, kelompok umbi-umbian 1,73% serta diikuti oleh kelompok kacang-kacangan dengan kontribusi energi sebesar 0,69%.

Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan belum seluruhnya mencapai skor maksimum, dan berdampak tidak seimbang ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan. Ada beberapa kelompok pangan yang ketersediaannya berlebih dan yang ketersediaannya kurang dikarenakan produksi untuk kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.

Indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan untuk Tahun 2016 tidak mencapai target, penurunan penduduk miskin pada tahun 2016 hanya terealisasi sebesar 0,43% sedangkan target nasional tahun 2016 untuk indikator penurunan penduduk rawan pangan sebesar 1%.

Pencapaian target penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% belum tercapai dikarenakan kemiskinan terdiri dari banyak faktor yang mempengaruhi dan harus diselesaikan secara lintas sektoral. Selain itu kemiskinan juga berhubungan erat dengan tingkat pengangguran, karena terkait dengan pendapatan penduduk (faktor ekonomi) dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan tabel penyebaran penduduk miskin Tahun 2012-2016, jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan serta perkembangan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2012-2016 cenderung turun.

Dalam Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) telah dikelompokkan empat prioritas, yaitu Prioritas 1 (merah tua), Prioritas 2 (merah muda), Prioritas 3 (hijau muda) dan Prioritas 4 (hijau tua). Kelompok desa yang cenderung paling rentan berada di prioritas 1 dan prioritas 4 merupakan kelompok desa yang cenderung paling tahan.

## 1. Ketersediaan Pangan

Secara konseptual, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan termasuk didalamnya bantuan pangan bila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Indikator ketersediaan pangan adalah: (1) Rasio Warung terhadap Rumah Tangga, dan (2) Rasio Toko terhadap Rumah Tangga.

Rasio warung (kedai makanan dan minuman) terhadap rumah tangga menjadi salah satu indikator karena warung adalah usaha pangan siap saji di bangunan tetap dan pembeli biasanya tidak dikenai pajak serta diasumsikan juga sebagai salah satu tempat penyimpanan atau penyedia pangan (stok) pangan di suatu wilayah (desa). Untuk rasio jumlah warung/kedai makanan dan minuman terhadap jumlah rumah tangga di 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung terdapat 880 desa berada di prioritas 1 dan 453 desa di prioritas 2, demikian pula untuk rasio toko terhadap rumah tangga terdapat 657 desa berada pada Prioritas 1 dan di Prioritas 2 sebanyak 663 desa. Dari uraian diatas memiliki arti bahwa pada daerah tersebut masih rentan terhadap ketersediaan pangan atau tingkat ketersediaan pangan di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan.

## 2. Akses Pangan

Aspek akses pangan atau keterjangkauan pangan merupakan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara keenamnya. Ketersediaan pangan di suatu daerah pada umumnya berada dalam kondisi cukup, namun tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan.

Aspek akses pangan diukur berdasarkan indikator : (1) Rasio penduduk dengan status kesejahteraan terendah; (2) Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; (3) Pekon/desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai.

Indikator pertama pada akses pangan adalah Rasio Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah, diperoleh dari Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 yang dikoordinasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan pengolahan data oleh Tim FSVA diperoleh hasil bahwa rasio penduduk dengan status kesejahteraan terendah masih terdapat 652 desa berada di prioritas 1 dan 659 desa di prioritas 2 yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Indikator kedua adalah Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik. Akses rumah tangga terhadap listrik merupakan suatu indikator pendekatan yang baik untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi, peningkatan peluang penghidupan suatu daerah dan peluang bagi kondisi kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Rumah tangga tanpa akses listrik dimaksudkan adalah jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama bukan listrik.

Berdasarkan Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik masih terdapat 643 desa di prioritas 1 dan 644 desa di prioritas 2. Secara umum, tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dan roda perekonomian akan lebih berkembang. Dengan demikian hal ini juga menjadi salah satu indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga. Semakin meningkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah maka kemampuan akses masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan semakin baik pula.

Indikator ketiga adalah Desa Yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai. Kekurangan akses terhadap infrastruktur menyebabkan "kemiskinan lokal", dimana masyarakat tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk, sehingga kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai serta tidak atau masih kurang dalam mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Selain itu, jika suatu daerah telah memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih maka dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut memiliki jalur distribusi pangan yang normal sehingga harga pangan pun relatif terjangkau.

Berdasarkan Desa Yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai terdapat di 40 desa prioritas 1 dan 92 desa Prioritas 2 yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

### 3. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan meliputi: a) Pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga, dan b) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi (pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya, atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain lain) dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga. Aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Rasio Anak Tidak Bersekolah;
2. Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih;
3. Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk;
4. Rasio Rumah Tangga Tanpa Fasilitas BAB (Buang Air Besar).

Semakin tinggi rasio jumlah anak yang tidak bersekolah terhadap jumlah anak (jumlah anak bersekolah dan tidak bersekolah usia 7-15 tahun) di suatu desa menjadi salah satu indikasi yang menggambarkan tingkat

pemanfaatan pangan yang rendah di desa tersebut. Hal ini terkait pengetahuan akan pangan dan gizi yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan wilayah lain dengan tingkat partisipasi anak sekolah yang lebih baik. Berdasarkan Rasio Anak Tidak Bersekolah terdapat 650 desa di prioritas 1 dan 659 desa di prioritas 2.

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi: air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, Penampungan Air Hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk: air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih adalah rumah tangga dengan sumber air tidak layak minum yaitu sumber air tidak terlindungi, terdiri atas (a) sumur tak terlindungi; (b) mata air tak terlindungi; (c) sungai/danau/waduk; (d) air hujan. Berdasarkan Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih masih terdapat 652 desa prioritas 1 dan 659 desa prioritas 2.

Tenaga kesehatan berperan dalam menurunkan angka kesakitan (morbiditas) penduduk dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan bergizi seimbang. Dengan demikian akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyerap makanan ke dalam tubuh dan memanfaatkannya. Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan tingkat pemanfaatan pangan masyarakat. Tenaga kesehatan terdiri atas: (1) Dokter Umum/Spesialis; (2) Dokter Gigi; (3) Bidan; (4) Tenaga Kesehatan lainnya (apoteker/asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, perawat). Berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk terdapat 657 desa di prioritas 1 dan 662 di prioritas 2.

Keberadaan fasilitas BAB pada rumah tangga menjadi salah satu indikasi bahwa sanitasi di rumah tangga tersebut cukup memadai. Dengan sanitasi yang baik, akan menjaga dan meningkatkan kesehatan sehingga pemanfaatan pangan di rumah tangga tersebut akan lebih baik. Berdasarkan rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) terdapat 644 desa di prioritas 1 dan 585 desa di prioritas 2.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan sembilan indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan, serta pemanfaatan pangan. Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (desa) disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan dan dikelompokkan ke dalam empat prioritas: Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3 dan Prioritas 4. Prioritas 1 dan 2 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 3 dan 4 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah pada prioritas 3-4 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Pekon/desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 yang terdapat di Provinsi Lampung sebagaimana pada tabel di bawah ini:

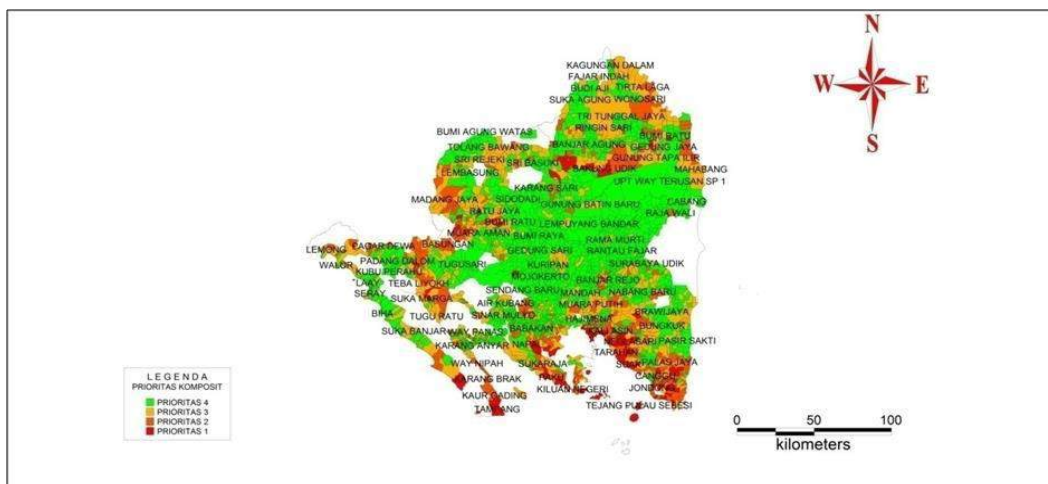


**Tabel 23 Ketahanan Pangan Berdasarkan Analisa Pembobotan Komposit**

NO	KABUPATEN	PRIORITAS				Grand Total
		1	2	3	4	
1	BANDAR LAMPUNG			2	124	126
2	LAMPUNG BARAT	5	22	44	65	136
3	LAMPUNG SELATAN	52	83	84	41	260
4	LAMPUNG TENGAH	1	1	15	290	307
5	LAMPUNG TIMUR		11	67	186	264
6	LAMPUNG UTARA	2	6	43	196	247
7	MESUJI		16	43	46	105
8	METRO				22	22
9	PESAWARAN	7	33	53	51	144
10	PESISIR BARAT	4	15	43	56	118
11	PRINGSEWU	5	11	28	87	131
12	TANGGAMUS	9	39	97	157	302
13	TULANG BAWANG BARAT	6	13	27	50	96
14	TULANGBAWANG	5	21	38	87	151
15	WAY KANAN	5	41	90	87	223
<b>Grand Total</b>		<b>101</b>	<b>312</b>	<b>674</b>	<b>1545</b>	<b>2632</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, 2017

**Gambar 49 Peta Ketahanan Pangan Berdasarkan Analisa Komposit**



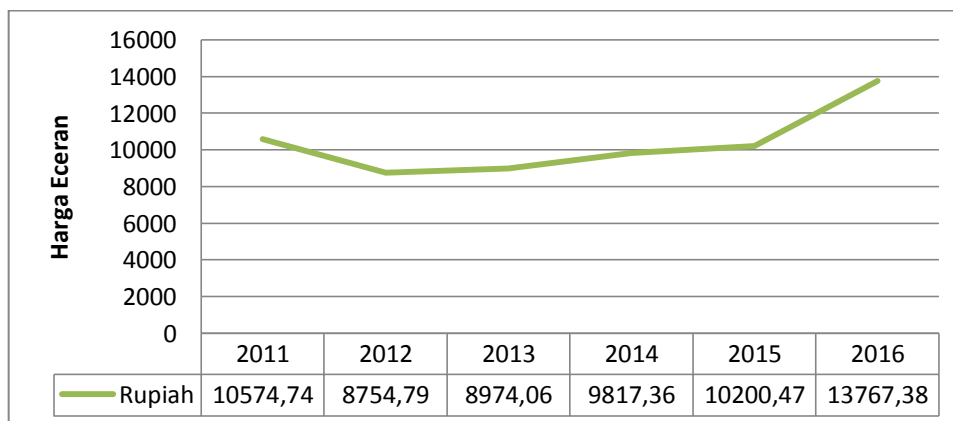
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, 2016

Faktor yang menyebabkan desa-desa tersebut menjadi rawan terhadap kerentanan pangan disebabkan oleh:

1. Tingginya rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan rata rata 0,2004 diasumsikan bahwa terdapat 2-4 rumah tangga dari 10 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
2. Tingginya rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dengan rata rata data rasio sebesar 0,0831 diasumsikan bahwa terdapat 7-8 rumah tangga dari 10 rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi yang baik.
3. Tingginya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dengan rata rata 0,0369 diasumsikan terdapat 3-4 rumah tangga dari 10 rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih.
4. Tingginya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dengan rata rata 0,2450 diasumsikan bahwa terdapat 3-4 rumah tangga dari 10 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

### ***Rata-rata Harga Beras***

**Gambar 50 Rata-rata Harga Beras, 2011 - 2016**

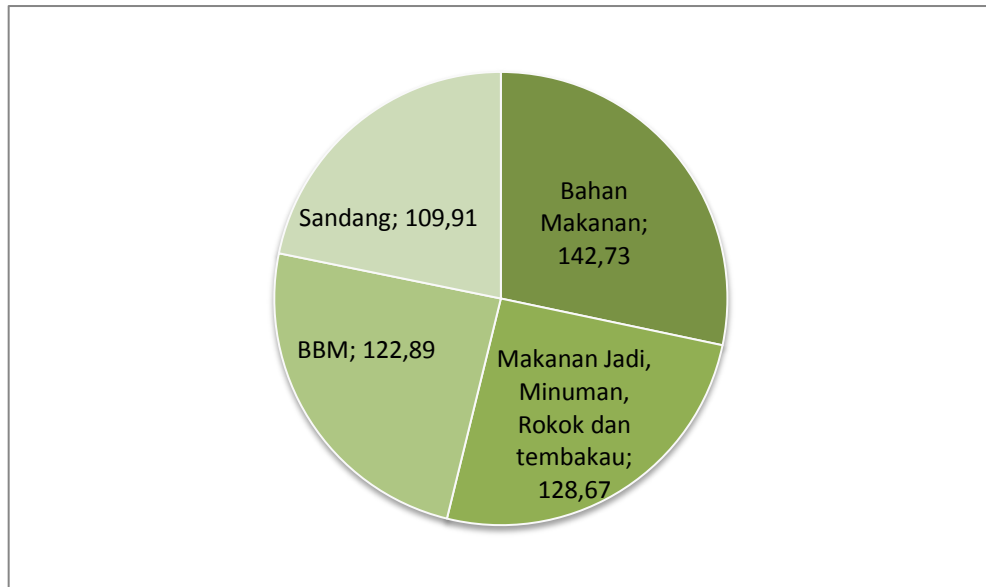


*Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017*

Harga rata-rata beras di Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. BPS Provinsi Lampung mencatat kenaikan beras setiap tahunnya. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, bukan berarti terjadi kelangkaan beras di pasaran. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan

Lampung dalam swasembada beras, bahkan mengekspor ke beberapa daerah lain seperti DKI Jakarta.

**Gambar 51 Harga Barang Kebutuhan Pokok**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

INDIKATOR	TARGET 2016 (RPJMD)	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	STATUS
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,91	101,65	104,18	●
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113,86	102,82	98,38	▼
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,00	86,2	75,08	▼

● = tercapai ▼ = sulit tercapai pada tahun 2016 (tidak tercapai)

## **BAB 3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **3.1 Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan**

Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki regulasi daerah tentang penanggulangan kemiskinan. Tetapi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung tertuang dalam:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- b. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Perintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 tanggal 19 Juni 2015.
- c. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/458/VI.01/HK/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Lampung nomor G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung..
- d. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/523/VI.01/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016
- e. Nota Kesepahaman Nomor 17/PFM/NK/08/2016, Nomor 414292.41/DTPFM/VI/2016, Nomor G/499/II.02/HK/2016 Antara Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemerintah Provinsi Lampung
- f. Surat Nomor 050/0202/II.02/2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi TKPK se Provinsi Lampung oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung.

Kemiskinan merupakan permasalahan Provinsi Lampung yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan

yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Provinsi Lampung yang menangani penanggulangan kemiskinan. Dengan telah diberlakukannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/458/VI.02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2016, maka Peraturan Gubernur tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Keputusan Gubernur ini bertolak dari kemelut kemiskinan yang dihadapi sebagian masyarakat Provinsi Lampung. Menurut data statistik, jumlah orang miskin di Provinsi Lampung dari hari ke hari menurun, tapi derajat kemiskinan justru semakin meningkat, karena program penanggulangan kemiskinan tidak menyentuh langsung hak-hak dasar kelompok miskin. Khusus di tingkat Provinsi, banyak pihak telah menerapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), namun dari 15 kab/kota di Provinsi Lampung, baru Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan dan Kota Metro yang menyusun SPKD. Alasan klasik dari daerah lain adalah karena belum adanya anggaran. Kebijakan anggaran menjadi faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional. Diharapkan Keputusan Gubernur ini nantinya dapat ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten dan Kota. Kita berharap konsep dan analisis bersama tentang penanggulangan kemiskinan yang sedang kita galakkan saat ini dan dapat diterapkan di daerah masing-masing.

Upaya penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi sebuah keniscayaan jika tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, mengingat pemerintah daerah merupakan motor penggerak utama dalam era otonomi daerah saat ini. Peran pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui TKPK Kabupaten/Kota. Peran TKPK menjadi semakin penting, mengingat kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan maupun ujung tombak pemerintah provinsi di daerah. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Daerah perlu tetap dijaga agar berkelanjutan sehingga kinerja penanggulangan kemiskinan maupun penguatan kelembagaannya dapat diaplikasikan dan dirasakan oleh masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat/swasta. Selain itu pensasaran program juga diperlukan agar program dapat diterima oleh wilayah miskin, tertinggal, rumah tangga, ataupun keluarga yang berhak dalam jumlah yang tepat.

Basis Data Terpadu (BDT) dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan kemiskinan, menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah, dan menentukan penerima manfaat. Pengalokasian anggaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari dana APBN, APBD, dan CSR.

Terkait hasil Audit Dukungan atas Audit Operasional Pengentasan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri pada Kementerian Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan koordinasi dengan BPKP Provinsi Lampung terdapat surat Wakil Gubernur yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota untuk pelaksanaan penaggulangan kemiskinan tahun 2010-2016 yang membahas mengenai data BDT, revisi struktur, finalisasi seluruh SKPD dalam memanfaatkan data BDT serta rapat koordinasi secara berkesinambungan diharapkan dengan adanya audit tersebut data BDT yang telah berjalan di tahun 2016 dapat dikembangkan pada tahun 2017.

Selain itu salah satu Kabupaten Di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Tanggamus menjadi Pilot Project pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sejak tahun 2016 yang menjadi lokusnya ada 5 pekon yaitu Pekon Gisting Bawah, Pekon Negeri Agung, Pekon Batu Keramat, Pekon Negara Batin, dan Pekon Banyu Urip.

### **3.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan**

Sebagai upaya penurunan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Pada dasarnya isu tentang kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah menjadi persoalan mendasar bagi bangsa Indonesia. Berbagai program dalam pembangunan telah dilaksanakan baik di tingkat Pusat, Regional, maupun Daerah, akan tetapi hasil dari penurunan tingkat kemiskinan masih jauh dari harapan. Esensi dari sebuah program pengentasan kemiskinan adalah membantu masyarakat miskin agar memiliki kemampuan berusaha dan mandiri dari segi ekonomi, sehingga program kemiskinan Evaluasi Kinerja Program Anti Kemiskinan, seharusnya bersifat komprehensif dan ditujukan langsung ke akar permasalahan dari kemiskinan.

Penanganan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan berupaya menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dari tahun ketahun. Melihat kondisi tersebut, diperlukan perhatian khusus dan upaya terus menerus dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu program prioritas penanggulangan kemiskinan yaitu dengan mendukung kegiatan melalui alokasi dana pendamping (*cost sharing*) Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*). Konsep dasar adalah pemberdayaan usaha ekonomi produktif Kelompok Masyarakat Miskin.

Kelompok Masyarakat (Pokmas) mendapat bantuan sarana dan prasarana Produksi dari Pemerintah.

**Tabel 24 Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga, dan Rumah Tangga (Klaster I), 2016**

	Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
NASIONAL	PKH (2016)	APBN	20 Kec.	124 Desa	29,579,783,420	Dinas Sosial
	Kartu Keluarga Sejahtera	APBN	Keluarga Miskin	559.755		Kementerian Sosial
	BOS	APBN	Siswa		1.368.613.450.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BPJS Kesehatan (2016)	APBN	Kepala Keluarga	573.955		BPJS Kesehatan Prov.Lampung
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya	APBN	Masyarakat Miskin		2.570.309.000	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	Pembinaan Kesehatan Keluarga	APBN	Keluarga		3.870.273.000	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	Pelayanan Kesehatan	APBN	Masyarakat Miskin		7.891.832.000	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	APBN	Masyarakat		1.188.289.000	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	RASKIN (2016)	Beras	Keluarga Miskin	6.887.448 RTS-PM	165.298.720.000	Biro Perekonomian/BULOG
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	APBD	Masyarakat Miskin	15 Kab/Kota	22.277.044.464	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD	Ibu Hamil dan Balita	13 Kab/kota	5.125.421.300	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung



DAERAH	Program Obat & Perbekalan Kesehatan	APBD	Masyara kat Miskin	15 Kab/Kota	8.065.968.380	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	APBD	Masyara kat Miskin	15 Kab/Kota	8.374.424.150	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	Program Upaya Kesehatan Perorangan	APBD	Masyara kat Miskin dan Umum	Kab/Kota	38.334.820.671	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan Dan Penanganan Trafficking, Kdrd Dan Korban Pelecehan Seksual	APBD	13 Kab		2.497.500.000	Badan PP dan PA
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	APBD	Perempu an dan anak	Kab/Kota	600.000.000	Badan PP dan PA
	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan anak	APBD	Perempu an dan Anak	Kab/Kota	1.260.000.000	Badan PP dan PA
	Program Pembanguna Jalan dan Jembatan	APBD	Infrastru ktur Masyara kat		318.272.350.500	Bina Marga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APBD	Anak- Anak		8.625.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APBD	Masyara kat Miskin		48.312.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Menengah	APBD	Masyara kat Miskin		44.094.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Program Pendidikan Luar Biasa	APBD	Masyarakat Miskin		500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	APBD			3.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	APBD			29.592.775.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Kegiatan Belajar Mengajar	APBD			4.794.631.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	APBD	Masyarakat umum	4 Kab.	140.052.470	Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 25 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas,  
(Klaster 2)**

	<b>Program</b>	<b>Jenis Transfer</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Jumlah Penerima Manfaat</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>	<b>Lembaga Pelaksana</b>
<b>NASIONAL</b>	P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	APBN	13 Kab	Desa	1.536.762.050.125	BPMPD
<b>DAERAH</b>	Gerbang Desa Saburai	APBD	Desa Tertinggal	100 desa di 13 Kab/Kota	30.000.000.000	BPMPD
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	APBD	Kecamatan		1.225.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	APBD	Kecamatan		1.850.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Kesejahteraan Perempuan	APBD	Perempuan	90 orang pelaku usaha ekonomi	1.540.000.000	Badan PP PA
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	APBD	Desa		2.695.000.000	BPMPD
	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	APBD	Desa		1.200.000.000	BPMPD
	Program peningkatan Masyarakat dalam membangun desa	APBD	Masyarakat		4.815.000.000	BPMPD

	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan	APBD			3.625.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi	APBD			500.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan	APBD			9.790.516.000	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	APBD			4.608.000.000	Badan Ketahanan Pangan Daerah
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	APBD	Kalpataru dan Adiwiyata	Kab/Kota	92.709.935	Dinas Lingkungan Hidup
	Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	APBD	3 Lokasi	3 Lokasi	171.242.500	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Budidaya Perikanan	APBD	Kab/Kota	36 paket	753.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Tabel 26 Program Pemberdayaan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil**

	Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
NASIONAL	Kredit Usaha Rakyat (2016)	APBN	UMKM		2.190.000.000.000	Bank Indonesia
	Kelompok Usaha Bersama	APBN	Desa dan Kota	25 KUBE	500.000.000	Dinas Sosial
DAERAH	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	APBD	UMKM	15 Kab/Kota	128.680.000	Dinas Koperasi dan UMKM
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	APBD	UMKM		3.090.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM
	Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	APBD	UMKM		1.355.000.000	Dinas Perdagangan
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	APBD	Desa		1.200.000.000	BPMPD
	Program Pengembangan Kewirausahaan	APBD			375.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	APBD	UMKM		390.000.000	Dinas Perindustrian
	Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	APBD			735.526.400	Dinas Perindustrian
	Program Struktur dan Peningkatan kemampuan teknologi Industri	APBD			735.526.4000	Dinas Perindustrian

Kebijakan Provinsi Lampung yang mampu menjawab masalah kemiskinan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan adalah dengan

membuka kemungkinan golongan miskin untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan itu sendiri. Dengan adanya kebijakan tersebut maka upaya untuk meningkatkan akses penduduk miskin agar dapat memperoleh, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya yang tersedia. Sebagai salah satu langkah penanggulangan kemiskinan maka proses partisipasi masyarakat paling tidak ada empat tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta monitoring dan evaluasinya. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari: keterlibatan mental dan emosi, kesediaan memberi sumbangan/atau sukarela membantu, dan adanya tanggung jawa oleh seluruh SKPD Provinsi Lampung. Dari sisi perencanaan harus disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019, pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam tabel diatas telah dilaksanakan oleh SKPD masing-masing dan di monitoring oleh Inspektorat serta Bappeda selaku tim perencanaan.

Sinkronisasi dan sinergi antar program kemiskinan terlihat antara Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan yang berkaitan antara sektor Tenaga Kerja dan Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi, hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat dikatakan miskin berarti pengangguran tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan pengangguran merupakan situasi yang disebabkan oleh faktor orang-orang yang bekerja di bawah kapasitas optimalnya (pengangguran terselebung), dan faktor orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapat lapangan pekerjaan sama sekali (pengangguran penuh). Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan melakukan distribusi pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja berupah memadai bagi kelompok-kelompok masyarakat yang miskin. Dengan adanya upaya perluasan lapangan kerja maka perlu mendapat dukungan dari berbagai tindakan kebijakan dan regulasi baik di bidang ekonomi maupun sosial yang berjangkauan lebih jauh lagi. Oleh karena itu, masalah ketanagakerjaan harus senantiasa diperhitungkan sebagai salah satu unsur utama dalam setiap

perumusan strategi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kepada usaha penanggulangan kemiskinan.

Komplementaritas antar program nasional dan program pemerintah Provinsi dapat dilihat pada Program Pemberdayaan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil, Program Nasional Kredit Usaha Rakyat (2016) dan dilanjutkan pada program Pemerintah yaitu Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM dan Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tujuan sasaran yang sama yaitu UMKM.

Khusus untuk program sektoral bidang Pendidikan tahun 2016 telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Manajemen Pelayanan Pendidikan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana SMP/MTs sebanyak 11 gedung, SMA/SMK sebanyak 50 gedung yang seluruhnya tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

### **3.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan**

#### **3.3.1 Analisis Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah

Merujuk pada data histori perkembangan perekonomian daerah dan pendapatan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, tampak bahwa

Perekonomian Daerah dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menunjukkan Tren yang meningkat. Perkembangan realisasi pendanaan pembangunan Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2013 – 2016 dari berbagai sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 27 APBD Provinsi Lampung menurut Pendapatan**

Komponen	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Pendapatan Asli Daerah	45,5 persen	50,6 persen	49,9 persen	45,8 persen
Dana Perimbangan	35,4 persen	32,3 persen	33,7 persen	34,0 persen
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19,1 persen	17,1 persen	16,5 persen	20,2 persen

*Sumber: RKPDP Provinsi Lampung, 2016*

Selama kurun waktu tahun 2013 – 2016 sumber dana pembangunan APBD Provinsi Lampung secara persentase cenderung berimbang proporsinya baik dari sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah maupun dari kemampuan pendapatan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan PAD masih relatif kecil dibandingkan dana perimbangan. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu:



- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Operasionalisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; dan
- e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

Perhatian kepada sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah mempunyai arti penting karena dengan semakin besarnya penerimaan daerah dari sumber-sumber tersebut dapat dijadikan ukuran yang menunjukkan kemandirian daerah untuk membangun wilayahnya atas kekuatan sendiri. Penerimaan daerah tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan berpengaruh secara langsung terhadap sisi permintaan agregat yang kemudian dapat mendorong peningkatan sisi penawaran agregat dalam perekonomian daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah di satu sisi menunjukkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan kemandirian daerah, namun di sisi yang lain jika tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada pelaku usaha di daerah dan dalam kondisi lain dapat menyebabkan terjadinya capital flight pada tataran regional.

Sejalan dengan hal tersebut dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional. Hingga saat ini rasio penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan regional masih berada pada kisaran lebih dari lima persen sehingga potensi pajak dan retribusi yang tersedia masih cukup besar.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah akan diterapkan pada pos-pos pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kelompok objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun 2016 sebesar 45,8 persen yang di peroleh dari pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh, oleh karena itu pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja, hal ini dapat membantu penarikan yang datang langsung kepada wajib pajak dengan sistem *door to door*. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan agar tidak memakan waktu yang banyak, mengingat jangkauan wilayah yang sangat luas. Pajak dan retribusi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem penarikan dan pengelolaan, perbaikan sistem dan pengelolaan diharapkan akan mampu menambah jumlah pajak dan retribusi daerah. Perbaikan sistem dan pengelolaan akan meminimalisir penghambatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Lampung dari tahun 2016 terjadi penurunan pada komponen pajak daerah sebesar 89,9 persen, namun mengalami peningkatan pada realisasi pendapatan tahun 2016 pada komponen lain-lain pendapan asli daerah yang sah pada angka 8,5 persen.

Kinerja positif Pemerintah Provinsi Lampung dalam merealisasikan APBD tahun 2013 sampai tahun 2016 berdampak positif dalam menurunkan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Provinsi Lampung yang menjadi persoalan klasik dalam manajemen pembangunan di Provinsi Lampung selama ini.

**Tabel 28 Komponen Pendapatan Asli Daerah Lampung**

Komponen	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Pajak Daerah	86,8 persen	84,3 persen	90.6 persen	89.9 persen
Hasil Retribusi Daerah	0,6 persen	0,4 persen	0.3 persen	0.3 persen
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,4 persen	1,1 persen	1.1 persen	1.0 persen
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,2 persen	14,1 persen	7.9 persen	8.5 persen

*Sumber: RKPD Provinsi Lampung, 2015*

Pajak daerah Tahun 2016 sebesar 89.9 persen merupakan komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus terus ditingkatkan. Prosentasi kenaikan tarif pajak daerah bukan merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pendapatan karena kenaikan tarif pajak daerah akan memberatkan wajib pajak dan mematikan sektor ekonomi. Jumlah pendapatan dari pajak daerah dapat ditingkatkan dengan mengawasi penarikan yang lebih baik. Contohnya pajak parkir, jumlah pajak parkir sebetulnya sangat banyak tetapi kurang dimaksimalkan sehingga perolehan tidak dapat ditingkatkan.

Retribusi daerah Tahun 2016 sebesar 0.3 persen mempunyai jumlah yang besar akan tetapi tingkat pengaruh lebih kecil dibanding pajak daerah. Walaupun pengaruhnya lebih kecil bukan berarti retribusi tidak penting, retribusi harus tetap ditingkatkan melalui penerimaan-penerimaannya

karena retribusi tetap mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

### 3.3.2 Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung

**Tabel 29 Kapasitas Fiskal APBD Provinsi Lampung, 2016**

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Belanja	
1	Provinsi Lampung	Rp	5,350,902,785,048.00
2	Bandar Lampung	Rp	2,354,274,575,476.53
3	Lampung Tengah	Rp	2,445,789,404,337.00
4	Lampung Timur	Rp	2,065,766,324,750.50
5	Lampung Selatan	Rp	2,021,817,829,670.00
6	Lampung Utara	Rp	1,752,595,906,378.00
7	Tanggamus	Rp	1,584,555,595,823.16
8	Way Kanan	Rp	1,262,552,031,800.00
9	Pesawaran	Rp	1,197,246,237,042.00
10	Pringsewu	Rp	1,255,939,521,640.00
11	Tulang Bawang	Rp	1,300,100,468,042.00
12	Lampung Barat	Rp	1.065,843,599,101.00
13	Metro	Rp	872,090,692,722.00
14	Tulang Bawang Barat	Rp	916,251,642,215.00
15	Mesuji	Rp	823,930,855,939.00
16	Pesisir Barat	Rp	784,120,394,060.00
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>Rp</b>	<b>27,062,277,864,044.20</b>

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2017

**Tabel 30 Kapasitas Fiskal APBN Provinsi Lampung, 2016**

Kewenangan	Pagu
Dekonsentrasi	402.718.085.000
Tugas Pembantuan	1.013.749.600.000
Instansi Vertikal	7.625.882.610.000
Total	9.042.350.295.000

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2017

Berdasarkan tabel di atas maka kapasitas Fiskal APBD dan APBN Provinsi Lampung tahun 2016 sebesar Rp. 27,062 Trilyun terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dan diluar Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Lampung.

### **3.3.3 Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan**

Belanja daerah masih menjadi modal penting yang digunakan untuk pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung, terutama bagi 15 kabupaten/kota dalam menjalankan pemerintahannya, karena daerah Provinsi Lampung belum memiliki pendapatan lain yang besar dan hanya mengaharapkan pada belanja daerah. Oleh karena itu, semua daerah di Provinsi Lampung sangat tergantung pada belanja daerah khususnya adalah belanja modal yang menjadi bagian dari asset daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dalam membangun daerah masing-masing.

Prioritas utama dalam perekonomian adalah pembangunan yang dilakukan di semua sektor karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Optimalisasi dan prioritas belanja akan menumbuhkan perekonomian yang berdampak secara langsung terhadap pengurangan pengangguran dan mengatasi permasalahan kemiskinan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa apabila perekonomian meningkat maka daya serap angkatan kerja juga akan meningkat sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang dan kemungkinan besar dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di suatu daerah. Namun yang terjadi sekarang adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang semakin meningkat tetapi tidak di dukung oleh pertumbuhan lapangan kerja sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran semakin serius. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dan terus menunjukkan perbaikan selama beberapa tahun terakhir tidak berarti pekerjaan pemerintah telah selesai, kegiatan di sejumlah sektor khususnya di sektor riil masih di bawah kapasitas. Pertumbuhan ekonomi juga belum mampu menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, struktur belanja dalam APBD Provinsi Lampung terdiri atas kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 31 Belanja menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

Komponen	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Nominal (Rp)	%	Nominal (Rp)	%	Nominal (Rp)	%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.309.626,50</b>	<b>51,85</b>	<b>2.085.922,10</b>	<b>44,16</b>	<b>2.229.444,37</b>	<b>41,60</b>
Pegawai	109.214,90	4,73	117.219,16	5,62	103.174,82	4,62
Barang dan Jasa	1.274.956,92	55,20	1.248.404,81	59,85	1.059.030,94	47,51
Modal	925.454,68	40,07	720.298,12	34,53	1.067.238,59	47,86
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.144.560,81</b>	<b>48,15</b>	<b>2.637.268,60</b>	<b>55,84</b>	<b>3.129.958,41</b>	<b>58,40</b>
Pegawai	544.114,85	25,37	771.913,78	29,27	833.658,22	26,62
Hibah	847.424,32	39,52	807.523,43	30,62	1.125.000,00	35,95
Bantuan Sosial	4.521,80	0,21	9.700,00	0,37	6.000,00	0,19
Dana Bagi Hasil	723.095,81	33,72	100.000,00	37,92	1.100.000,00	35,15
Bantuan Keuangan	20.173,87	0,94	25.642,60	0,97	31.750,00	0,99
Belanja Tidak Terduga	5.230,16	0,24	22.488,79	0,85	33.550,19	0,10

Sumber: RKPDP Provinsi Lampung, 2017

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan konkuren yang merupakan urusan wajib dan urusan pilihan. Berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk implikasi terhadap penganggaran belanja pemerintah daerah. Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, bahwa pada Maret 2016 Pemerintah Provinsi Lampung selesai melaksanakan inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren. Sementara itu, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dilaksanakan sebelum Oktober 2016. Di sisi belanja, penyelesaian P3D perlu ditindaklanjuti dengan penambahan alokasi anggaran.

Program Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Lampung. APBD Provinsi Lampung dipergunakan untuk fasilitasi paket bantuan/sarana produksi bagi Kelompok Masyarakat Keluarga Miskin (Pokmas Gakin), dana pembiayaan/pinjaman bagi Mitra Usaha, operasional Tim Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi. *Cost Sharing* APBD Provinsi Lampung dipergunakan untuk membiayai operasional Tim Koordinasi/Tim Teknis Kabupaten serta pembinaan untuk pelestarian dan pengembangan kegiatan.

Alokasi pendanaan yang telah diberikan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 sebesar 0,10 persen sebagaimana Tabel di atas atau sebesar Rp. 33.550.192.048,-. Berkaitan dengan jumlah alokasi pendanaan, dapat disampaikan bahwa anggaran yang ada masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan jumlah masyarakat miskin yang tertangani dan jumlah alokasi dana bantuan untuk masing-masing keluarga miskin masih sangat terbatas sehingga hasilnya kurang maksimal.

Pertumbuhan ekonomi Anggaran Belanja Provinsi Lampung yang akan menunjang perbaikan selama beberapa tahun ini tidak berarti bahwa

pekerjaan telah selesai. Tetapi perekonomian belum sepenuhnya pulih, kegiatan sejumlah sektor khususnya di sektor riil masih dibawah kapasitas yang seharusnya. Pertumbuhan ekonomi APBD Provinsi Lampung juga belum cukup untuk menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Tujuan akhir pertumbuhan ekonomi APBD Provinsi Lampung adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran serta berbagai permasalahan lain yang melanda Provinsi ini.

Pengaruh belanja dan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran pada APBD Provinsi Lampung. Dan hasil penelitian itu menunjukkan pembelanjaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif pada kemiskinan. Dan belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) merupakan kekayaan provinsi yang dikelola langsung oleh pemerintah. Pengurusan APBD termasuk dalam pengurusan umum/administratif meliputi hak penguasaan serta perintah menagih dan perintah membayar. APBD Provinsi Lampung sebagai inti pengurusan umum merupakan anggaran negara yang terdiri atas rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja Negara untuk suatu periode tertentu.

Salah satu dasar pertimbangan yang melandasi kebijakan umum APBD Perubahan Tahun 2016 adalah mobilisasi kapasitas fiskal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk masalah penanggulangan kemiskinan ada program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pada program Pendidikan Menengah, anggaran paling banyak digunakan untuk kegiatan Penyediaan bantuan operasional sekolah SD/MI, SDLB/SLB, SMP/MTs, SMA dan penyediaan bantuan pembangunan gedung Ruang Belajar SMP/MTs sebanyak 11 gedung, SMA/SMK sebanyak 50 gedung



di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang diambil dari anggaran belanja modal tahun 2016 sebesar 47,86 persen.

Untuk program Pendidikan Non Formal digunakan anggaran lebih banyak pada kegiatan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dimana kegiatan ini menunjang untuk mengurangi angka putus sekolah dan buta huruf di Provinsi Lampung. Secara rata-rata keseluruhan total anggaran belanja langsung menurun di tahun 2014-2016, dan belanja tidak langsung naik di tahun 2014-2016. Alokasi anggaran ini relevan dengan capaian APK dan APM jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA yang mengalami penurunan. Pada tahun 2016 alokasi anggaran pada program kegiatan yang menunjang tercapainya APK dan APM ini kembali meningkat khususnya pada Dinas Pendidikan.

Persentase Belanja Bantuan sosial sebesar 0,19 memang dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan seperti aset daerah, infrastruktur, sarana dan prasarana dasar di daerah. Oleh karena itu peran kedua jenis belanja ini sangat penting sebab jika belanja bantuan sosial dan belanja modal disalurkan tepat sasaran dan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

## **BAB 4. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **4.1 Kelembagaan TKPK**

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Definisi penanggulangan kemiskinan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 lebih lanjut mengamanatkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Sementara itu arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi Lampung yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor G/458/VI.02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2016

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung tersebut, TKPK Provinsi Lampung memiliki tugas:

- a. Mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- b. Mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

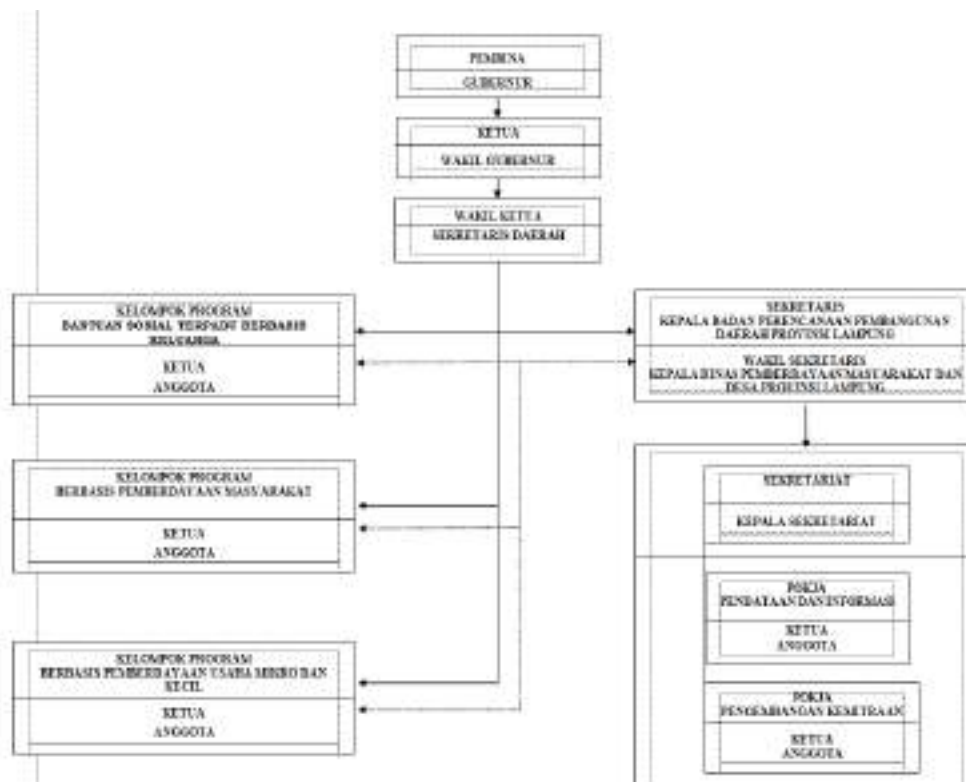
Selanjutnya disebutkan bahwa fungsi dari TKPK Provinsi Lampung adalah:

- a. Pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam kelembagaan TKPK Provinsi Lampung, Ketua TKPK Provinsi Lampung adalah Wakil Gubernur Lampung, Wakil Ketua TKPK Provinsi Lampung adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan dalam pelaksanaannya dibentuk sebuah tim kesekretariatan (*clearance house*) yang diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung.

Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung mewujudkan adanya harmonisasi dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan di berbagai program dan kegiatan, serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna.

**Gambar 52 Bagan Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung**



*Sumber: Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung, 2017*

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Kesekretariatan TKPK Provinsi Lampung telah membentuk Sekretariat TKPK yang berlokasi di kompleks Kantor Bappeda Provinsi Lampung. Sekretariat TKPK mempunyai ruangan sendiri diruangan salah satu bagian di Bappeda Provinsi Lampung.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi TKPK Provinsi Lampung, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas Pokja Pendataan dan Informasi dan Pokja Pengembangan Kemitraan. Agar program-program yang disusun dapat lebih tersegmentasi dan terpetakan, maka dibentuk kelompok program yang mendukung klaster-klaster penanggulangan kemiskinan yaitu kelompok program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. Dalam pelaksanaan di lapangan TKPK Provinsi Lampung bukan hanya

beranggotakan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, namun juga melibatkan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur Lampung, swasta, akademisi, dan konsultan bidang pemberdayaan masyarakat.

Sekretariat TKPK sangat menunjang kegiatan Pokja dan kelompok Program di TKPK dalam menyusun program kerja yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir, menyusun laporan dan hasil pelaksanaannya.

Anggaran oprasional untuk kegiatan TKPK sudah ada tersendiri. Pembentukan Sekretariat TKPK Provinsi Lampung menyerap dana sebesar Rp 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dianggarkan oleh APBD Provinsi Lampung melalui DPA Bappeda Provinsi Lampung. Pada Tahun 2016 Bappeda Provinsi Lampung menganggarkan dana sebesar Rp 150.000.000,- untuk Kegiatan Fasilitasi Sekretariat TKPK Provinsi Lampung dan pada Tahun 2017 dianggarkan dana sebesar Rp 341.200.000,- untuk Kegiatan Penguatan Sekretariat TKPK Provinsi Lampung serta pemasangan sistem aplikasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 32 Dana yang dianggarkan untuk mendukung Sekretariat TKPK Provinsi Lampung**

APBD	Tahun 2015	Tahun 2016
Sekretariat TKPK	Rp 270.000.000,-	Rp 150.000.000,-

*Sumber : Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2017*

Persoalan kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan multidimensi dalam program lintas pembangunan dengan mensinergikan peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, terpadu, dan multidimensi, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung diarahkan kepada pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia.

Hak dasar manusia merupakan hak dasar yang wajib untuk dipenuhi untuk mewujudkan tingkat kehidupan manusia yang sejahtera dan bermartabat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung yang diarahkan untuk pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia sebagai berikut;

- a. Pemenuhan hak atas pangan;
- b. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan;
- c. Pemenuhan hak atas pelayanan pendidikan;
- d. Pemenuhan hak atas pekerjaan;
- e. Pemenuhan hak atas rumah;
- f. Pemenuhan hak atas tanah;
- g. Pemenuhan hak atas air bersih;
- h. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi;
- i. Pemenuhan hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- j. Pemenuhan hak rasa aman.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat TKPK sudah didukung dengan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) Provinsi Lampung.

Program Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan kewilayahan melalui Program Gerbang Desa Saburai.
- b. Pendekatan berdasarkan angka kemiskinan tertinggi dan Tingkat Kesejahteraan terendah (desil 1) serta program sasaran RT individu.

Selama ini, jika kita bicara soal kemiskinan, rujukan utama adalah angka-angka kemiskinan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menggunakan garis kemiskinan (GK) yang dimaknai sebagai suatu representasi jumlah uang minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makan-minum yang setara dengan 2200 kilokalori/kapita/hari dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya yang non-makanan. Konsep kemiskinan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ini juga disebut Kemiskinan Moneter. Data ini selalu

menjadi rujukan utama mengingat data tersebut selalu diperbaharui 2 (dua) kali dalam setahun (Maret dan September), namun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sampling dan tidak menampilkan data sasaran (*by name by address*). Di sisi lain, Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggunakan indikator-indikator kesejahteraan (seperti sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), tidak semata moneter (pendapatan), sebagai alat ukur kemiskinan.

BDT diperoleh dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dan terakhir diperbaharui di tahun 2015 (Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015). Meskipun menampilkan data sasaran (individu, rumah tangga, dan keluarga) yang jelas (*by name by address*), data BDT/PBDT tidak secara rutin *ter-update* (terbarui). Perbedaan indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS dan TNP2K menyebabkan data kemiskinan yang diterbitkan juga berbeda. Sebagai gambaran, data PBDT menyatakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung tahun 2015 adalah 3.206.269 individu/jiwa, di periode yang sama BPS menyatakan sebesar 1.100.680 individu. BDT yang dikelola oleh TNP2K, meskipun indikator dalam BDT adalah rumah tangga/keluarga miskin dan individu miskin namun BDT juga dapat diperluas dengan menempatkan desa sebagai sasaran (program kewilayahan). Pada tahun 2017 telah dikembangkan dengan sistem Sistem Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS).

Dengan kondisi demikian, keberadaan sistem informasi pemetaan data penduduk miskin menjadi keniscayaan untuk mengetahui kondisi kemiskinan wilayah, tingkat keparahan kemiskinan yang dialami, dan pihak-pihak penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima. Dan menjadi acuan bagi stakeholder penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan, khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah selaku *focal point* pengentasan kemiskinan di daerah.

Dalam perjalanannya, menghadapi berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal antara lain:

- a. Belum adanya sinergi sasaran program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Belum optimalnya fungsi TKPK dalam mengkoordinasikan serta mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan;
- c. Belum sepenuhnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah mengacu pada dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) serta belum dilakukannya pelaporan secara gradual;
- d. Adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2016 membuat OPD Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan tidak mampu menjalankan programnya dengan maksimal.

#### **4.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**

TKPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena tugas TKPK terkait dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPK Provinsi umumnya berupa rapat-rapat koordinasi. Namun demikian, di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Provinsi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non rapat, antara lain memfasilitasi data mengenai kemiskinan Provinsi Lampung dengan dibentuknya Sekretariat TKPK Provinsi Lampung di lingkungan kantor BAPPEDA Provinsi Lampung.

Arah Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016:

- a. Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 yang telah diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang berisi data by name by address penduduk miskin dan Pemerintah Provinsi Lampung sudah mensosialisasikan data tersebut kepada Kabupaten/Kota dan OPD



tingkat Provinsi untuk dijadikan prioritas penentuan sasaran dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan tahun 2017.

- b. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2016 yaitu peningkatan dan pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha; penguatan kelembagaan oleh TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan; serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat contohnya Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra).
- c. Program Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh OPD agar disinergikan dengan lokasi sasaran Program Gerbang Desa dengan memprioritaskan Kabupaten yang memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin tertinggi Tahun 2016, dengan tujuan agar target penurunan persentase penduduk miskin Provinsi Lampung sesuai RPJMD untuk tahun 2017 sebesar 12,32% dapat tercapai.
- d. Terkait pelaksanaan Program Gerbang Desa agar seluruh OPD lingkup Provinsi Lampung mendapatkan pembagian desa sasaran Gerbang Desa dengan pembagian berdasarkan tupoksi masing-masing OPD melalui arahan dari Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung dengan tujuan percepatan pelaksanaan Program Gerbang Desa di 380 desa tertinggal yang harus selesai pada Tahun 2018.
- e. Dukungan anggaran kepada OPD yang memiliki program penanggulangan Kemiskinan maupun program pendukung penanggulangan kemiskinan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dengan perincian tahun 2017 sebesar 12,32%, tahun 2018 sebesar 11,70% dan Tahun 2019 sebesar 11,10%.
- f. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung, akan dibentuk TIM Pengentasan Penanggulangan Kemiskinan Lampung (TP2KL) yang disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur dengan beranggotakan OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan maupun yang hanya memiliki program pendukung penanggulangan kemiskinan.

## **Rapat Koordinasi**

Rapat Koordinasi TKPK se-Provinsi Lampung juga diadakan beberapa pertemuan yang bersifat sektoral dan mendukung program penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Rapat Koordinasi TKPK se- provinsi Lampung dalam rangka evaluasi Program penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2015 dan sinkronisasi rencana Program penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2016 pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Ruang Rapat Bappeda Lantai III.
  - a. Permasalahan yang yang berkembang dalam rapat tersebut adalah:
    - Tren penurunan angka kemiskinan Provinsi Lampung dari Maret 2015 ke September 2015 sebesar 0,82%, sehingga persentase kemiskinan Provinsi Lampung naik 1 poin menempati urutan ke 4 terendah setelah Provinsi Bengkulu, Aceh, dan Sumatera Selatan, namun posisi tersebut masih berada di bawah rata-rata Indonesia.
    - Ada beberapa temuan LHP BPK RI yang perlu mendapat perhatian terhadap pengelolaan program penanggulangan kemiskinan Tahun 2010-2014 di Pemerintah Provinsi Lampung.
  - b. Sesuai dengan agenda diatas maka rencana tindak lanjut yang akan ditempuh adalah:
    - Merevisi struktur keanggotaan dan penjabaran tupoksi TKPK Provinsi sesuai Permendagri Nomor 42/2010;
    - Revitalisasi Sekretariat TKPK Provinsi;
    - Revitalisasi Pemanfaatan SIMPADU Penanggulangan kemiskinan sebagai pusat data dan informasi;
    - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi internal TKPK Provinsi dan TKPK Kab/Kota secara gradual

- Membentuk data basis tunggal intervensi program penanggulangan kemiskinan (bekerjasama dengan TNP2K) serta pelibatan dari berbagai sektor;
  - Pelibatan sektor (BUMN dan Swasta) melalui program CSR/PKBL perusahaan dalam program penanggulangan kemiskinan.
  - Optimalisasi TKPKD dalam mensinergikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan program Gerbang Desa Saburai;
  - Menyusun laporan Pelaksanaan LP2KD setiap Tahun;
  - Menyusun Dokumen SPKD khususnya untuk 8 (delapan) Kab/kota yang akan menyusun RPJMD;
  - Melakukan pelatihan/magang di TNP2K sebagai dasar untuk penyusunan SPKD Kab/Kota.
  - Finalisasi SPKD Provinsi di tahun 2016
2. Rapat Evaluasi dalam rangka evaluasi Pelaksanaan Gerbang Desa Saburai Tahun 2015 pada Hari Jumat Tanggal 29 Januari 2016 di Ruang Rapat Bappeda Lantai III.
- a. Permasalahan yang yang berkembang dalam rapat tersebut adalah:
    - Dalam pelaksanaa Program Gerbang Desa Saburai tahun 2015, secara teknis tidak terdapat permasalahan. Namun karena waktu pelaksanaan yang sangat singkat (3 bulan) menyebabkan progress kemajuan fisik di lapangan sedikit terlambat.
  - b. Sesuai dengan agenda diatas maka rencana tindak lanjut yang akan ditempuh adalah:
    - Berdasarkan hasil monitoring, Program Gerbang Desa dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan agar pelaksanaannya dapat optimal maka diperlukan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dengan Program Gerbang Desa Saburai.

3. Rapat Penguatan Tim Kapasitas TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada hari Selasa s.d Rabu tanggal 15 s.d 16 Maret 2016 di Ruang Rapat Bappeda Lantai I.

Workshop Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 2 hari. Peserta TKPKD Kabu/Kota se-Provinsi Lampung, Narasumber TNP2K.

- a. Rencana Tindak Lanjut dalam pembahasan ini adalah:

- Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab/ Kota berkewajiban menyusun dokumen SPKD sesuai dengan Permendagri nomor 42 Tahun 2010 serta dapat dijadikan referensi dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan lain-lain.
- TKPKD Kab/ Kota harus menyusun pelaporan dokumen LP2KD secara tepat waktu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan tahun berikutnya.

4. Rapat dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung pada Hari Jumat Tanggal 02 September 2017 di Ruang rapat asisten Setda Provinsi Lampung.

- a. Pointers yang didiskusikan adalah:

- Pembahasan rencana Pemanfaatan BDT sebagai dasar kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung;
- Mensinergikan program dan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017;
- Penyamaan persepsi implementasi UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

- b. Rencana Tindak Lanjut dalam rapat ini:

- Tingkat Provinsi :
  1. Komitmen untuk memanfaatkan data BDT sebagai basis data tunggal dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, dan menjadikan Desil I dan Desil II BDT sebagai sasaran utama penanggulangan kemiskinan.

2. Bappeda Provinsi Lampung selaku Sekretaris TKPK segera menyusun mekanisme validasi/pemutakhiran data maupun pengaduan masyarakat/pelaporan (SOP) serta menyiapkan sistem/server data kemiskinan di sekretariat TKPK Provinsi.
- Tingkat Kabupaten :
1. TKPK Kab/Kota ditunjuk sebagai pelaksana proses verifikasi data BDT.
  2. Mengalokasikan anggaran pada APBD Kab/kota tahun 2017 untuk penguatan kelembagaan TKPK (Keberadaan sekretariat, personil penanggung jawab, pengelola data/operator, dan sarana/prasarana pendukung; internet/software/sistem yang terintegrasi online untuk proses updating data).
  3. Hal yang menjadi fokus utama dalam sinergitas program dan kegiatan Provinsi dan Kab/kota tahun 2017 adalah peningkatan kinerja pelayanan publik, khususnya Kabupaten yang saat ini masih berada di zona kuning dan merah atau kurang memuaskan (ombudsman, 2015).
  4. Kab/kota diminta agar melakukan percepatan penetapan Perda tentang OPD berdasarkan hasil validasi dan pemetaan urusan di masing-masing Pemerintah Daerah.
5. Rapat dalam rangka menjalin sinergi bersama dunia usaha dan menjangkir masukan dalam percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung Hari Senin tanggal 5 September 2016 di Ruang Rapat Bappeda Lantai I :
- Rekomendasi yang berkembang dalam rapat tersebut adalah:
- a. Usulan Perabiz untuk membentuk Tim Task Force dimungkinkan diluar struktur TKPK Provinsi dan berada langsung di bawah koordinasi Gubernur atau wakil Gubernur (selaku ketua TKPK Provinsi) dengan tupoksi disusun secara spesifik agar tidak overlap dengan tupoksi TKPK dan Program Pemerintah lainnya;

- b. Peran/keterlibatan dunia usaha dalam pola penanggulangan kemiskinan perlu dipertimbangkan baik secara langsung sebagai pelaku di lapangan ataupun tidak langsung melalui diskusi atau kontribusi lainnya;
  - c. Mensinergikan program RHM dan Gerbang Desa Saburai;
  - d. Dunia Usaha (Perabiz) dengan pengalaman manajemen korporasi dan entrepreneurnya dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa.
- Rencana Tindak Lanjut dalam rapat ini:  
Mengagendakan pertemuan lanjutan (disarankan dalam bentuk FGD) antara TKPK Provinsi dan Perabiz Lampung. Adapun keluaran FGD dapat diperoleh *Policy Paper* RHM sebagai bagian dari program GDS dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.
6. Rapat Koordinasi Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2017 lingkup Pemkesra dan Pemanfaatan BDT sebagai sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Tahun 2017 Hari Selasa Tanggal 01 November 2017 di Ruang Rapat Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- Permasalahan yang berkembang dalam rapat tersebut :
- a. Rekomendasi BPK berdasarkan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung Tahun 2010-2014;
  - b. Data BDT hasil updating tahun 2015 dari TNP2K telah diterima Pemerintah Provinsi pada bulan agustus 2016 dan telah disampaikan kepada pemerintah Kab/Kota.
  - c. Kelembagaan TKPK telah terbentuk di tingkat provinsi maupun seluruh Kab/kota, namun masih perlu dilakukan penguatan fungsi dan peran Sekretariat TKPK di setiap daerah.
  - d. Dokumen SPKD sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan telah disusun oleh 5 kab/kota, 2 kab/kota masih dalam proses dan 8 kab/kota belum menyusun dokumen tersebut.

- e. Dokumen LP2KD Tahun 2015 telah disusun oleh 9 Kab/kota, 2 kab/kota sedang dalam proses dan 4 kab/kota belum menyusun.
- Rencana Tindak Lanjut dalam rapat ini :
  - a. Menggunakan BDT by name by address sebagai data sasaran tunggal dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah mulai TA. 2017 dengan prioritas Desil I.
  - b. Mensinergikan program-program pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/kota.
  - c. Dokumen SPKD dan LP2KD yang belum disusun oleh Pemerintah Kab/Kota akan diselesaikan Tahun 2017.
  - d. Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi akan menyiapkan Software /sistem informasi yang terintegrasi secara online dengan Kab/Kota.
  - e. Kab/kota yang akan melakukan updating/verifikasi dan validasi terhadap data BDT minimal harus menggunakan instrumen data yang sama dengan proses pemutakhiran BDT Tahun 2015.
  - f. Seluruh kesepakatan dimaksud akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan akan ditandatangani pada RAKORGUB dan Bupati/walikota se-Provinsi Lampung dalam waktu yang tidak terlalu lama.
  
- 7. Rapat Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2016 Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2016 di Ruang Rapat Bappeda Lantai 1.
  - Permasalahan yang berkembang dalam rapat tersebut :
    - a. Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung selama 2 tahun selalu bergerak dikisaran Tahun 2015 sebesar 13,53% dan Tahun 2016 sebesar 14,29%.
    - b. Selama periode September 2015-maret 2016, baik perkotaan maupun pedesaan mengalami kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin.

- c. Pelaksanaan program usaha dilaksanakan secara sektoral dan belum terintegrasi antara SKPD dilingkup Provinsi Maupun antara provinsi dangna Kab/kota, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara komprehensif, terpadu dan multidimensi dalam program lintas pembangunan dengan mensinergikan peran Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- Rencana tindak lanjut dalam rapat ini:
- a. Data BDT hasil updating tahun 2015 oleh TNP2K telah diterima Pemprov Lampung pada Bulan agustus 2016 dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kab/Kota.
  - b. Untuk sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program Gulkin di Provinsi Lampung maka SKPD di lingkup Provinsi Lampung untuk menggunakan /memanfaatkan data BDT sebagai data tunggal program atau kegiatan yang sarannya rumah tangga maupun individu.
  - c. Pemerintah Kab/Kota dapat menggunakan data tersebut secara bertahap dengan sasaran RT yang berada di Desil I s.d Desil IV yang dimulai sejak Tahun 2017.
  - d. Telah disepakati bersama bahwa sasaran rumah tangga/individu yang akan ditangani mulai dari Desil I.

### **Penyusunan SPKD**

Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab/ Kota berkewajiban menyusun dokumen SPKD sesuai dengan Permendagri nomor 42 Tahun 2010 serta dapat dijadikan referensi dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan lain-lain.

Terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang sudah menyusun SPKD yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Pesisir Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan. Masih terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Yang belum menyusun SPKD. Selain Kabupaten/Kota, SKPD Provinsi khususnya SKPD



terkait Penanggulangan Kemiskinan diharapkan menyusun finalisasi dokumen SPKD 2016.

### **4.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan**

#### **4.3.1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan**

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang dilaksanakan di Provinsi Lampung di antaranya adalah pemberian beras untuk masyarakat miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), dan beasiswa bagi siswa miskin. Pengendalian yang dilakukan berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi seperti : pemberian bantuan tepat sasaran; pemberian bantuan tepat waktu sesuai jadwal; pemberian bantuan tepat jumlah. Hasil monitoring yang dilaksanakan selama ini menunjukkan bahwa pemberian Raskin masih ada yang belum tepat sasaran dan tepat jumlah karena juga menjangkau masyarakat yang tidak miskin. Hal ini dikarenakan masih adanya tuntutan dari sebagian masyarakat agar Raskin dibagi secara merata ke seluruh masyarakat. Melihat kondisi demikian, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa Raskin diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar miskin. Sementara itu, pelaksanaan Jamkesmas di Provinsi Lampung diupayakan tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Meskipun demikian, masih ada keluhan dari LSM yang menyoroti bahwa ada sebagian masyarakat miskin yang belum dapat mengakses Jamkesmas karena tidak terdata sebagai penerima Jamkesmas. Untuk itu, TKPKD Provinsi Lampung yang dimotori oleh Bappeda membuka ruang dialog kepada LSM untuk menyampaikan data-data masyarakat miskin yang sekiranya

masih tercecer sebagai penerima Jamkesmas agar dapat dimasukkan sebagai penerima Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).

- b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang dilaksanakan di Provinsi Lampung di antaranya adalah pemberian bantuan modal untuk usaha kelompok dan pemberian bantuan peralatan usaha.

- c. Program Penanggulangan Kemiskinan Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan Perlindungan Sosial

Program penanggulangan kemiskinan perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang dilaksanakan di Provinsi Lampung di antaranya adalah pemberian bekal keterampilan bagi pekerja migran, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), serta pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.

Sekretariat TKPKD Provinsi Lampung menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagai gambaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang di Provinsi Lampung, mencakup kondisi umum kemiskinan daerah, prioritas target bidang dan intervensi penanggulangan kemiskinan, tinjauan anggaran penanggulangan kemiskinan, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah, serta koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan.

Monitoring dan evaluasi TKPK diharapkan memanfaatkan program SKPD/satker terkait sehingga dapat saling bersinergi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

### **4.3.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Di Tahun 2016 belum ada sistem penanganan pengaduan masyarakat yang secara khusus dikelola oleh TKPK Provinsi Lampung. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi sejauh ini masih disampaikan melalui SKPD penanggung jawab program baik secara langsung maupun secara tertulis dengan metode penanganan permasalahan dilakukan secara hierarki dan birokrasi, karena TKPKD Provinsi Lampung merupakan salah satu sistem organisasi yang melekat di dalam tata pemerintahan.

Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Provinsi Lampung khususnya dapat melakukan koordinasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan berbagai upaya di bidang penanggulangan kemiskinan pada TKPKD Provinsi Lampung.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Angka kemiskinan Lampung dari penghitungan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017 mencapai 13,69 persen. Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (September 2016) angka kemiskinan Lampung mengalami penurunan 0,17 poin, dari 13,86 persen. Sejalan dengan penurunan persentase, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2017 juga berkurang sebanyak 8,05 ribu jiwa menjadi 1,132 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang sebesar 1,140 juta jiwa.
2. Untuk pelaksanaan bantuan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD melalui APBD Provinsi Lampung masih bersifat *top down* karena paket bantuan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD tersebut, sedangkan kegiatan Gerbang Desa dinilai lebih optimal karena bantuan keuangan langsung disalurkan ke lokus desa tertinggal dengan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri. Bantuan pemerintah provinsi ini dilakukan melalui *cash transfer* ke masing-masing rekening desa sesuai mekanisme APBD Provinsi Lampung, namun bantuan dana yang diberikan masih sangat kecil dan sedikit dibandingkan dengan jumlah desa tertinggal di wilayah Provinsi Lampung sehingga hasilnya kurang maksimal.
3. Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pada pendidikan (APM SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun), kesehatan (kematian ibu dan bayi, gizi buruk dan kurang), ketenagakerjaan (tingkat partisipasi angkatan kerja), dan infrastruktur dasar (sanitasi dan air bersih).

## 5.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung:

- a. Menggunakan BDT *by name by address* sebagai data sasaran tunggal dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah mulai TA. 2017 dengan prioritas Desil I (10% tingkat kesejahteraan terendah)
- b. Mensinergikan program-program pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/kota, meliputi :
  1. Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah/Rumah Tidak Layak Huni;
  2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan;
  3. Pembinaan Kemampuan Berwirausaha;
  4. Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi petani dan nelayan;
  5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
  6. Perlindungan sosial Bagi PMKS;
  7. Pengembangan UMKM;
  8. Pemberian Beasiswa/subsidi bagi siswa miskin.
- c. Dokumen SPKD dan LP2KD yang belum disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan diselesaikan Tahun 2017.
- d. Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi akan menyiapkan Software /sistem informasi yang terintegrasi secara online dengan Kab/Kota sehingga dapat didokumentasikan intervensi program/kegiatan terhadap Rumah Tangga/Individu Sasaran, serta mapping kebutuhan/program kegiatan intervensi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban :
  1. Melakukan penguatan kelembagaan TKPK.
  2. Menyiapkan sarana prasarana, anggaran dan SDM sebagai penanggung jawab, pengelola data/operator pada sekretariat TKPK.

- e. Kabupaten/kota yang akan melakukan updating/verifikasi dan validasi terhadap data BDT minimal harus menggunakan instrumen data yang sama dengan proses pemutakhiran BDT Tahun 2015.
- f. Aturan yang menetapkan bahwa Ketua TKPK adalah Wakil Kepala Daerah agar dapat ditinjau kembali.
- g. Rekomendasi untuk TNP2K agar mempermudah akses dan alur birokrasi dalam mendapatkan data Basis Data Terpadu (BDT) *by name by address*.Diharapkan kedepan TNP2K dapat mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga untuk memanfaatkan BDT dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat.

# LAMPIRAN